



Pengantar Ilmu Ekonomi

Aris Gumilar, Adi Lukman Hakim , Maria Suryaningsih,
Ani Silvia, Junet Kaswoto, Ria Puspitasari, Humairoh,
Ahmad Refki Saputra, Wahyu Hidayat, Ahmad Junaidi, Eko Sudarmanto,
Harimurti Wulandjani, Peggy Ratna Marlianingrum, Suryani Yuli Astuti

Editor: Dr. Muh. Abdul Rosid, SE., MM. & Ilma Darojat, SE., MM.

PENGANTAR ILMU EKONOMI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Aris Gumilar, Adi Lukman Hakim, Maria Suryaningsih, Ani Silvia,
Junet Kaswoto, Ria Puspitasari, Humairoh, Ahmad Refki Saputra,
Ahmad Junaidi, Eko Sudarmanto, Harimurti Wulandjani,
Peggy Ratna Marlianingrum, Suryani Yuli Astuti

Editor:

Dr. Muh. Abdul Rosid, SE., MM.

Ilma Darajat, SE., MM.

PENGANTAR ILMU EKONOMI



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

PENGANTAR ILMU EKONOMI

Copyright © Februari 2025

Penulis : Aris Gumilar
Adi Lukman Hakim
Maria Suryaningsih
Ani Silvia
Junet Kaswoto
Ria Puspitasari
Humairoh
Ahmad Refki Saputra
Ahmad Junaidi
Eko Sudarmanto
Harimurti Wulandjani
Peggy Ratna Marlianingrum
Suryani Yuli Astuti
Editor : Dr. Muh. Abdul Rosid, SE., MM.
Ilma Darajat, SE., MM.
Setting dan layout : Team Minhaj Pustaka
Desain cover : Team Minhaj Pustaka

Hak Penerbitan ada pada © Minhaj Pustaka 2025

Hakcipta © 2025 pada penulis

Ukuran: UNESCO (15,5 x 23 cm)

Halaman : viiii, 262 hal

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit Minhaj Pustaka

Cetakan I, Februari 2025

ISBN: 978-634-7065-93-3



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

Jl. Pandawa II, DB 2, No. 97, Gelam Jaya, Pasar Kemis, Tangerang

Banten – Indonesia

Telp. 085717079887

E-mail : minhajpustaka@gmail.com

Website: www.minhajpustaka.id

PRAKATA PENULIS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan dan penerbitan buku yang berjudul **"Pengantar Ilmu Ekonomi"**. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi, baik dari perspektif mikro ekonomi maupun makro ekonomi, serta relevansinya dalam konteks global dan lokal di era modern.

Ilmu ekonomi memiliki peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, organisasi, maupun negara. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang, pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ekonomi menjadi sangat penting bagi para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat umum. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam menjawab kebutuhan informasi terkait konsep dasar, teori, serta penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Penyusunan buku ini melibatkan kontribusi dari berbagai penulis yang ahli di bidangnya, yang telah bekerja keras untuk memberikan karya terbaik mereka. Kolaborasi ini tidak hanya menambah kekayaan konten buku ini, tetapi juga mencerminkan semangat kerja sama antar-akademisi dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat. Semoga buku ini dapat memperluas wawasan para pembaca dan menjadi referensi yang relevan bagi perkembangan ilmu ekonomi di Indonesia.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, material, serta masukan berharga dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada rekan-rekan penulis, editor, serta tim

penerbit yang telah berdedikasi menyelesaikan karya ini dengan penuh kesungguhan.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca. Tentu buku ini masih memiliki kekurangan yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan edisi-edisi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tangerang, November 2024

Hormat kami,

Ketua Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS.....	v
DAFTAR ISI	vii
Definisi, Ruang Lingkup, Sejarah dan Cabang Ilmu Ekonomi	1
Aris Gumilar	
Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi	19
Adi Lukman Hakim	
Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar.....	35
Maria Suryaningsih	
Teori Perilaku Konsumen	59
Ani Silvia	
Teori Produksi dan Biaya	75
Junet Kaswoto	
Struktur Pasar dan Perilaku Konsumen	93
Ria Puspitasari	
Teori Pendapatan Nasional	107
Humairoh	
Kebijakan Fiskal dan Moneter	131
Ahmad Refki Saputra	
Pasar Modal dan Investasi	155
Ahmad Junaidi	
Ekonomi Internasional	173
Eko Sudarmanto	
Ekonomi Publik dan Peran Pemerintah	201
Harimurti Wulandjani	

Ekonomi dan Lingkungan	227
Peggy Ratna Marlianingrum	
Ekonomi Syariah	249
Suryani Yuli Astuti	

Definisi, Ruang Lingkup, Sejarah dan Cabang Ilmu Ekonomi

Oleh: Aris Gumilar

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Ilmu ekonomi merupakan salah satu disiplin ilmu sosial yang memainkan peran vital dalam kehidupan manusia. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan terkait dengan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Definisi klasik dari ilmu ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh Paul Samuelson, menegaskan bahwa ekonomi adalah studi tentang pilihan rasional dalam konteks kelangkaan (Samuelson, 2022). Kelangkaan ini memaksa setiap entitas ekonomi untuk memilih bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien.

Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas perilaku individu atau perusahaan dalam pasar tertentu, termasuk interaksi permintaan dan penawaran serta pengaturan harga. Sementara itu, ekonomi makro lebih berfokus pada fenomena yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau dunia secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal (Mankiw, 2023). Keduanya, meskipun berbeda dalam pendekatan dan skala, saling melengkapi dalam analisis ekonomi yang lebih komprehensif.

Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi telah mengalami banyak perubahan signifikan, mulai dari teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith hingga pemikiran modern yang lebih kompleks dalam memahami globalisasi, krisis keuangan, dan keberlanjutan ekonomi. Tantangan-tantangan kontemporer seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan global memerlukan pendekatan baru yang lebih holistik dalam menerapkan teori ekonomi (Stiglitz, 2023). Pengantar ilmu ekonomi memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana teori dan konsep dasar ekonomi dapat diterapkan dalam konteks praktis di dunia yang terus berkembang.

A. Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang memiliki cakupan luas dan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh fokus utamanya yang berkenaan dengan bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan terkait dengan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas.

1. Definisi Ilmu Ekonomi

Secara etimologis, istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomia*, yang terdiri dari kata "*oikos*" (rumah tangga) dan "*nomos*" (aturan), sehingga secara harfiah berarti aturan rumah tangga. Namun, dalam konteks yang lebih luas, ilmu ekonomi telah berkembang menjadi studi tentang bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dalam skala yang jauh lebih besar dari rumah tangga, termasuk dalam konteks perusahaan, masyarakat, dan negara.

Menurut Paul Samuelson dan William Nordhaus dalam bukunya *Economics* (2022), "Ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang-barang yang berharga dan mendistribusikannya di antara orang-orang yang berbeda." Definisi ini menggarisbawahi konsep kelangkaan, yaitu fakta bahwa sumber daya alam, waktu, dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia yang tak terbatas. Oleh karena itu, individu dan

masyarakat harus membuat pilihan yang tepat dalam mengalokasikan sumber daya tersebut.

Sumber daya dalam ekonomi terbagi menjadi empat kategori utama: tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*), dan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Tanah mencakup semua sumber daya alam seperti air, mineral, dan hutan; tenaga kerja mengacu pada usaha manusia yang digunakan dalam proses produksi; modal mencakup barang-barang fisik yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, seperti mesin dan bangunan; dan kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengambil risiko dan mengorganisir faktor-faktor produksi tersebut menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.

Definisi lain yang sering digunakan adalah definisi dari Lionel Robbins, seorang ekonom terkenal, yang menyatakan bahwa "Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan yang tidak terbatas dengan sarana yang langka yang memiliki alternatif penggunaan" (Robbins, 1932). Definisi ini menekankan pada pilihan rasional yang harus dilakukan oleh individu dan entitas lain ketika dihadapkan pada kelangkaan. Setiap pilihan memiliki biaya peluang, yaitu manfaat yang harus dikorbankan dari pilihan lain yang tidak diambil.

Ekonomi juga dapat dilihat dari berbagai perspektif. Sebagai contoh, ekonomi positif mempelajari "apa adanya" dalam konteks ekonomi, yaitu deskripsi objektif tentang fenomena ekonomi yang dapat diuji dengan data empiris. Sementara itu, ekonomi normatif mempelajari "apa yang seharusnya", atau dengan kata lain, melibatkan penilaian subjektif tentang kebijakan atau keputusan ekonomi yang ideal berdasarkan nilai-nilai etis dan moral.

2. Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi

Ruang lingkup ilmu ekonomi sangat luas dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keputusan individu terkait pembelian barang hingga kebijakan pemerintah yang mempengaruhi ekonomi global. Secara garis besar, ruang lingkup ekonomi dapat dibagi menjadi dua cabang utama: ekonomi mikro dan ekonomi makro. Meskipun kedua cabang ini mempelajari aspek yang berbeda

dalam ekonomi, keduanya saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ekonomi.

a. Ekonomi Mikro (*Microeconomics*)

Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fokus utama dari ekonomi mikro adalah bagaimana unit ekonomi yang lebih kecil ini membuat pilihan terkait konsumsi, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Dalam ekonomi mikro, isu-isu seperti interaksi antara penawaran dan permintaan, harga, serta alokasi sumber daya di pasar dipelajari dengan mendalam.

Menurut Gregory Mankiw dalam bukunya *Principles of Economics* (2023), ekonomi mikro menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:

- a) Bagaimana konsumen memutuskan untuk membelanjakan pendapatan mereka di antara berbagai barang dan jasa?
- b) Bagaimana perusahaan memutuskan berapa banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan dan berapa banyak produk yang akan dihasilkan?
- c) Bagaimana harga barang dan jasa ditentukan di pasar?
- d) Bagaimana pasar berfungsi secara efisien, dan dalam keadaan apa pasar gagal menghasilkan hasil yang optimal?

Salah satu konsep inti dalam ekonomi mikro adalah hukum permintaan dan penawaran, yang menjelaskan bagaimana harga barang dan jasa ditentukan di pasar. Menurut hukum permintaan, ketika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang diminta konsumen cenderung menurun, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan (*ceteris paribus*). Sebaliknya, hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, produsen cenderung memasok lebih banyak barang ke pasar.

Selain itu, ekonomi mikro juga membahas tentang teori utilitas, yang menjelaskan bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan mereka berdasarkan anggaran yang terbatas. Teori ini berfokus pada

bagaimana individu memilih kombinasi barang dan jasa yang memberikan utilitas (kepuasan) terbesar.

b. Ekonomi Makro (*Macroeconomics*)

Jika ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan, maka ekonomi makro berfokus pada fenomena ekonomi secara keseluruhan, baik di tingkat nasional maupun global. Ekonomi makro mempelajari agregat ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Ekonomi makro memiliki dua tujuan utama: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas harga. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan bank sentral menggunakan alat-alat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

- a) Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pemerintah dalam hal pengeluaran dan perpajakan. Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya, mereka dapat meningkatkan pengeluaran publik atau menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi.
- b) Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Ketika inflasi tinggi, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menurunkan permintaan agregat, sehingga menurunkan tekanan inflasi.

Salah satu konsep dasar dalam ekonomi makro adalah produk domestik bruto (PDB), yang digunakan untuk mengukur output total suatu negara. PDB mengukur nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. PDB dapat dibagi menjadi PDB nominal, yang mengukur output dengan menggunakan harga saat ini, dan PDB riil, yang mengoreksi PDB nominal dengan menghilangkan dampak inflasi.

Menurut Olivier Blanchard dalam *Macroeconomics* (2022), ekonomi makro juga mempelajari siklus bisnis, yaitu fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi yang terjadi seiring dengan perubahan

dalam permintaan dan penawaran agregat. Siklus bisnis terdiri dari empat fase: ekspansi, puncak, resesi, dan pemulihan. Ekonomi makro berusaha untuk memahami penyebab siklus bisnis dan mengidentifikasi kebijakan yang dapat mengurangi dampaknya, seperti penggunaan kebijakan fiskal ekspansif untuk melawan resesi atau kebijakan moneter kontraktif untuk mengatasi inflasi.

Ekonomi makro juga berfokus pada inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah peningkatan umum dalam harga barang dan jasa dari waktu ke waktu, yang mengurangi daya beli konsumen. Di sisi lain, pengangguran adalah kondisi di mana individu yang mencari pekerjaan tidak dapat menemukan pekerjaan. Kedua masalah ini sering kali saling terkait dan menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

c. Bidang Lain dalam Ekonomi

Selain ekonomi mikro dan makro, ilmu ekonomi memiliki beberapa sub-bidang yang lebih spesifik yang juga menjadi bagian dari ruang lingkupnya. Beberapa di antaranya adalah:

- a) Ekonomi Pembangunan (*Development Economics*). Mempelajari bagaimana negara-negara berkembang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Ini mencakup analisis tentang kebijakan, institusi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.
- b) Ekonomi Internasional (*International Economics*). Mempelajari interaksi ekonomi antarnegara, termasuk perdagangan internasional, investasi asing, dan nilai tukar mata uang. Ekonomi internasional berfokus pada keuntungan dan tantangan dari globalisasi ekonomi.
- c) Ekonomi Keuangan (*Financial Economics*). Mempelajari bagaimana pasar keuangan berfungsi, bagaimana perusahaan mengelola keuangan mereka, dan bagaimana keputusan investasi dibuat. Ekonomi keuangan mencakup topik-topik seperti pasar saham, obligasi, dan derivatif.

- d) Ekonomi Kesehatan (*Health Economics*). Mempelajari bagaimana sumber daya dialokasikan dalam sistem kesehatan dan bagaimana keputusan ekonomi mempengaruhi kesehatan individu dan populasi.
- e) Ekonomi Lingkungan (*Environmental Economics*). Berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan. Ekonomi lingkungan mempelajari bagaimana kebijakan ekonomi dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

B. Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi sebagai studi sistematis pertama kali muncul pada masa Yunani Kuno. Pemikir-pemikir seperti Xenophon dan Plato mulai membahas tentang masalah ekonomi dalam konteks negara dan masyarakat. Xenophon dalam karyanya *Oeconomicus* membahas tentang pengelolaan rumah tangga dan properti, yang menjadi cikal bakal ekonomi mikro (Smith, 2020). Plato, dalam bukunya *The Republic*, menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian sumber daya. Aristoteles juga memberikan kontribusi penting dengan pemikirannya mengenai uang, harga, dan keadilan distributif dalam perdagangan (Marshall, 2019).

Pada masa Romawi, perhatian terhadap ekonomi lebih diarahkan kepada masalah administrasi dan kebijakan fiskal. Cicero dan Seneca, misalnya, membahas hubungan antara moralitas dan kekayaan, tetapi belum ada pemikiran yang mendalam tentang teori ekonomi (Colander, 2020).

1. Masa Skolastik dan Ekonomi Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan, ilmu ekonomi didominasi oleh pemikiran skolastik, yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Gereja Katolik. Para teolog skolastik seperti Thomas Aquinas mengembangkan teori-teori ekonomi yang didasarkan pada moralitas Kristen, terutama yang berkaitan dengan konsep harga yang adil dan riba (Friedman, 2016).

Meskipun belum ada perkembangan yang signifikan dalam teori ekonomi, pada periode ini perdagangan mulai berkembang di Eropa, terutama karena Perang Salib yang membuka jalur perdagangan antara Timur dan Barat (Keynes, 2018).

2. Masa Merkantilisme (1500–1700)

Periode merkantilisme merupakan salah satu fase penting dalam perkembangan ilmu ekonomi. Para pemikir merkantilisme seperti Jean-Baptiste Colbert di Prancis dan Thomas Mun di Inggris berpendapat bahwa kekayaan suatu negara diukur dari jumlah emas dan perak yang dimilikinya (Kahneman, 2011). Negara-negara harus mendorong ekspor dan membatasi impor untuk menjaga aliran logam mulia ke dalam negeri (Colander, 2020).

3. Lahirnya Ekonomi Klasik (1750–1850)

Ilmu ekonomi mulai berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih sistematis dengan lahirnya ekonomi klasik pada abad ke-18. Tokoh-tokoh utama ekonomi klasik adalah Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Karya monumental Adam Smith, *The Wealth of Nations* (1776), menandai lahirnya ekonomi modern. Smith mengajukan konsep "*invisible hand*", di mana pasar akan mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme penawaran dan permintaan (Smith, 2020).

David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif, yang menjelaskan bahwa negara-negara harus fokus pada produksi barang yang mereka hasilkan dengan lebih efisien dibanding negara lain (Marshall, 2019). Sementara itu, John Stuart Mill memperluas teori-teori ekonomi klasik dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dalam ekonomi serta peran pemerintah dalam mengoreksi kegagalan pasar (Friedman, 2016).

4. Ekonomi Marxis (1850–an)

Karl Marx menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi dengan kritiknya terhadap ekonomi klasik dan kapitalisme. Dalam karya utamanya, *Das Kapital*, Marx mengembangkan teori tentang nilai lebih (*surplus value*), yang ia

pandang sebagai sumber eksploitasi dalam sistem kapitalis (Keynes, 2018). Marx juga memprediksi bahwa kapitalisme akan runtuh dan digantikan oleh sosialisme (Colander, 2020).

5. Neoklasik dan Munculnya Ekonomi Mikro dan Makro (1870-an)

Pada akhir abad ke-19, muncul aliran pemikiran baru yang dikenal sebagai ekonomi neoklasik. Para ekonom neoklasik seperti Alfred Marshall mengembangkan teori yang lebih formal tentang harga, utilitas, dan produksi. Mereka berfokus pada mekanisme pasar dan bagaimana harga terbentuk melalui interaksi penawaran dan permintaan (Marshall, 2019). Marshall, dalam bukunya *Principles of Economics* (1890), memperkenalkan konsep elastisitas, yang menggambarkan sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga (Smith, 2020).

6. Teori Keynesian dan Ekonomi Pasca Depresi Besar (1930-an)

Masa Depresi Besar pada tahun 1930-an mengubah cara pandang para ekonom terhadap ekonomi. John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris, mengembangkan teori yang berlawanan dengan ekonomi klasik. Dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936), Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu mampu mengoreksi dirinya sendiri dan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi krisis ekonomi (Keynes, 2018).

7. Perkembangan Ekonomi Kontemporer

Ilmu ekonomi terus berkembang dengan munculnya berbagai aliran pemikiran baru di abad ke-20 dan 21. Monetarisme, yang dipelopori oleh Milton Friedman, menekankan pentingnya kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. Friedman berpendapat bahwa intervensi pemerintah seharusnya diminimalisir, dan fokus harus diberikan pada pengelolaan suplai uang (Friedman, 2016).

Selain itu, ekonomi perilaku (*behavioral economics*) juga muncul sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana faktor psikologis mempengaruhi keputusan ekonomi individu (Kahneman, 2011).

C. Cabang-cabang Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi terbagi ke dalam dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Keduanya memiliki fokus kajian yang berbeda namun saling berkaitan. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan unit ekonomi kecil, sedangkan ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan, termasuk isu-isu seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

1. Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas (Varian, 2020). Fokus utama dari ekonomi mikro adalah bagaimana keputusan-keputusan individu mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa, serta bagaimana harga terbentuk di pasar. Ekonomi mikro juga membahas konsep-konsep seperti elastisitas, biaya peluang, dan keseimbangan pasar.

a) Teori Permintaan dan Penawaran

Salah satu konsep paling dasar dalam ekonomi mikro adalah teori permintaan dan penawaran. Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Dalam teori ini, keseimbangan harga terbentuk ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ini dikenal sebagai harga keseimbangan (Varian, 2020).

Ketika harga suatu barang naik, biasanya jumlah yang diminta akan turun, dan sebaliknya, jumlah yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat. Faktor-faktor seperti pendapatan, preferensi

konsumen, harga barang substitusi dan komplementer, serta ekspektasi terhadap harga masa depan dapat mempengaruhi permintaan (Pindyck & Rubinfeld, 2018). Di sisi lain, biaya produksi, teknologi, serta jumlah produsen di pasar dapat mempengaruhi penawaran.

b) Elastisitas

Elastisitas adalah konsep lain dalam ekonomi mikro yang merujuk pada seberapa sensitif perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Jika permintaan atau penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga, maka dikatakan elastis, sementara jika perubahan harga hanya berdampak kecil pada jumlah yang diminta atau ditawarkan, maka tidak elastis atau inelastis (Pindyck & Rubinfeld, 2018).

Ada beberapa jenis elastisitas yang penting dalam ekonomi mikro, termasuk elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, serta elastisitas pendapatan. Elastisitas harga permintaan mengukur bagaimana perubahan harga suatu barang mempengaruhi jumlah barang yang diminta, sedangkan elastisitas pendapatan mengukur bagaimana perubahan pendapatan konsumen mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut (Varian, 2020).

c) Teori Produksi dan Biaya

Teori produksi dan biaya adalah bagian penting lain dari ekonomi mikro. Teori ini mempelajari bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Perusahaan menghadapi biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap tidak berubah terlepas dari jumlah barang yang diproduksi, sedangkan biaya variabel berubah seiring dengan jumlah produksi (Pindyck & Rubinfeld, 2018).

Dalam jangka pendek, perusahaan menghadapi biaya marjinal, yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Perusahaan akan terus memproduksi sampai biaya marjinal sama dengan pendapatan marjinal (pendapatan dari

penjualan satu unit tambahan barang), karena inilah titik di mana keuntungan dimaksimalkan (Varian, 2020).

d) Teori Pasar

Dalam ekonomi mikro, pasar diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur dan tingkat persaingan. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual bersifat homogen, dan tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Dalam kondisi ini, tidak ada satu pun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga pasar. Di sisi lain, monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar dan dapat menentukan harga (Pindyck & Rubinfeld, 2018).

Ada juga bentuk-bentuk pasar lainnya, seperti oligopoli, di mana hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar, dan persaingan monopolistik, di mana banyak penjual menawarkan produk yang berbeda namun serupa. Struktur pasar ini mempengaruhi bagaimana harga dan output ditentukan dalam suatu industri.

2. Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi dalam skala besar, termasuk keseluruhan perilaku agregat dari perekonomian nasional atau global. Ini mencakup analisis tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Ekonomi makro juga berusaha memahami siklus bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dalam perekonomian secara keseluruhan (Blanchard, 2021).

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi suatu negara dari waktu ke waktu. Hal ini diukur melalui perubahan produk domestik bruto (PDB), yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi investasi, tingkat teknologi, pendidikan, serta kebijakan pemerintah (Mankiw, 2019).

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan penting bagi kesejahteraan masyarakat, karena memungkinkan adanya peningkatan standar hidup dan pengurangan kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi juga sering kali disertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan, sehingga kebijakan redistribusi diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial.

b) Inflasi

Inflasi adalah kenaikan umum dalam harga barang dan jasa dari waktu ke waktu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Inflasi diukur dengan indeks harga konsumen (IHK) atau indeks harga produsen (IHP). Inflasi dapat terjadi karena peningkatan permintaan yang melebihi penawaran (*demand-pull inflation*) atau peningkatan biaya produksi (*cost-push inflation*) (Blanchard, 2021).

Inflasi yang terlalu tinggi dapat merusak stabilitas ekonomi karena mengurangi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral biasanya menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Sebaliknya, deflasi atau penurunan harga secara umum juga dapat merugikan perekonomian, karena menyebabkan kontraksi konsumsi dan investasi (Mankiw, 2019).

c) Pengangguran

Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang bersedia dan mampu bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Dalam ekonomi makro, pengangguran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti pengangguran siklikal, yang disebabkan oleh fluktuasi dalam siklus bisnis, pengangguran struktural, yang disebabkan oleh pergeseran industri atau teknologi, dan pengangguran friksional, yang terjadi karena transisi pekerjaan (Blanchard, 2021).

Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi masalah serius bagi perekonomian karena menurunkan pendapatan nasional dan mengurangi konsumsi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sering difokuskan pada penciptaan lapangan kerja melalui program stimulus ekonomi atau pengembangan industri.

d) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengeluaran dan penerimaan negara untuk mengelola perekonomian. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak untuk merangsang perekonomian selama resesi. Sebaliknya, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengurangi inflasi selama periode ekspansi ekonomi yang berlebihan (Mankiw, 2019).

Kebijakan fiskal sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Namun, kebijakan ini juga dapat menyebabkan peningkatan utang publik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara upaya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.

e) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Salah satu alat utama kebijakan moneter adalah suku bunga acuan, yang mempengaruhi tingkat bunga pinjaman dan investasi di seluruh perekonomian (Blanchard, 2021).

Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk merangsang investasi dan konsumsi selama masa resesi. Sebaliknya, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mendinginkan perekonomian yang sedang tumbuh terlalu cepat dan mengendalikan inflasi. Selain itu, operasi pasar terbuka digunakan untuk membeli atau menjual surat utang negara guna mengatur jumlah uang beredar (Mankiw, 2019).

D. Penutup

Ilmu ekonomi, sebagai disiplin ilmu yang telah berkembang selama berabad-abad, memainkan peran penting dalam memahami bagaimana individu, perusahaan, dan negara mengelola sumber daya yang terbatas

untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Cabang-cabang utama ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, memberikan kerangka untuk menganalisis berbagai aspek dari aktivitas ekonomi. Ekonomi mikro fokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan sehari-hari, terutama terkait dengan penawaran, permintaan, serta harga barang dan jasa. Sementara itu, ekonomi makro menawarkan pandangan lebih luas, menyoroti isu-isu yang mempengaruhi perekonomian nasional dan global, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi.

Dalam ekonomi mikro, konsep-konsep seperti elastisitas, teori produksi, serta jenis-jenis pasar memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar dan bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan. Sedangkan dalam ekonomi makro, kebijakan fiskal dan moneter menjadi alat penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk menstabilkan perekonomian.

Dengan memahami kedua cabang ilmu ekonomi ini, baik secara mikro maupun makro, akan membantu individu dapat lebih bijak dalam menilai dampak dari berbagai kebijakan ekonomi dan memprediksi dinamika perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ilmu ekonomi, dengan kerangka analisis yang komprehensif, membantu individu dan negara mengambil keputusan yang lebih rasional dalam mengalokasikan sumber daya.

Referensi

- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics*. New York: Pearson.
- Blanchard, O. (2022). *Macroeconomics*. 8th ed. Pearson.
- Colander, D. (2020). *Macroeconomics*. New York: McGraw-Hill.
- Friedman, M. (2016). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Keynes, J. M. (2018). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Palgrave Macmillan.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2023). *Principles of Economics*. 9th ed. Cengage Learning.
- Marshall, A. (2019). *Principles of Economics*. London: Palgrave Macmillan.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomics*. Pearson.
- Robbins, L. (1932). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. Macmillan.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2022). *Economics*. 20th ed. McGraw-Hill Education.
- Smith, A. (2020). *The Wealth of Nations*. London: Penguin Books.
- Stiglitz, J. E. (2023). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W.W. Norton & Company.
- Varian, H. R. (2020). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. W.W. Norton & Company.

Profil Penulis



Prof. Dr. H. Aris Gumilar, MM.

Guru Besar Ilmu Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Penulis lahir di Garut, 18 Februari 1958. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa Inggris Universitas Press. Pendidikan di Akademi Bahasa Asing Yapari Bandung pada jurusan Bahasa Jepang. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi di

FKIP UNIS Tangerang tahun 1988, melanjutkan Pendidikan S2 Manajemen di STIE IPWI Jakarta tahun 1996 dan menyelesaikan S3 Ilmu Ekonomi tahun 2006 pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur - Jakarta.

Pada tahun 1990 - 2008 penulis bekerja di UNIS Tangerang dengan jabatan yang pernah ditekuni sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi, Pembantu Dekan III pada FKIP, Pembantu Dekan II pada FKIP, Pembantu Dekan I pada FKIP, Pembantu Rektor III, dan selanjutnya pada tahun 2011 - Sekarang Direktur Lembaga Penjaminan Mutu, dan Dosen Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada tahun 2014 - 2016 juga menjadi Pengajar di Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta. Selain aktif mengajar juga menjadi penjaga MUTU Universitas, penulis juga aktif menjadi narasumber pada berbagai kegiatan workshop dan seminar, serta aktif publikasi

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi

BAB 2

Oleh: Adi Lukman Hakim

Universitas Muhammadiyah Lamongan

A. Kebutuhan Ekonomi

Sejak manusia lahir sudah membutuhkan barang-barang seperti pakaian dan makanan, persoalan ekonomi ini menjadi bahan pemikiran, bagaimana upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup agar keberlangsungan dalam mempertahankan hidup. Untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup manusia harus selalu berusaha dan berupaya, bekerja untuk menghasilkan apa yang mereka butuhkan, sementara alat untuk pemenuhan kebutuhan itu sendiri terbatas. Ketidak seimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas tersebut. Menyebabkan kebutuhan dan alat pemuasnya yang disebut sebagai Ilmu Ekonomi (Deliarnov, 2009). Kemudian ekonomi dalam perkembangan ilmu pengetahuan mempelajari tentang produksi, pertukaran (konsumsi) dan distribusi. Untuk itu persoalan yang harus menjadi pemikiran manusia antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki agar dapat menghasilkan sesuatu (barang dan jasa) untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan.
- 2) Apa dan berapa banyak tiap barang dan jasa perlu dihasilkan
- 3) Bagaimana caranya untuk mendistribusikan barang dan jasa tersebut agar sampai kepada masyarakat atau konsumen akhir.

B. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi semakin kompleks karena manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dinikmati dan apa yang dimilikinya. Mereka yang bekerja semata-mata hanya ingin memenuhi kebutuhan mereka dan berupaya mensejahterakan kehidupan mereka agar semuanya bisa tercukupi. Permasalahan ekonomi tidak pernah putus untuk dikelola, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Karena dunia ini memiliki sumber daya yang terbatas, masyarakat dan pemerintah harus membuat keputusan tentang bagaimana cara terbaik menggunakan sumber daya tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan manusia. Secara umum, masalah ekonomi dapat dibagi menjadi tiga pertanyaan pokok:

1) Apa yang harus diproduksi?

Dalam konteks ini, masyarakat harus memutuskan barang dan jasa mana yang harus diproduksi berdasarkan sumber daya yang tersedia. Misalnya, apakah lebih baik memproduksi makanan, pakaian, rumah, atau teknologi? Keputusan ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2) Bagaimana cara memproduksi?

Setelah menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi, masalah ekonomi berikutnya adalah bagaimana memproduksinya. Ini menyangkut teknologi yang digunakan, jenis sumber daya yang dipilih (misalnya tenaga kerja atau mesin), serta metode produksi yang efisien.

3) Untuk siapa barang dan jasa diproduksi?

Setelah produksi selesai, masalah lain adalah distribusi hasil produksi tersebut. Siapa yang akan menerima barang dan jasa tersebut? Dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan pendapatan, ini bisa menjadi masalah besar, karena tidak semua orang memiliki daya beli yang sama.

Selain itu, ada beberapa masalah ekonomi lainnya yang sering terjadi dalam suatu negara atau perekonomian, seperti:

- a) Inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu ekonomi. Inflasi yang tinggi bisa mengurangi daya beli masyarakat.
- b) Pengangguran: Ketika banyak orang yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka atau jumlah pekerjaan yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah pencari kerja.
- c) Ketimpangan Ekonomi: Ketidakmerataan distribusi kekayaan dan pendapatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini sering menyebabkan ketidakstabilan sosial.
- d) Defisit Anggaran: Ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan negara, yang bisa memicu utang publik yang tinggi.
- e) Resesi: Penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang lama, yang mengarah pada pengurangan produksi, investasi, dan lapangan pekerjaan.

Masalah ekonomi ini memerlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian, mendorong pertumbuhan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi

C. Prinsip Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi kita mengenal suatu kaidah yang dapat dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Kaidah itu disebut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah :

- a) Suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin (optimal) dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan atau
- b) Suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Istilah lain yang berhubungan dengan prinsip ekonomi adalah efisien.

Efisiensi menunjukkan perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan dan hasil. Jadi cara kerja yang efisien menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan.

D. Motif Ekonomi

Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi bagi seseorang itu berbeda-beda, namun motif utama yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Adapun motif ekonomi lainnya adalah:

- 1) Motif memperoleh keuntungan Motif ini merupakan dorongan wajar bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam rangka memperbesar usahanya.
- 2) Motif memperoleh penghargaan Motif ini merupakan motif agar terpuja dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Untuk itu ia tampil dengan gaya mewah dan senang memberi bantuan agar mendapat pujian/penghargaan dari pihak lain.
- 3) Motif memperoleh kekuasaan ekonomi Motif ini merupakan motif ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi, setelah seseorang sukses mengembangkan usahanya dan mendirikan cabang-cabang usahanya di setiap kota, ia tetap berusaha mengembangkan usahanya. Kadang-kadang motif memperoleh kekuasaan sulit dibedakan dengan motif memperoleh penghargaan
- 4) Motif sosial/membantu sesama. Dalam hal ini kegiatan ekonomi seseorang didorong bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan berbuat sosial seperti membantu korban bencana alam, memberi sumbangan pada panti asuhan, yayasan tuna netra dll.

E. Prinsip Dasar Ekonomi

Menurut Ritonga, dkk (2002) Prinsip Ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Cobalah perhatikan perkembangan kehidupan manusia sejak roda pertama kali ditemukan. Manusia menciptakan roda karena sebelumnya ia mendapatkan kenyataan bahwa memindahkan berbagai keperluan hidupnya dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan tenaganya sendiri atau tenaga binatang, ternyata banyak sekali menyita waktu yang ia miliki. Ia juga melihat bahwa tenaga yang ia keluarkan untuk melakukan kegiatan itu terlampau banyak hingga ia sering sekali kehabisan tenaga untuk melakukan kegiatan lainnya.

Pada prinsipnya ekonomi digunakan untuk memenuhi permintaan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi juga dapat berarti pilihan yang dibuat konsumen dan faktor serta perilaku yang mempengaruhi pilihan tersebut. Konsumen ini bisa jadi setiap orang, perusahaan, organisasi, atau badan pemerintah yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Salah satu tokoh ekonomi paling terkenal, Adam Smith, mengemukakan dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" bahwa prinsip ekonomi didasarkan pada konsep pasar bebas yang diatur oleh "tangan tak terlihat" (*invisible hand*). Menurutny, individu yang bertindak atas kepentingan pribadi mereka sendiri secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Sebagai ekonom kontemporer yang terkenal, Gregory menyusun "*Principles of Economics*," yang menguraikan beberapa prinsip dasar ekonomi modern. Salah satu kontribusi utama Mankiw adalah memperkenalkan konsep "*trade-off*" dalam mengambil keputusan ekonomi. Setiap tokoh memiliki pandangan yang unik tentang prinsip ekonomi, yang berkontribusi pada keragaman teori dan pemikiran dalam ilmu ekonomi modern. Namun, banyak dari prinsip-prinsip dasar ini masih digunakan dan diterapkan dalam pemahaman ekonomi kontemporer

F. Macam-macam Prinsip Ekonomi

Menurut Rahmatullah (2019) pada dasarnya prinsip Ekonomi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Prinsip Ekonomi Konsumen

Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen hanya akan menggunakan produk tanpa menjual Kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu. Peranan Konsumen sendiri sangat penting, tanpa adanya Konsumen semua rantai pasokan tidak akan berjalan, karena itu Konsumen merupakan kunci dari keberlangsungan suatu produk. Konsumen juga berperan penting dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Indonesia dengan penduduk lebih dari 280 juta orang ini sangat mengandalkan konsumsi dari konsumen lokal untuk meningkatkan

perputaran ekonomi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan konsumen dalam menerapkan prinsip ekonomi diantaranya:

- a) Membuat prioritas terhadap barang atau jasa yang akan dibeli dengan memperhatikan manfaatnya terlebih dahulu (dahulukan kebutuhan pokok) sebab Konsumen sebaiknya hanya memilih barang dan jasa yang benar-benar penting dan ia butuhkan saja
- b) Menghindari gaya hidup boros dan berfoya-foya dengan membeli barang dengan harga yang mampu dijangkau
- c) Memilih barang dengan kualitas terbaik
- d) Melakukan tawar-menawar dalam membeli barang atau jasa untuk mendapatkan harga terbaik
- e) Membandingkan pengeluaran dan pemasukan, sehingga jangan sampai besar pasak daripada tiang atau lebih besar jumlah pengeluaran daripada jumlah pemasukan

2. Prinsip Ekonomi Produsen

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang berperan dalam penyediaan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Proses produksi yang dilakukan oleh produsen sendiri bertujuan untuk menambah nilai guna barang atau menciptakan suatu benda baru yang berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Contoh Prinsip Ekonomi bagi Produsen sendiri diantaranya:

- a) Memproduksi barang yang banyak dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat
- b) Menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah permintaan
- c) Mencari bahan baku dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang masih terjangkau
- d) Memiliki Karyawan atau Sumber Daya Manusia yang ahli, terampil dan disiplin
- e) Menentukan tempat pembuatan barang atau jasa yang dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan tempat pemasaran

- f) Menggunakan alat berteknologi yang tepat guna, supaya lebih efisien (hemat) serta ramah lingkungan

3. Prinsip Ekonomi Distributor

Distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Distributor juga merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung ataupun melalui retailer seperti warung, toko, supermarket, dan lainnya. Distributor juga berperan menyimpan Barang atau Jasa dalam waktu tertentu sebelum menyalurkannya ke pedagang lain atau konsumen. Tak heran banyak distributor yang memiliki gudang penyimpanan sementara untuk barang-barang yang mereka jual. Distributor sangat berperan dalam penyaluran barang dan jasa dari produsen agar sampai ke tangan pelanggan baik peritel ataupun langsung, sehingga produsen dapat fokus mengawasi kesinambungan produksi, serta kualitas barang. Bagi Pelanggan, distributor mempermudah mendapatkan atau membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Prinsip ekonomi yang harus diperhatikan oleh distributor, diantaranya:

- a) Penggunaan saluran distribusi yang baik juga mencari alat angkut yang ekonomis. Distributor dapat menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan cepat, tepat, dan murah namun tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal
- b) Dalam menentukan tindakan, seorang distributor harus mengetahui cara yang paling efektif dan efisien untuk mampu menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen
- c) Klasifikasi Barang atau Jasa, yaitu kegiatan memilah-milah produk sesuai jenis, ukuran, dan banyaknya sebelum sampai ke konsumen. Distributor juga sebaiknya memperhatikan daya beli masyarakat atau daya beli target marketnya
- d) Promosi, Distributor juga memiliki fungsi promosi, yakni ikut mengenalkan barang atau jasa kepada konsumen, ia haruslah memberikan pelayanan yang baik agar mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal

- e) Menyalurkan barang secara tepat waktu dan dengan hati-hati, supaya tidak terjadi kerusakan pada barang yang diantar

G. Ciri-Ciri Orang yang Menerapkan Prinsip Ekonomi

- 1) Bertindak rasional, artinya seseorang yang melakukan kegiatan atau tindakan selalu dengan akal yang sehat bukan berdasarkan dari emosi dan hawa nafsu
- 2) Bertindak ekonomis, artinya seseorang melakukan kegiatan ekonomi dengan segala perhitungan yang cermat dan perencanaan yang matang
- 3) Bertindak hemat, artinya seseorang melakukan kegiatan ekonomi dapat menghindari pemborosan dengan membeli kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan
- 4) Membuat skala prioritas, artinya seseorang memenuhi kebutuhan dengan membuat urutan kebutuhan menurut tingkat kepentingannya dari yang mendesak sampai yang dapat ditunda-tunda
- 5) Bertindak dengan memakai prinsip *cost and benefit*, artinya seseorang dalam melakukan kegiatan selalu memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diterima dari kegiatan yang dilakukannya

H. Penerapan Prinsip Ekonomi

Prinsip Ekonomi Menurut Gregory Mankiw diantaranya Orang-orang menghadapi *trade-off*, biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu, orang rasional berpikir pada batas-batas, juga tanggap terhadap insentif. Simak prinsip-prinsip lain beserta penjelasannya lengkapnya berikut ini:

1. Pengorbanan Biaya Dibutuhkan untuk Mendapatkan Sesuatu

Biaya atau disebut juga dengan *opportunity cost* adalah pengorbanan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya dapat juga berarti pengorbanan yang bertujuan untuk memperoleh suatu komoditi. Pengorbanan itu dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu maupun kesempatan. Pengorbanan yang tidak bertujuan sendiri disebut juga sebagai

pemborosan. Berdasarkan tujuan pengambilan, biaya terbagi lagi menjadi Biaya Relevan "*Relevant Cost*" (Biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan), kedua Biaya Tidak Relevan "*Irrelevant Cost*" (Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berbeda diantara alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlahnya tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Oleh karena itu biaya tidak relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan).

2. Berpikir Rasional

Rasional adalah pengambilan keputusan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Senada dengan definisi tersebut, kamus Oxford menjelaskan rasional memiliki makna berdasarkan atau sesuai dengan nalar atau logika, mampu berpikir secara bijaksana atau logis, dan memiliki kemampuan bernalar.

3. Pasar Sebagai Tempat Terjadinya Kegiatan Ekonomi

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar tidak menunjuk pada lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Dalam hal ini, pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang.

4. Pemerintah Memiliki Kewenangan untuk Meningkatkan Faktor Produksi

Intervensi di bidang ekonomi biasanya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membantu pedagang-pedagang di pasar

sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Karenanya, saat ini penjual dapat dengan mudah memaksimalkan penghasilannya dengan cara menambahkan pemasukan atas barang atau stok dagang dengan begitu akan memperoleh hasil yang cukup maksimal. Contoh Prinsip Peningkatan Faktor Produksi yaitu dengan Semakin bertambahnya perusahaan yang bangkrut mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar.

5. *Trade-Off dan Opportunity Cost*

Pada setiap pengambilan keputusan ekonomi, seseorang akan dihadapkan pada suatu pilihan, dimana pilihan yang satu akan mengorbankan pilihan yang lainnya. *Trade off* yang dialami oleh semua masyarakat ialah efisiensi dan pemerataan, artinya setiap masyarakat diharapkan mendapat hasil yang optimal dari sumber daya langka yang tersedia, juga pembagian hasil dari sumber daya langka secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

6. Standar Hidup Negara Bergantung pada Kemampuannya dalam Memproduksi Barang dan Jasa

Standar kehidupan suatu negara berbanding lurus dengan kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Apabila kemampuannya dalam melakukan produksi barang dan jasa cukup tinggi maka standar kehidupannya pun tinggi, hal ini berlaku sebaliknya

7. Perdagangan Menguntungkan Semua Pihak

Perdagangan adalah tatanan kegiatan terkait transaksi Barang dan atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

8. Harga akan Meningkat Jika Pemerintah Mencetak Uang dalam Jumlah yang Banyak

Tingginya tingkat peredaran uang akibat tingginya produksi uang itu sendiri, menyebabkan nilai uang menjadi kurang berharga, hal

ini kemudian menyebabkan harga barang yang naik karena nilai dari uang tersebut menurun. Contoh Prinsip Regulasi yang terjadi di negara Zimbabwe yang mengalami hiperinflasi, yaitu munculnya mata uang kertas sampai dengan 10 Milyar

9. Masyarakat Menghadapi *Trade-off* Jangka Pendek antara Inflasi dan Pengangguran

Trade-off antara inflasi dan pengangguran sifatnya hanyalah sementara, namun dapat berlangsung bertahun-tahun. Di negara tertentu meningkatnya inflasi akan mengurangi pengangguran. Namun hal tersebut tampaknya tidak terjadi di Indonesia. Inflasi sendiri adalah “Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli; sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat namun hanya sedikit saja untuk tabungan jangka panjang; menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda yaitu inflasi karena dorongan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (*demand-pull inflation*).

10. Setiap Orang Lebih Tanggap pada Insentif

Umumnya orang akan lebih aktif bila ia mendapatkan keuntungan tambahan dari yang akan ia kerjakan. Hal ini menjadi dasar 10 prinsip ekonomi dimana orang akan lebih bereaksi jika ada timbal balik yang didapatkan

I. Penerapan Prinsip Ekonomi Konsumen

Penerapan prinsip ekonomi konsumen dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Rahmat Winarno (2010) sebagai berikut:

- 1) Hidup hemat Menerapkan prinsip ekonomi dengan hidup hemat, maksudnya menyesuaikan penggunaan barang dengan kemampuan, kebutuhan dan pendapatan kita.
- 2) Pemanfaatan waktu yang tepat Pemanfaatan waktu yang tepat maksudnya menggunakan waktu sebaik-baiknya.
- 3) Cara hidup yang efektif

- 4) Membuat skala prioritas kebutuhan dan kegiatan Skala prioritas adalah penyusunan kebutuhan atau kegiatan yang paling mendesak, penting dan sangat dibutuhkan

Sesuai dengan pendapat yang telah disampaikan di atas, maka penerapan prinsip ekonomi konsumen dengan beberapa pilihan tersebut konsumen perlu melaksanakan prinsip ekonomi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar yang akan dibeli mengadakan tindakan alternatif.
- 2) Menentukan barang yang berkualitas baik, harga murah sesuai dengan kemampuan.
- 3) Tidak mudah tertarik dengan barang obralan dan pembelian barang secara kredit.
- 4) Selalu memperhatikan besarnya pengeluaran/ pembelanjaan sesuai dengan besarnya pendapatan atau penghasilan.

Prinsip ekonomi konsumen membentuk pola dasar atau hukum yang melandasi tindakan ekonomi seorang konsumen, prinsip ekonomi konsumen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Menyusun pilihan kebutuhan dengan mendahulukan yang paling mendesak dan seterusnya sampai pada yang tidak mendesak.
- 2) Memperhatikan kemampuan modal atau daya beli.
- 3) Memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang akan dikeluarkan

J. Keadilan Ekonomi

Serangkaian prinsip yang digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi dikenal sebagai keadilan ekonomi, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan membangun fondasi yang memungkinkan masyarakat untuk hidup yang produktif, kreatif, dan bermartabat.

K. Memahami Keadilan Ekonomi

Ekonomi modern bergantung pada gagasan bahwa modal dan tenaga kerja harus didistribusikan secara adil sehingga semua orang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, keadilan ekonomi berakar pada gagasan bahwa ekonomi akan lebih berhasil jika semua pelaku pasar diperlakukan secara adil. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang bagi semua orang untuk berkembang dan sejahtera, bersama dengan keadilan yang mendukung gagasan ini. Membiarkan pasar memutuskan bagaimana modal dan tenaga kerja didistribusikan adalah inti dari kapitalisme murni. Tetapi tanpa intervensi, kapitalisme murni akan menyebabkan ketidaksetaraan yang luar biasa dan perbedaan kekayaan yang signifikan antara buruh dan pemegang modal. Ini bertentangan dengan gagasan kapitalisme bahwa dia harus "membuat semua orang menjadi lebih baik". Meskipun ada lebih banyak kekayaan secara keseluruhan, sebagian besar kekayaan secara tidak proporsional dimiliki oleh kapitalis, atau pemegang modal. Keadilan ekonomi bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua anggota ekonomi untuk menghilangkan ketidaksetaraan yang berasal dari kapitalisme murni. Jika semua warga negara memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan untuk diri mereka sendiri, mereka akan membelanjakan lebih banyak uang, yang akan menghasilkan peningkatan ekonomi.

Referensi

- Adam, S. (2008). *The Wealth Of Nations*.
- Deliarnov. (2009). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi Revisi)*. PT. Grafindo Persada.
- Mankiw, N. G. (2008). *Principles of Microeconomics* (5th ed.). Cengage Learning.
- Rahmatullah., Inanna. & Nurdiana. (2019). *embelajaran Ekonomi dan Kearifan Lokal* (1st ed.). CV. Nur Lina.
- Ritonga, dkk. (2002). *Ekonomi*. Erlangga.
- Muh. Nurdin. (2008). *Mari Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Putra Nugraha.

Profil Penulis



Adi Lukman Hakim, S.E., M.M

Terlahir di Pontianak pada tanggal 5 Mei 1992, saya menjalani masa kecil hingga remaja di tanah kelahiran. Saya pindah ke Jawa untuk bersekolah di SMK Nurul Jadid Probolinggo, hingga tahun 2011. Saya tercatat sebagai alumni S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang (2015). Selang satu tahun, saya menempuh studi lanjut jenjang magister Manajemen di Universitas Negeri Malang dan lulus tahun 2018. Pada akhir 2024, saya sedang menempuh pendidikan program doktor di *Universiti Malaysia Kelantan* program studi *Human Resource Management*. Berkaitan dengan profesi, saya bergabung menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan sejak tahun 2019. Selanjutnya, pada 2021, saya menjabat sebagai sekretaris prodi S1 Manajemen hingga saat ini.

Sehubungan dengan disiplin ilmu yang dijalani, saya menekuni kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Beberapa karya tulisan saya dalam bentuk buku rampai adalah bab Komunikasi dalam Organisasi (dalam buku berjudul “Perilaku Organisasi Modern”) dan bab Manajemen SDM di Era Digital (dalam buku bertajuk “Manajemen Sumber Daya Strategis: Teori dan Praktik”).

Saya aktif melakukan kajian empiris melalui penelitian setiap tahunnya. Capaian penelitian saya diantaranya adalah pendanaan afirmasi kemendikbudristek tahun 2021, afirmasi kolaborasi tahun 2022, dan sejumlah pendanaan hibah kemendikbudristek lainnya. Untuk karya akademis lainnya dapat dipelajari secara komprehensif pada laman *google scholar*.

Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar

BAB 3

Oleh: Maria Suryaningsih

Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta

Ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat umum menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk memahami bagaimana proses alokasi sumber daya hari ini terjadi, sangat penting bagi kita untuk memahami konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan menggambarkan bagaimana konsumen memutuskan berapa banyak dan jenis barang atau jasa yang akan dibeli. Penawaran adalah bagaimana penjual menentukan jumlah dan jenis barang yang akan ditawarkan. Keseimbangan terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada satu harga stabil (Cooper, D. L., & Veseth, L. (1981).

Menurut teori ekonomi, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Penawaran, di sisi lain, mengacu pada jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada harga tertentu sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Misalnya, jika harga perangkat seluler turun tajam, permintaan akan meningkat karena pembeli akan lebih cenderung membeli perangkat dengan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika produsen perangkat seluler setuju

dengan harga, penawaran mobil akan berkurang karena konsumen mungkin memilih untuk mencari alternatif lain atau menunda pembelian hingga harga turun kembali.

Oleh karena itu, faktor-faktor seperti perubahan harga, preferensi konsumen, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat mempengaruhi stabilitas pasar. Produsen harus memahami dinamika pasar agar dapat menyesuaikan strategi harga dan pemasaran mereka secara efektif. Selain itu, konsumen harus memahami bagaimana kekuatan pasar dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Ekonomi dapat berfungsi dengan lancar dan efisien ketika ada pasar yang sehat, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Namun demikian, faktor eksternal seperti perubahan regulasi pemerintah dan kondisi politik juga dapat mempengaruhi pasar secara signifikan, yang tidak selalu dapat diprediksi oleh konsumen atau produsen. Oleh karena itu, memahami keseimbangan pasar mungkin tidak cukup untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis.

A. Pengertian Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar

Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan mengacu pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah permintaan sesuai dengan jumlah penawaran, yang menghasilkan harga yang stabil dan kondisi pasar yang sehat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, kerja sama dalam menerapkan kebijakan lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Misalnya, jika permintaan untuk kendaraan listrik meningkat karena kesadaran lingkungan yang semakin meningkat, produsen mobil akan

menyediakan lebih banyak kendaraan listrik dengan harga yang kompetitif. Keseimbangan pasar mencapai puncaknya ketika jumlah mobil listrik yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah mobil listrik yang ditawarkan oleh produsen, menciptakan harga yang stabil dan memungkinkan pertumbuhan industri mobil listrik yang berkelanjutan.

B. Analisis Keseimbangan Pasar, Penawaran, dan Permintaan

1. Keseimbangan Pasar

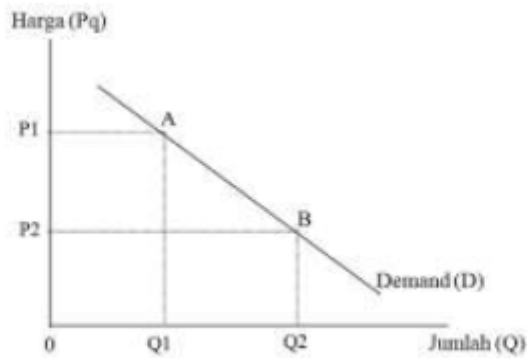
Keseimbangan pasar adalah untuk memahami bagaimana interaksi antara konsumen dan produsen dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Dengan memahami mekanisme pasar ini, pemerintah dan pelaku ekonomi lainnya dapat membuat keputusan yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Selain itu, analisis pasar dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai sektor ekonomi, memungkinkan pengembangan rencana strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, memahami cara kerja pasar sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang kuat dan inklusif. Misalnya, dengan analisis pasar yang baik, pemerintah dapat memahami permintaan tertinggi untuk produk organik dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Selain itu, pelaku ekonomi lainnya seperti petani juga dapat menggunakan informasi pasar untuk menyesuaikan produksi mereka agar sesuai dengan permintaan pasar dan meningkatkan pendapatan.

2. Permintaan Pasar

Selain itu, kebutuhan konsumen harus dipertimbangkan dalam pengembangan sektor pertanian. Dengan memahami preferensi konsumen dan tren pasar, pelaku ekonomi dapat memproduksi produk pertanian yang memenuhi permintaan pasar. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke produk pertanian yang berkualitas tinggi dan aman. Dengan demikian, sektor pertanian dapat secara efektif dan efisien memenuhi kebutuhan pasar

sambil memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat. Ini akan meningkatkan penjualan produk pertanian di pasar internasional dan membantu menaikkan harga petani. Dengan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pelaku ekonomi lainnya, sektor pertanian dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara.

Di sisi lain, di kota-kota yang lebih modern, konsumen mungkin menemukan diri mereka memiliki produk yang lebih praktis dan menarik. Karena ini, dengan memahami preferensi konsumen dan nilai di berbagai pasar, petani dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar lebih menarik dan sesuai dengan permintaan pasar, sehingga meningkatkan penjualan produk pertanian lokal secara signifikan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif kepada bisnis lokal untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk lokal guna memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat.



Gambar 3.1 Kurva Permintaan
Sumber: (Siregar et al., 2016)

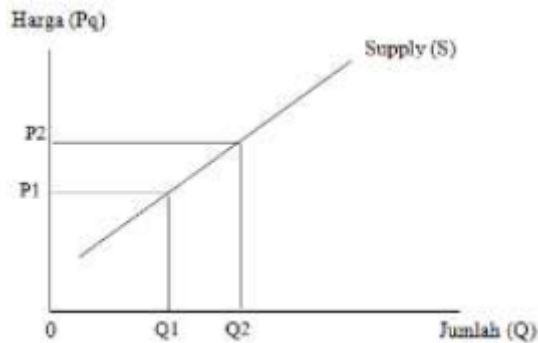
Gambar di atas menunjukkan kurva permintaan yang menggambarkan hubungan antara harga (P) dan kuantitas yang diminta (Q_d). Dalam kurva permintaan ini, ketika harga suatu barang meningkat, kuantitas yang diminta oleh konsumen menurun, dan sebaliknya, ketika harga menurun, kuantitas yang diminta meningkat. Kurva ini memiliki kemiringan negatif karena adanya hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta, sesuai dengan hukum permintaan.

3. Penawaran Pasar

Penawaran pasar akan timbul bilamana ada kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan, menawarkan barang dan jasa pada harga pasar yang disepakati dipasar. Harga pasar ditentukan oleh konsumen dan produsen. Penawaran yang dimaksud adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dijual oleh produsen pada Tingkat harga tertentu. Penawaran pasar dalam sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga barang, kondisi cuaca, biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan teknologi pertanian yang digunakan. Dalam dunia pertanian, faktor eksternal seperti musim, cuaca, dan tren pasar sangat menentukan kuantitas barang yang dapat diproduksi dan ditawarkan oleh petani atau produsen ke pasar. Keberhasilan dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan faktor-faktor ini sangat penting agar produksi pertanian dapat memenuhi permintaan pasar dan berkontribusi pada stabilitas harga serta kesejahteraan para pelaku sektor pertanian.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penawaran Pasar

Dalam industri pertanian, penawaran pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari sisi produksi, kebijakan pemerintah, serta kondisi alam. faktor cuaca dan kondisi alam seperti banjir, suhu ekstrim, atau serangan hama dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian. jika kondisi cuaca buruk atau terjadi bencana alam, produksi pertanian dapat menurun, yang akan mengurangi penawaran barang pertanian di pasar. Selain itu terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran pasar yaitu perubahan musiman, di beberapa komoditas pertanian memiliki musim tanam dan panen yang terbatas, sehingga penawaran produk sering kali bergantung pada waktu dalam setahun. Musim panen yang melimpah dapat meningkatkan penawaran, sedangkan diluar musim penawaran bisa berkurang. Berikut adalah kurva yang menunjukkan penawaran



Gambar 3.2 Kurva Penawaran
Sumber: (Siregar et al., 2016)

Gambar 2 di atas menunjukkan kurva penawaran yang ditandai oleh huruf S, sumbu vertical kurva penawaran menunjukkan harga suatu barang (P) adalah harga yang diterima penjual untuk jumlah penawaran yang sudah ada. Sedangkan, sumbu horizontal menunjukkan jumlah penawaran (Q). berdasarkan kurva penawaran pada gambar diatas menjelaskan bahwa pada Tingkat harga P_2 penjual akan menawarkan barang sebanyak Q_2 . Jika harga naik menjadi P_3 maka penjual akan semakin banyak menawarkan barang menjadi Q_3 , sebaliknya jika harga turun menjadi P_1 maka penjual biasanya mengurangi atau hanya bersedia menawarkan barang atau jasa sebanyak Q_1 .

Pengaruh Fungsi Permintaan, Penawaran, Terhadap Keseimbangan Pasar

1. Fungsi Permintaan

Fungsi permintaan tercipta karena adanya perilaku konsumen yang menghadapi pendapatan terbatas di satu sisi, dan sisi lain konsumen ingin mencapai kepuasan maksimal dengan cara mengonsumsi barang dan jasa sebanyak-banyaknya. Fungsi permintaan merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan berbagai factor yang mempengaruhinya.

Fungsi ini menunjukkan keterkaitan antara variable jumlah permintaan dengan variable-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan merupakan persamaan yang menghubungkan antara jumlah barang dan jasa yang dibeli dalam waktu tertentu dengan factor-faktor yang mempengaruhinya, dan secara sistematis dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$D_x = f(P_x, P_c, P_s, Y, T, E, N)$$

Keterangan:

D_x = fungsi permintaan barang x

P_x = harga barang x

P_c = harga barang komplemen

P_s = harga barang substitusi

Y = pendapatan Masyarakat

T = selera

E = ekspektasi terhadap masa depan

N = jumlah penduduk

2. Fungsi Penawaran

Perubahan penawaran pasar juga ditentukan oleh harga barang itu sendiri harga barang lain, ongkos produksi, tujuan perusahaan, dan Tingkat teknologi. Fungsi umum kurva penawaran dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Q_s = f(Q_{sx}, P_x, Q_{sl}, P_1, C, T_x, R)$$

Di mana:

Q_{sx} = jumlah barang x yang ditawarkan

Q_{sl} = jumlah barang lain yang ditawarkan

P_x = harga barang x

P_1 = harga barang lain

C = jumlah biaya faktor produksi

T_x = tingkat pajak yang dikenakan pemerintah

T = tingkat teknologi yang dipergunakan

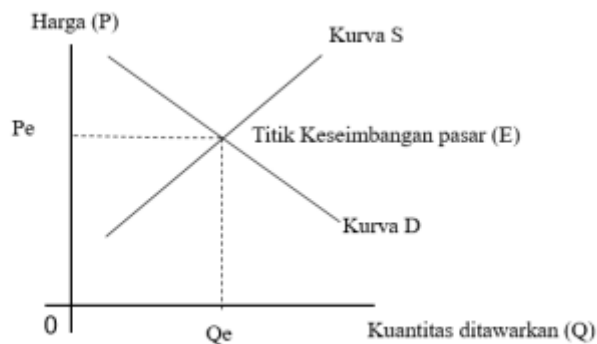
3. Keseimbangan Pasar

Keseimbangan pasar akan terjadi bilamana permintaan dan penawaran membentuk harga rill dan jumlah barang yang sama.

Pada kondisi keseimbangan pasar seluruh perusahaan akan cenderung menjaga harga jual riil di pasar, atau menghalangi perubahan naik turun permintaan dan penawaran pasar. Permintaan pasar dikendalikan oleh kepuasan konsumen, akibat mengonsumsi sejumlah barang.

Perubahan permintaan disebabkan oleh perusahaan pembelian barang yang lebih banyak atau lebih sedikit, oleh orang-orang pada harga yang sama. Perubahan pada permintaan disebabkan oleh perubahan faktor pedekatan, kekayaan, perubahan populasi, perubahan selera, perubahan ekspektasi harga pada masa yang akan datang, perubahan harga barang lainnya. Faktor yang menyebabkan perubahan kuantitas permintaan adalah kekayaan dan populasi. Kedua faktor ini, yang akan menimbulkan perubahan kuantitas barang yang dibeli, sehingga menyebabkan kenaikan permintaan pasar.

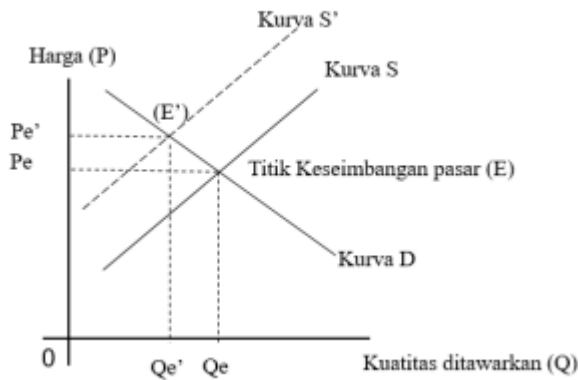
Kekuatan permintaan dan penawaran dalam fungsi keseimbangan dapat digambarkan dalam bentuk kurva keseimbangan pasar dibawah ini



Gambar 3.3 Keseimbangan Pasar
Sumber: (Ummah, 2019)

Gambar 3.3 menunjukkan kurva keseimbangan pasar, Dimana terbentuk kekuatan permintaan dan penawaran pada harga P_e dan kuantitas yang ditawarkan dan diminta (Q_e) dengan nilai yang sama

($S=D$) kecenderungan perubahan permintaan dan penawaran pasar dipicu oleh perubahan harga pasar. Perubahan kenaikan harga pasar, umumnya disebabkan oleh inflasi karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan jasa. Bilamana terjadi kenaikan harga, maka titik keseimbangan akan bergeser ke keiri atas. Bentuk kurva keseimbangan pasar juga akan mengalami perubahan, sehingga kurva akan berbentuk seperti pada Gambar berikut ini.



Gambar 3.4 Pergeseran Kurva Keseimbangan Pasar

Sumber: (Ummah, 2019).

Gambar 3.4 menunjukkan pergeseran kurva keseimbangan pasar didorong oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (inflasi). Akibat inflasi tersebut, maka penawaran pasar akan menyesuaikan harga pada kenaikan harga yang baru. Begitu pula pada permintaan pasar, maka konsumen dapat membeli barang pada harga Pe' dan kuantitas barang yang dapat dibeli sebesar Qe' . Perubahan harga yang dibayarkan konsumen sebesar selisih $Pe'-Pe$ (ΔP) dan perubahan kuantitas yang diterima sebesar $Qe'-Qe$ (ΔQ). Dampak kenaikan harga-harga barang dapat menimbulkan perubahan pada sisi permintaan semakin menurun, sedangkan sisi penawaran akan bergeser ke kiri dan menetapkan harga jual sesuai harga terbaru.

Hukum Permintaan dan Penawaran

Hukum permintaan dan penawaran berlaku Ketika dalam keadaan *ceteris paribus*, yaitu saat Masyarakat dalam keadaan tidak berubah. Adapun factor-faktor dari *ceteris paribus* adalah pendapatan harus tetap, selera Masyarakat tidak berubah, harga barang lain tetap, barang pengganti tidak ada. Dan pengharapan akan masa depan tidak berubah.

1. Hukum Permintaan

Hukum permintaan terjadi jika harga dari barang atau jasa (produk x) yang di beli konsumen mengalami kenaikan harga, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut menurun. Sebaliknya, bila harga dari barang dan jasa yang akan dibeli oleh konsumen turun, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut meningkat.

2. Hukum Penawaran

Hukum penawaran berbunyi jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, sebaliknya jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun.

Elastis Permintaan dan Penawaran

1. Elastis Permintaan

Elastis permintaan adalah sebuah pengukuran yang berbentuk kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan arti permintaan ketika harga naik maka jumlah permintaan akan barang mengalami penurunan. Sebaliknya Ketika harga turun maka jumlah permintaan akan meningkat. Berikut adalah tabel elastisitas permintaan:

Tabel 3.1 Elastis Permintaan

Koefisien	Elastisitas
$n = 0$	Inelastis Sempurna
$0 < n < 1$	Inelastis
$n = 1$	Elastis uniter
$1 < n < \infty$	Elastis
$n = \infty$	Elastis Sempurna

Sumber : (Venny & Asriati, 2022)

Permintaan inelastis sempurna, terjadi pada saat adanya perubahan harga tetapi sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah yang diminta, dalam kasus ini konsumen saat membeli barang tidak lagi melihat harganya. Contohnya permintaan obat atau beras, maka konsumen akan mempertimbangkan yang sangat dibutuhkan saat ini, bukan dari segi harganya.

Permintaan inelastis, terjadi jika adanya perubahan variable permintaan sebanyak 25 maka perubahan jumlah barang akan mengalami pengurangan kurang dari 25. Misalnya jika harga besar naik, konsumen akan tetap membelinya karena beras merupakan makanan pokok meskipun harga beras mengalami kenaikan, tetapi berhemat-hemar, saat harga beras turun maka permintaan dari beras tidak mengalami permintaan yang tinggi karena beras memiliki keterbatasan (rasa kenyang).

Permintaan elastis uniter, terjadi saat perubahan pada variable permintaan yang berbanding lurus dengan perubahan jumlah permintaan. Maka jika terdapat perubahan harga maka akan sebanding dengan barang yang diterima. Misalnya, saat harga handphone naik diluar jangkauan Masyarakat, tetapi dikarenakan konsumen rata-rata menganggap bawa handphone menjadi kebutuhan pokok untuk saat ini, maka konsumen akan tetap membelinya.

Permintaan elastis, terjadi jika variabel permintaan elastis misalnya 2% maka akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang akan melebihi 2%. Dengan kata lain Tingkat perubahan jumlah yang diminta akan lebih besar dari perubahan harga. Misalnya, saat barang mewah seperti emas, motor, dan mobil mengalami penurunan harga maka ramai dibeli oleh konsumen, namun Ketika harga barang tersebut naik maka konsumen tidak akan mencari penggantinya.

Permintaan elastis sempurna, terjadi jika variable permintaan yang tidak diakibatkan oleh perubahan jumlah barang yang diminta, elastis sempurna yang terjadi adalah Ketika harga tetap namun permintaan akan barang tersebut dapat naik turun. Misalnya, bumbu dapur turun naik, permintaan akan bertambah Ketika menjelang hari raya, karena akan memasak makanan yang banyak,

2. Elastis Penawaran

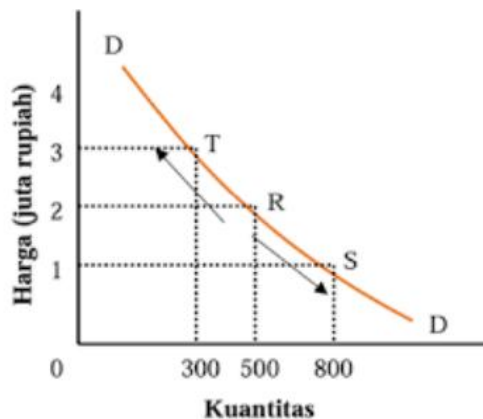
Elastis penawaran yaitu perbandingan antara perubahan jumlah barang yang akan ditawarkan terhadap perubahan harga, didalam elastisitas penawaram yang merupakan faktor utamanya adalah dari faktor harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran dibagi dalam lima golongan elastisitas yaitu:

- a) Elastisitas sempurna, terjadi jika produsen atau penjual bersedia menjual semua barangnya pada harga tertentu, maka kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu datar.
- b) Elastis, terjadi jika perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran.
- c) Elastis uniter, terjadi jika kurva penawaran dimulai dari titik 0.
- d) Tidak elastis, terjadi jika perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran.
- e) Tidak elastis sempurna, terjadi jika produsen atau penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya meskipun harga akan bertambah tinggi, perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap suatu penawaran.

Pergerakan dan Pergeseran Kurva Permintaan

1. Pergerakan Kurva Permintaan

Pergerakan dalam kurva permintaan terjadi pada saat harga barang tersebut berubah, sehingga menyebabkan jumlah barang yang diminta berubah, ceteris paribus. Adapun ceteris paribus diartikan sebagai faktor lain yang memengaruhi dianggap tetap. Pergerakan kurva permintaan digambarkan berikut ini.



Gambar 3.5 Pergerakan Kurva Permintaan

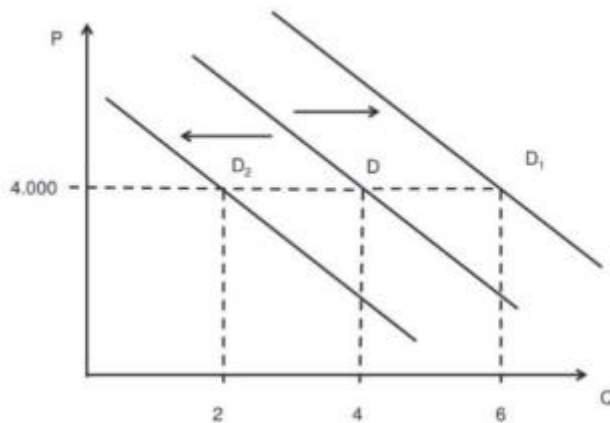
Sumber: www.kibrispdr.org

Berdasarkan **Gambar 5.** (sebagai contoh), pergerakan dari titik R ke S terjadi karena harga barang turun dari 2 juta rupiah menjadi 1 juta rupiah, sehingga jumlah barang yang diminta meningkat dari 500unit ke 800unit, ceteris paribus. Sebaliknya, pergerakan dari titik R ke titik T terjadi karena harga naik dari 2 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah, maka jumlah barang yang diminta menurun dari 500unit ke 300unit, ceteris paribus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang membuat kurva permintaan bergerak dari satu titik ke titik yang lain pada kurva yang sama adalah perubahan harga barang itu sendiri.

2. Pergeseran Kurva Permintaan

Pergeseran kurva permintaan terjadi pada saat faktor faktor yang memengaruhi permintaan, selain harga barang itu sendiri,

mengalami perubahan (naik atau turun). Oleh sebab itu, perubahan pada harga barang lain (barang substitusi maupun komplemen), pendapatan, selera, ekspektasi pada masa depan, dan jumlah penduduk menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan digambarkan berikut ini.



Gambar 3.6 Pergeseran Kurva Permintaan

Sumber: Jpesron & M. Fathorrozi (2003)

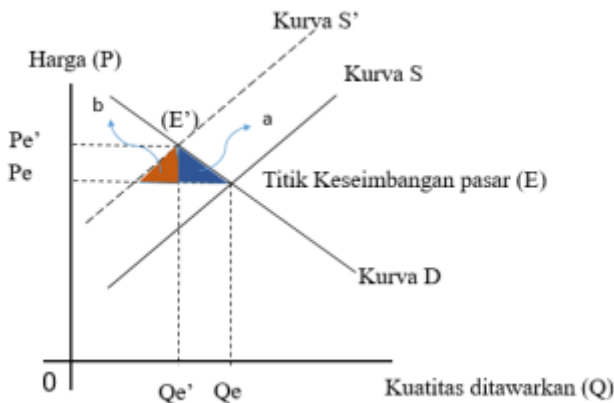
Perubahan faktor harga barang komplemen. Pada **Gambar 6** tersebut, bila harga barang komplemen dari barang tersebut meningkat, maka kurva permintaan barang tersebut akan bergeser ke kiri dari kurva D ke kurva D₂. Sebaliknya, bila harga barang komplemen dari barang tersebut menurun, maka kurva permintaan barang tersebut bergeser ke kanan dari kurva D ke kurva D₁.

Perubahan faktor harga barang substitusi. Pada gambar tersebut, bila harga barang substitusi dari barang tersebut meningkat, maka kurva permintaan barang tersebut akan bergeser ke kanan dari kurva D ke kurva D₁. Sebaliknya, bila harga barang substitusi dari barang tersebut menurun, maka kurva permintaan barang tersebut bergeser ke kiri dari kurva D ke kurva D₂.

Pergeseran Kurva Keseimbangan dan Kenaikan Harga Pasar

Perubahan kenaikan harga pasar akibat inflasi berpengaruh kepada permintaan dan penawaran pasar. Harga yang dibayarkan oleh konsumen sebesar selisih $Pe' - Pe$ (ΔP) dan perubahan kuantitas yang diterima sebesar $Qe' - Qe$ (ΔQ). Nilai riil yang diperoleh seorang konsumen pada saat inflasi sebesar luas segitiga a (segitiga biru). Segitiga a merupakan nilai kepuasan yang diperoleh/diterima oleh seorang konsumen. Nilai riil yang ditawarkan oleh produsen menyesuaikan dengan harga baru (kenaikan harga sebesar $Pe' - Pe$ (ΔP)). Peluang profit atau keuntungan yang diperoleh seorang produsen sebesar luas segitiga b (segitiga warna coklat).

Dampak kenaikan harga-harga barang dapat menimbulkan perubahan pada sisi permintaan semakin menurun, sedangkan pada sisi penawaran terdapat kecenderungan bagi produsen memperoleh peningkatan profit. (Mankiw & Reis, 2018) menyebutkan bahwa profit yang akan diperoleh produsen, bilamana total penjualan atau penghasilan lebih besar daripada total biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi. Bentuk kurva keseimbangan pasar dapat dilukiskan pada Gambar berikut ini.



Gambar 3.7 Kurva keseimbangan Pasar Akibat Kenaikan Harga

Sumber : (Ummah, 2019)

Gambar 3.7 menunjukkan kurva keseimbangan pasar akibat kenaikan harga umumnya dipicu oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (inflasi). Kenaikan harga tersebut, mendorong perubahan kepuasan yang diterima oleh konsumen dan produsen. Besaran kepuasan konsumen akibat perubahan kenaikan harga sebesar “segitiga a”, sedangkan kepuasan peluang keuntungan (profit) yang diterima oleh seorang produsen sebesar “segitiga b”. Dampak perubahan kenaikan harga, maka akan terjadi “value transferable” sebesar a dan b. Sisi permintaan terjadi seorang konsumen mengorbankan pendapatannya untuk memperoleh barang yang akan dikonsumsi, agar memperoleh kepuasan.

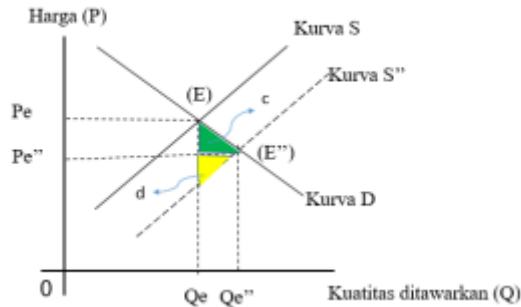
(*Essays in Positive Economics* (1953), n.d.) menyebutkan bahwa keputusan seorang produsen akan menjual barang pada harga baru untuk mendapatkan kepuasan profit. Kepuasan konsumsi seorang konsumen akan sama dengan kepuasan profit seorang produsen pada kurva keseimbangan yang baru. Value transferable merupakan perubahan atau perpindahan nilai kepuasan dari konsumen ke produsen atau sebaliknya, sehingga konsep perpindahan nilai ini akan mewujudkan nilai kesejahteraan parsial. (Ummah, 2019)

Pergeseran Kurva Keseimbangan dan Penurunan Harga Pasar

Penawaran dan permintaan pasar akan menentukan titik keseimbangan pasar. Permintaan dikendalikan oleh besaran pendapatan individu untuk konsumsi, sedangkan penawaran pasar dikendalikan oleh biaya produksi. Seorang produsen selalu berusaha mencari hasil yang maksimal dan keuntungan yang maksimal. Seorang produsen untuk meningkatkan kuantitas produksi juga mempertimbangkan biaya produksi. Kuantitas produksi dalam jumlah besar dapat wujudkan bilamana biaya produksi yang dikeluarkan besar seperti penggunaan teknologi.

Biaya produksi yang besar berupa biaya mesin modern, akan dapat menggantikan biaya tenaga kerja, sehingga biaya produksi perunit akan menurun. Dengan demikian, seorang produsen mampu memproduksi dalam jumlah besar jika menggunakan teknologi, sedangkan teknologi berdampak pergantian penggunaan tenaga kerja

semakin berkurang. Kondisi perubahan biaya produksi akibat transfer teknologi pada keseimbangan pasar, dapat menggeser kurva keseimbangan ke kanan bawah. Bentuk kurva keseimbangan yang baru dapat ditunjukkan pada Gambar berikut ini.



Gambar 3.8 Pergeseran Kurva keseimbangan Akibat Penggunaan Teknologi

Sumber : (Ummah, 2019)

Gambar 3.8 menunjukkan pergeseran kurva keseimbangan pasar akibat peningkatan biaya produksi yang dikeluarkan oleh seorang produsen terutama penggunaan teknologi. (Risksedas, 2018) menyatakan bahwa penggunaan teknologi, akan mampu meningkatkan volume produksi dan mengurangi jumlah sumber daya yang tidak efisien. Kuantitas atau kapasitas besar hanya dapat dihasilkan bilamana menggunakan teknologi dalam memproduksi. Penggunaan teknologi dalam produksi, hanya mampu dikendalikan oleh tenaga kerja terampil, sehingga jumlah tenaga kerja yang kurang efisien semakin berkurang. Dampak pengurangan biaya produksi per unit akibat pengurangan jumlah tenaga kerja kurang efisien, pada akhirnya akan menggeser kurva keseimbangan ke kanan-bawah.

Begitu pula pada permintaan pasar, maka konsumen dapat membeli barang pada harga $P_{e''}$ dan kuantitas barang yang dapat dibeli sebesar $Q_{e''}$. Perubahan harga yang dibayarkan konsumen sebesar selisih $P_{e''} - P_e$ (ΔP), dan perubahan kuantitas yang diterima sebesar $Q_{e''} - Q_e$ (ΔQ). Pada sisi penawaran harga yang ditawarkan pada harga $P_{e''}$ dan jumlah yang ditawarkan pada $Q_{e''}$, sehingga selisih harga sebesar $P_{e''} - P_e$ (ΔP)

dan selisih kuantitas sebesar $Q_e'' - Q_e(\Delta Q)$ akan dapat menciptakan potensi keuntungan pada posisi keseimbangan baru.

Kondisi seorang produsen pada keseimbangan baru seperti pada Gambar 8 menurunkan harga jual di pasar, agar barang dijual di pasar dapat bersaing dan mencapai keuntungan sesuai target produksi. Sisi permintaan akan terjadi seorang konsumen akan membeli barang pada harga pasar lebih rendah, sehingga kuantitas yang dapat dibeli lebih banyak.

Contoh Soal dan Pembahasan Mengenai Fungsi Permintaan, Penawaran, dan Keseimbangan Pasar

Sebuah toko elektronik menjual televisi dengan harga yang dipengaruhi oleh jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Fungsi permintaan dan penawaran untuk televisi di pasar tersebut diberikan sebagai berikut:

- a) Fungsi permintaan (Q_d) = $Q_d = 500 - 2p$
Dimana Q_d adalah jumlah televisi yang diminta (dalam satuan unit) dan P adalah harga televisi dalam satuan rupiah
- b) Fungsi penawaran (Q_s) = $Q_s = 3p - 100$
Dimana Q_d adalah jumlah televisi yang ditawarkan (dalam satuan unit) dan P adalah harga televusu dalam satuan rupiah

Tentukan:

- 1) Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan televisi di pasar
- 2) Jika harga televisi dipasar adalah Rp. 300.000,- tentukan apakah pasar berada dalam keadaan kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran?

Jawaban

- 1. Menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar
Untuk menemukan harga keseimbangan, kita harus mencari harga Dimana jumlah permintaan (Q_d) sama dengan jumlah penawaran (Q_s).

$$\begin{aligned}
 Q_d &= Q_s \\
 &= 500 - 2P = 3P - 100 \\
 &= 500 + 100 = 3P + 2P \\
 &= 600 = 5P \\
 P &= 600/5 \\
 P &= 120
 \end{aligned}$$

Jadi harga keseimbangan adalah Rp. 120.000

$$\begin{aligned}
 Q_d &= 500 - 2P \\
 Q_d &= 500 - 2(120) \\
 Q_d &= 500 - 240 \\
 Q_d &= 260
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah keseimbangan pasarnya adalah 260 unit

2. Menganalisis pasar dengan harga Rp. 300.000

Jumlah permintaan Q_d pada $P = 300.000$

$$\begin{aligned}
 Q_d &= 500 - 2P \\
 Q_d &= 500 - 2(300) \\
 Q_d &= 500 - 600 \\
 Q_d &= -100
 \end{aligned}$$

Hasil negatif ini tidak mungkin terjadi dalam kenyataan, karena tidak ada yang mau membeli televisi pada harga tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada harga Rp 300.000, jumlah permintaan adalah 0 unit, atau tidak ada permintaan

Jumlah penawaran Q_s pada $P = 300.000$

$$\begin{aligned}
 Q_s &= 3P - 100 \\
 Q_s &= 3(300) - 100 \\
 Q_s &= 900 - 100 \\
 Q_s &= 800
 \end{aligned}$$

Jadi pada harga Rp. 300.000 jumlah penawaran adalah 800 unit

Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta (permintaan) sama dengan jumlah barang yang ditawarkan (penawaran) pada harga tertentu. Pada titik ini, tidak ada kecenderungan untuk perubahan harga atau jumlah barang yang diperdagangkan. Interaksi antara konsumen dan produsen menentukan

harga pasar dan jumlah barang yang diproduksi dan diperdagangkan. Pemerintah dan pelaku ekonomi dapat menggunakan analisis keseimbangan pasar untuk merencanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keseimbangan pasar membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian. Dengan pemahaman yang tepat tentang mekanisme pasar, sektor pertanian dapat berkembang dengan lebih baik, memenuhi permintaan pasar, dan meningkatkan pendapatan petani.

Permintaan pasar adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta: ketika harga naik, jumlah yang diminta cenderung turun, dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain pendapatan masyarakat, harga barang pengganti (substitusi) dan pelengkap, selera, ekspektasi konsumen terhadap masa depan, serta jumlah penduduk.

Semua faktor ini mempengaruhi preferensi konsumen dan dapat mengubah pola permintaan di pasar. Di sektor pertanian, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti preferensi konsumen terhadap produk lokal atau organik dapat membantu petani dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi produk lokal, sekaligus mengoptimalkan penjualan internasional.

Penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang dapat diproduksi dan ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang, biaya produksi, teknologi yang digunakan dalam produksi, dan kondisi cuaca atau bencana alam yang dapat mempengaruhi hasil pertanian. Di sektor pertanian, penawaran sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, seperti musim tanam dan panen yang terbatas. Ketika hasil panen melimpah, penawaran meningkat, sedangkan di luar musim, penawaran cenderung berkurang. Pemerintah dan petani perlu memahami faktor-faktor ini untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku

ekonomi. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti harga barang, harga barang pengganti dan pelengkap, pendapatan konsumen, dan ekspektasi pasar. Fungsi ini biasanya berbentuk persamaan matematis, yang menunjukkan bagaimana perubahan pada harga atau faktor lainnya mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Penawaran pasar sering kali dipengaruhi oleh biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan faktor eksternal seperti cuaca atau musim. Perubahan dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran akan mempengaruhi keseimbangan pasar.

Jika permintaan meningkat atau penawaran menurun, harga akan cenderung naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun atau penawaran meningkat, harga akan cenderung turun. Pergerakan Kurva Permintaan terjadi ketika perubahan harga barang itu sendiri menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta, dengan faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*). Misalnya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat, dan jika harga barang naik, jumlah yang diminta akan menurun. Pergeseran Kurva Permintaan terjadi ketika faktor lain selain harga (seperti pendapatan konsumen, selera, harga barang pengganti atau pelengkap, dan ekspektasi masa depan) berubah. Pergeseran ini dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang diminta pada setiap tingkat harga. Kenaikan harga dapat mengarah pada kenaikan profit bagi produsen, karena mereka dapat menjual barang pada harga yang lebih tinggi, meskipun permintaan mungkin menurun. Sebaliknya, pada sisi permintaan, konsumen mungkin mengurangi pembelian mereka karena harga yang lebih tinggi, yang menyebabkan kepuasan atau kesejahteraan konsumen menurun. Penurunan harga pada barang dapat menyebabkan peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan dapat mengurangi keuntungan produsen jika harga jual tidak mencakup biaya produksi yang cukup.

Referensi

- Cooper, D. L., & Veseth, L. (1981). A b initio calculation of higher order corrections to Λ doubling and spin splitting in diatomic molecules. *The Journal of Chemical Physics*, 74(7), 3961–3964.
- (2018). *The Economics of Property Rights and Human Rights Author (s) : Michael Veseth Source : The American Journal of Economics and Sociology , Vol . 41 , No . 2 (Apr . , 1982) , pp . Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/3486192>*. 41(2), 169–181.
- Essays in Positive Economics (1953)*. (n.d.).
- Mankiw, N. G., & Reis, R. (2018). *Journal of Economic Perspectives*, 32(1), 81–96. *Journal of Economic Perspectives*, 32(1), 81–96.
- Riskesdas. (2018). *Nisak, F., Pratiwi, Y. I., & Gunawan, B. (2019). Pemanfaatan biomas sampah organik. Uwais Inspirasi Indonesia*. (p. 173).
- Siregar, T. M., Naibaho, E., Ginting, S., Gilbert, S., Sormin, L., & Siregar, B. S. (2016). *Pengaruh Fungsi Permintaan Dan Penawaran Terhadap Keseimbangan Pasar*. 8, 222–232.
- Ummah, M. S. (2019). *Buku Pengantar Ilmu Ekonomi*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Venny, S., & Asriati, N. (2022). *Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 7(1), 184–194. <https://doi.org/10.31932/jpe.v7i1.1583>
- www.kibrispdr.org

Profil Penulis



Maria Suryaningsih.,SE., M. Ak.,

Lahir di Jakarta 14 Mei 1983. Riwayat Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta tahun 2011 dan menyelesaikan studi S2 Magister Akuntansi di STIE Y.A.I tahun 2015. Riwayat Pekerjaan pernah bekerja di Perusahaan swasta di bidang telekomunikasi bagian *Customer Service*

selama 10 tahun, sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta mulai tahun 2014, mata kuliah yang diampu adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dan akuntansi keuangan menengah . Penulis sudah memiliki sertifikasi pendidik dari tahun 2018, penulis juga memiliki beberapa karya ilmiah berupa jurnal baik internal, nasional dan internasional dan sudah membuat buku berjudul “Sistem Akuntansi” (2021) dan pernah mengikuti beberapa pelatihan dalam menunjang profesionalitas seorang dosen. Penulis dapat dihubungi melalui email: mariasuryaningsih1405@gmail.com

Teori Perilaku Konsumen

BAB 4

Oleh: Ani Silvia

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Setiap individu dihadapkan pada keputusan konsumsi setiap hari. Dalam situasi di mana sumber daya terbatas, seperti pendapatan atau waktu, konsumen harus membuat pilihan mengenai barang dan jasa apa yang akan mereka beli untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Misalnya, seseorang mungkin harus memilih antara membeli kebutuhan sehari-hari atau barang mewah yang diinginkan. Pilihan-pilihan tersebut mencerminkan preferensi konsumen dan menjadi subjek penting dalam studi ekonomi.

Dalam perekonomian, konsumen berperan sebagai penentu utama permintaan di pasar. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen baik itu keputusan untuk membeli, menunda, atau bahkan tidak membeli suatu barang atau jasa akan berdampak langsung pada dinamika pasar dan perekonomian secara keseluruhan karena mempengaruhi harga barang dan keputusan produksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, memahami perilaku konsumen adalah kunci untuk memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat dioptimalkan.

Teori perilaku konsumen merupakan salah satu landasan penting dalam ilmu ekonomi yang berupaya menjelaskan dan memprediksi bagaimana konsumen menentukan pilihan mereka di antara berbagai alternatif produk atau jasa yang tersedia. Keputusan konsumen ini

dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari preferensi pribadi, pendapatan, harga barang, hingga kondisi eksternal seperti tren sosial dan teknologi.

Dalam bab ini, kita akan mempelajari konsep dasar dari teori perilaku konsumen, termasuk preferensi konsumen dan bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan mereka, batasan anggaran, kombinasi optimal atau keseimbangan konsumen, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.

A. Preferensi Konsumen (*Consumer Preferences*)

Preferensi konsumen adalah salah satu konsep fundamental dalam teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat pilihan di antara berbagai kombinasi barang dan jasa. Sebagai contoh, seorang konsumen mungkin harus memutuskan apakah akan membeli kombinasi 15 ice cream dan 10 kue dalam satu bulan atau kombinasi lainnya 25 ice cream dan 15 kue. Kombinasi dari barang atau jasa yang dapat dipilih oleh konsumen untuk dikonsumsi disebut dengan keranjang pasar atau *bundle of goods*. Setiap individu memiliki selera dan keinginan yang berbeda-beda, sehingga dalam memilih barang atau jasa, mereka akan mempertimbangkan pilihan mana yang akan memberikan kepuasan paling besar, dengan asumsi mereka bertindak secara rasional. Dalam ilmu ekonomi, kepuasan konsumen disebut dengan utilitas.

Menurut Perloff (2012), konsep preferensi konsumen dalam menyusun prioritas agar dapat mengambil keputusan, didasarkan pada tiga asumsi penting, yaitu:

a) Keterbandingan (*completeness*)

Pada asumsi ini, konsumen dapat membandingkan setiap pasangan barang dan menentukan mana yang lebih disukai (*prefer*) atau keduanya sama-sama disukai (*indifference*). Misalnya, jika ada dua pilihan barang A dan B, maka konsumen bisa lebih memilih barang A yang lebih disukai dari pada barang B ($A > B$). Konsumen bisa jadi menyukai keduanya ($A = B$). Dengan sikap memilih ini, perilaku konsumen lebih mudah untuk dianalisis.

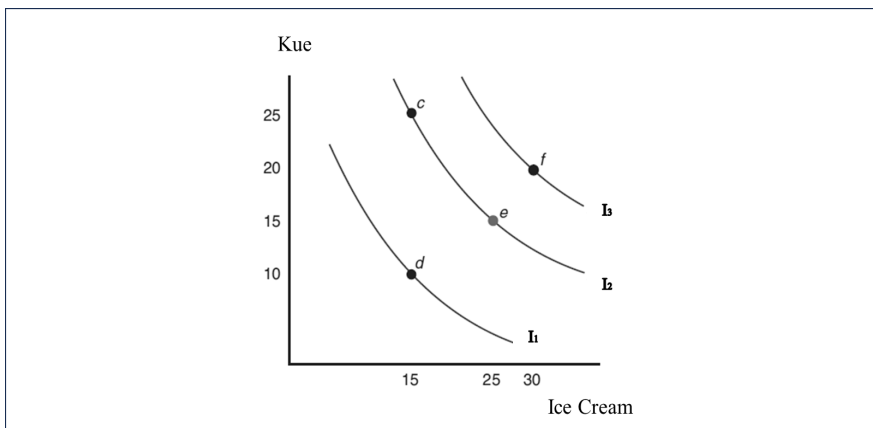
b) Konsistensi (*transitivity*)

Asumsi ini menyatakan bahwa jika seorang konsumen lebih menyukai barang A daripada barang B ($A > B$), dan lebih menyukai barang B daripada barang C ($B > C$), maka secara logis konsumen tersebut juga akan lebih menyukai barang A daripada barang C ($A > C$).

c) Semakin banyak semakin baik (*more is better*)

Asumsi ini menyatakan bahwa konsumen akan memilih untuk mendapatkan lebih banyak barang dibandingkan lebih sedikit karena mendapatkan lebih banyak barang dan jasa akan memberikan kepuasan yang lebih besar. Asumsi ini dipertimbangkan karena biasanya berlaku untuk kebanyakan orang.

Preferensi konsumen dapat mudah dipahami dengan menggunakan kurva *indifference*. Dalam bahasa Inggris, makna dari kata “*indifference*” adalah “ketidakpedulian” atau “ketidakberpihakan”. Kurva ini menggambarkan berbagai kombinasi dua barang (*bundle of goods*) yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama kepada konsumen sehingga konsumen bersikap acuh tak acuh terhadap kombinasi yang dipilihnya.



Gambar 4.1 Keranjang Kombinasi Ice Cream dan Kue Per Bulan yang Dikonsumsi

Gambar 4.1 menunjukkan kombinasi konsumen mengonsumsi ice cream dan kue dalam satu bulan. I_1 , I_2 , dan I_3 masing-masing adalah

kurva *indifference* yang memberikan tingkat utilitas yang berbeda. Kombinasi pada kurva I_3 juga lebih disukai dari I_2 dan kombinasi I_2 lebih disukai dari pada I_1 karena asumsi *more is better* ($I_3 > I_2 > I_1$). Kombinasi pilihan c dan e pada kurva I_2 memberikan tingkat utilitas yang sama sehingga konsumen bisa memilih salah satu kombinasi antara keduanya karena sama-sama disukai ($c = e$). Kombinasi e yang lebih banyak pada kurva I_2 memberikan utilitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kombinasi d pada kurva I_1 ($e > d$).

Untuk memahami bagaimana kurva *indifference* bekerja, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tingkat kepuasan akan semakin tinggi apabila kurva *indifference* semakin jauh dari titik kombinasi (0,0) atau titik origin.

Pada Gambar 4.1, I_3 memberikan kepuasan yang lebih tinggi karena memiliki kombinasi ice cream dan kue yang lebih banyak. Perlu diingat, kurva *indifference* hanya menunjukkan kombinasi mana yang lebih disukai, bukan berapa kali lipat utilitas yang diperoleh dari memilih kombinasi yang disukai. Karena hanya untuk keperluan membandingkan utilitas tanpa mengukurnya, maka kurva ini digunakan untuk menjelaskan teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal atau disebut utilitas ordinal. Dalam pendekatan ini, utilitas tidak diukur secara kuantitatif, melainkan diurutkan berdasarkan tingkat preferensi konsumen terhadap suatu barang atau jasa.

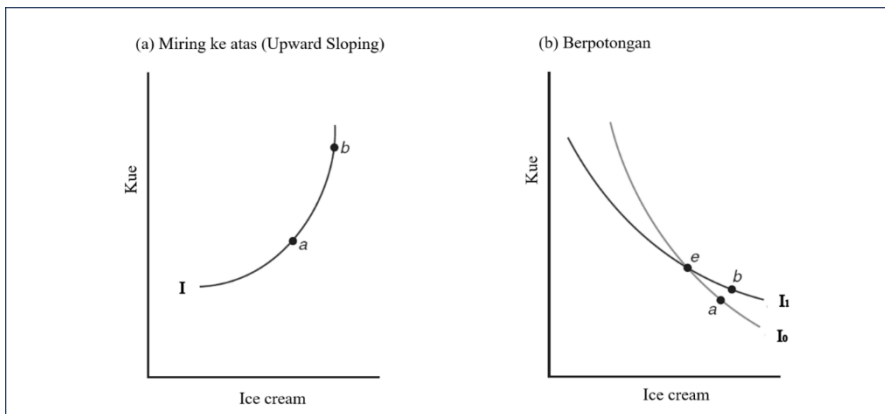
2. Kurva *indifference* memiliki kemiringan ke bawah (*downward sloping*).

Jika kurva miring ke atas (*upward sloping*) seperti pada Gambar 4.2 bagian (a) maka terjadi pelanggaran asumsi preferensi konsumen bahwa *more is better*. Kombinasi b memberikan kombinasi ice cream dan kue yang lebih banyak dari kombinasi a padahal berada pada kurva *indifference* yang sama dan memberikan utilitas yang sama. Downward sloping juga menunjukkan adanya kelangkaan karena menambah satu barang harus mengorbankan pengurangan barang lainnya. Artinya, berapa banyak barang yang harus dikorbankan

untuk menambah 1 unit barang lain namun tetap menjaga tingkat utilitas yang sama.

3. Kurva *indifference* tidak saling berpotongan.

Jika dua kurva indifference berpotongan maka akan melanggar asumsi *transitivity*. Sebagai contoh pada Gambar 4.2 bagian (b), I_0 dan I_1 saling berpotongan pada kombinasi e. Kombinasi e memberikan kepuasan yang sama dengan kombinasi a ($e = a$) pada I_0 dan kombinasi b ($e = b$) pada I_1 . Namun jika dilihat pada asumsi *more is better*, kombinasi b lebih disukai dari a ($b > a$). Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi preferensi konsumen sehingga tidak mungkin terjadi.



Gambar 4.2 Pelanggaran Asumsi Pada Kurva *Indifference*

B. Utilitas

Preferensi konsumen sangat berkaitan erat dengan teori utilitas yang menjelaskan perilaku konsumen dalam memilih barang dan jasa dengan tujuan memaksimalkan kepuasan. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, utilitas adalah ukuran kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang dan jasa. Utilitas konsumen dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Utilitas Ordinal

Tingkat preferensi konsumen dalam pendekatan ordinal tidak diukur secara kuantitatif, melainkan diurutkan berdasarkan preferensi terhadap suatu barang atau jasa. Konsumen hanya perlu

menentukan urutan preferensi tanpa memberikan nilai angka pada tingkat kepuasan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, preferensi konsumen dalam teori utilitas ordinal dijelaskan melalui kurva *indifference*.

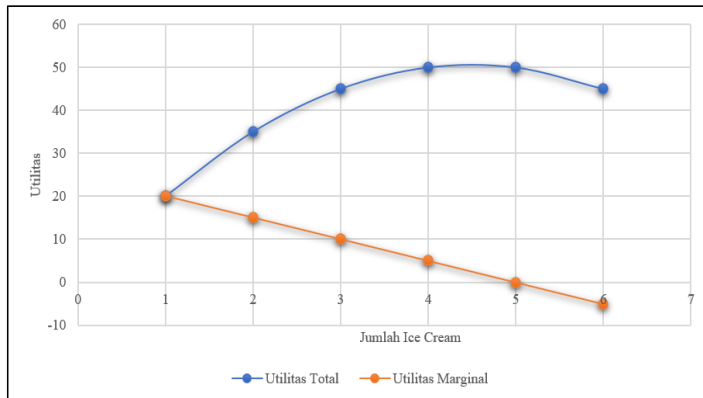
b) Utilitas Kardinal

Utilitas ini mengasumsikan bahwa utilitas bisa diukur secara numerik dan konsumen dapat menentukan seberapa besar kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi setiap barang. Sebagai contoh, konsumen dapat mengatakan bahwa memakan ice cream 1 cone memberikan utilitas sebesar 20 util, sedangkan memakan sebuah kue akan memberikan utilitas sebesar 10 util. Dalam pendekatan ini terdapat istilah utilitas total (*total utility*) dan utilitas marginal (*marginal utility*). Utilitas total merupakan nilai manfaat yang diperoleh oleh konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa, sedangkan utilitas marginal adalah tambahan manfaat dari penambahan satu unit barang atau jasa tersebut (Colander, 2004). Misalnya, mengonsumsi 3 cone ice cream bisa memberikan total utilitas sebesar 45 util dan mengonsumsi cone yang ke empat akan menambah utilitas sebanyak 5 util. Dalam hal ini, utilitas total adalah sebesar 45 util, sedangkan utilitas marginal adalah sebesar 5 util.

Jumlah konsumsi ice cream	Utilitas Total	Utilitas Marginal
1	20	20
2	35	15
3	45	10
4	50	5
5	50	0
6	45	-5

Tabel 4. 1. Utilitas Total dan Utilitas Marginal
dari Konsumsi Ice Cream

Grafik utilitas total dan utilitas marginal dari mengonsumsi ice cream di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Grafik Utilitas Total dan Utilitas Marginal

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa pada awalnya penambahan konsumsi ice cream akan memberi utilitas marginal yang besar (20 util pada cone pertama), tetapi semakin lama tambahan ini semakin berkurang bahkan bernilai negatif (-5 pada cone ke enam). Mengonsumsi ice cream hingga 5 cone akan memberikan utilitas total sebesar 50 util sama seperti mengonsumsi 4 cone. Utilitas marginal menjadi bernilai nol. Artinya, menambah 1 unit cone lagi tidak menambah utilitas. Menurunnya utilitas marginal mengindikasikan penurunan penambahan kepuasan atau manfaat yang diperoleh oleh konsumen yang disebut dengan *the Law of diminishing Marginal Utility*. Konsumen akan berhenti mengonsumsi ice cream jika tidak memperoleh tambahan manfaat dari menambah satu unit barang atau jika dana yang dimiliki sudah tidak cukup untuk membeli tambahan barang (terdapat kendala anggaran). Dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa konsumen memperoleh utilitas total yang maksimum pada saat utilitas marginalnya bernilai nol.

C. Kendala Anggaran (*Budget Constraint*)

Perilaku konsumen bisa diobservasi juga melalui respons mereka terhadap perubahan pendapatan dan harga (Nicholson & Snyder, 2008)

sehingga konsumen dikatakan bersifat rasional. Memahami preferensi konsumen dan utilitas merupakan tahap awal dalam proses analisis perilaku konsumen. Konsumen dapat memiliki preferensi dan membuat keputusan. Dalam membuat keputusan, konsumen dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama pendapatan yang disebut dengan kendala anggaran (*budget constraint*). Keterbatasan pendapatan membuat mereka tidak bisa membeli semua barang yang diinginkan dan harus membuat pilihan yang rasional (*rational choice*). Konsumen yang rasional akan berusaha memaksimalkan utilitas mereka dengan kendala anggaran yang mereka miliki. Dengan demikian, kendala anggaran dapat membatasi kombinasi barang atau jasa yang bisa dibeli oleh konsumen.

Dalam persamaan matematis, kendala anggaran dapat dituliskan sebagai berikut:

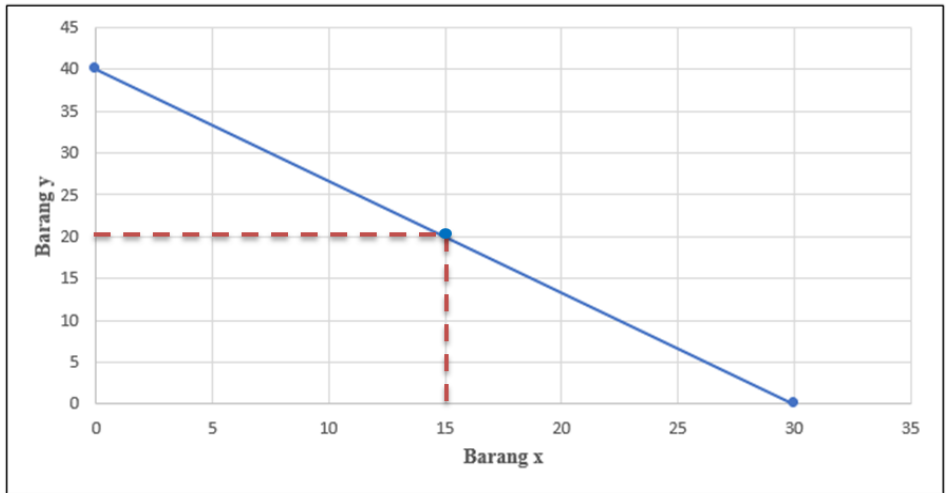
$$P_x Q_x + P_y Q_y \leq I$$

Di mana P_x dan P_y adalah harga barang x dan y sedangkan Q_x dan Q_y adalah jumlah barang x dan y yang dibeli, dan I adalah pendapatan. Artinya, biaya untuk membeli barang x dan y ($P_x Q_x + P_y Q_y$) tidak boleh melebihi pendapatan yang dimiliki. Itulah mengapa, pendapatan konsumen menjadi kendala anggaran untuk memenuhi preferensi konsumen.

Kendala anggaran dapat digambarkan dengan garis anggaran (*budget line*) seperti pada Gambar 4.4. Garis anggaran menunjukkan kombinasi konsumsi dua barang atau jasa dengan anggaran tertentu. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh berikut. Konsumen ingin membeli kombinasi barang x dan y . Harga barang x senilai 40,000 IDR ($P_x = 40,000$) dan harga barang y senilai 30,000 IDR ($P_y = 30,000$). Jika konsumen hanya memiliki pendapatan sebesar 1,200,000 IDR, maka konsumen bisa membeli barang x sebanyak $Q_x = 30$ dan tidak membeli barang y sama sekali ($Q_y = 0$). Biaya yang dibutuhkan untuk membeli barang x adalah sebesar 1,200,000 IDR ($P_x Q_x = 40,000 \times 30 = 1,200,000$).

Sebaliknya, jika konsumen memutuskan hanya membeli barang y saja, maka konsumen akan memperoleh barang y sebanyak $Q_y = 40$ ($Q_x =$

0). Jika konsumen ingin membeli keduanya, kombinasi barang x dan y yang memungkinkan salah satunya adalah kombinasi dengan $Q_x = 15$ dan $Q_y = 20$ dengan biaya yang sama 1,200,000 IDR. Nilai ini diperoleh dari $P_x Q_x + P_y Q_y = (40,000 \times 15) + (30,000 \times 20) = 1,200,000$.



Gambar 4.2. Kurva Garis Anggaran (*Budget Line Curve*)

D. Pengaruh Perubahan Harga dan Pendapatan

Perubahan harga suatu barang atau jasa akan mengubah kemiringan (*slope*) dan garis anggaran. Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi.

a) Penurunan harga barang x atau barang y

Jika harga salah satu barang (misalnya, barang x) menurun, konsumen dapat membeli lebih banyak barang x dengan anggaran yang sama. Penurunan harga x akan membuat *budget line* bergeser lebih jauh ke luar hanya di sumbu x sehingga *budget line* menjadi lebih landai, sedangkan *intercept* pada sumbu y tetap tidak berubah. Gambaran ini menunjukkan bahwa penurunan harga barang x menyebabkan konsumen bisa mendapatkan lebih banyak barang x relatif terhadap barang y. Gambar 4.5. bagian a memperlihatkan perubahan harga barang x yang naik dan turun serta perubahan *budget line* yang terjadi. Skenario yang lain, jika harga barang y yang

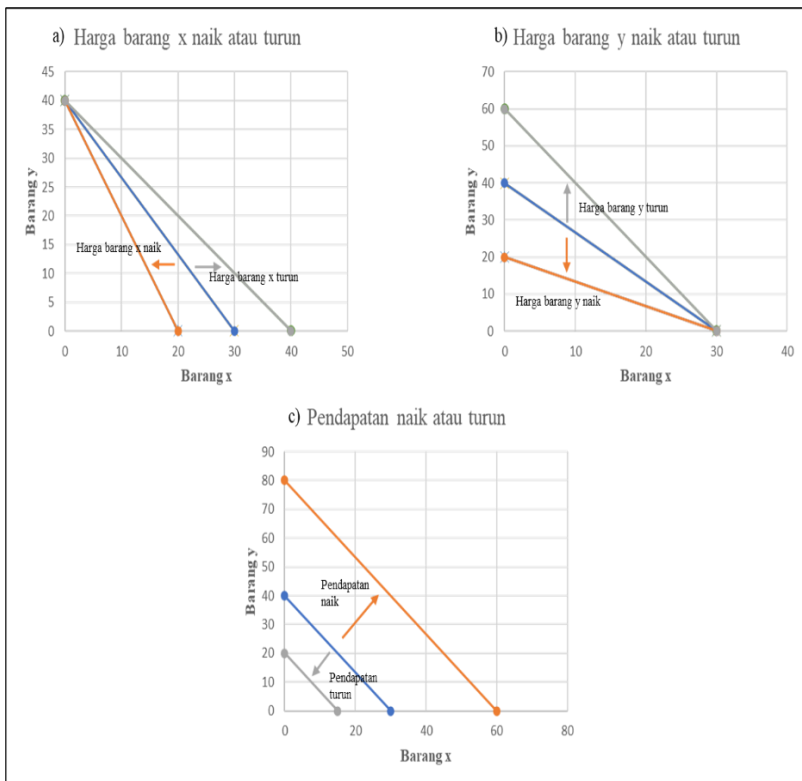
turun sedangkan harga barang x tetap, maka konsumen dapat membeli barang y lebih banyak relatif terhadap barang x.

b) Peningkatan harga barang x atau barang y

Jika harga barang x naik, budget line akan menjadi lebih curam mengindikasikan bahwa konsumen hanya bisa membeli sedikit barang x dengan pendapatan yang sama.

c) Perubahan harga keduanya (proporsional)

Jika harga kedua barang naik dan turun secara proporsional, *budget line* akan tetap mempertahankan kemiringannya, tetapi akan bergeser mendekat atau menjauh dari titik origin. Perubahan ini secara keseluruhan mengindikasikan daya beli konsumen yang meningkat atau menurun jika kedua harga barang turun atau naik dengan rasio harga antar-barang tetap konstan.



Gambar 4.3 Pengaruh Perubahan Harga dan Pendapatan Terhadap Budget Line

Perubahan dalam pendapatan konsumen menggeser *budget line* secara paralel tanpa merubah kemiringan garis.

a) Peningkatan pendapatan

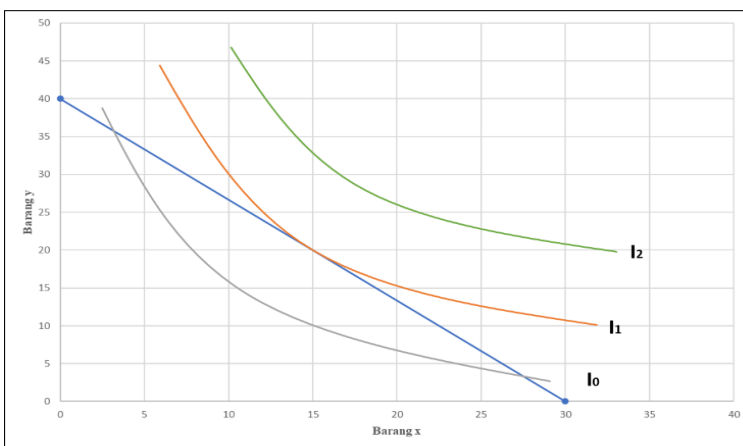
Jika pendapatan konsumen meningkat, *budget line* bergeser ke luar secara paralel dari titik origin seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.5. bagian c. Konsumen dapat membeli lebih banyak barang x dan y dengan harga yang sama. Hal ini menunjukkan peningkatan daya beli konsumen.

b) Penurunan pendapatan

Jika pendapatan menurun, *budget line* bergeser secara paralel mendekati titik origin mengindikasikan konsumen hanya bisa membeli lebih sedikit barang karena daya beli yang menurun.

E. Kombinasi Optimal (*Optimal Choice*)

Kombinasi optimal atau *optimal choice* adalah titik di mana konsumen mencapai utilitas maksimum dalam batasan anggaran mereka. Kombinasi yang optimal ini seringkali disebut dengan keseimbangan konsumen di mana konsumen telah mengalokasikan pendapatnya secara efisien untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang memungkinkan. Secara visual, kombinasi optimal tercapai pada saat kurva *budget line* bersinggungan dengan kurva *indifference* tertinggi yang bisa dicapai.



Gambar 4. 4 Kombinasi Optimal (*Optimal Choice*)

Gambar 4.6. menunjukkan kombinasi optimal untuk mengonsumsi barang x dan barang y yaitu pada saat kurva *indifference* I_1 bersinggungan dengan *budget line*. Preferensi konsumen yang lebih tinggi pada kurva *indifference* I_2 tidak dapat dijangkau karena adanya *budget constraint*. Kurva *indifference* I_0 menunjukkan tingkat utilitas yang lebih rendah dibandingkan kurva *indifference* lainnya sehingga tidak memberikan kombinasi yang optimal.

Pada titik kombinasi optimal, kemiringan *budget line* sama dengan kemiringan kurva *indifference*. Kemiringan ini menunjukkan *Marginal Rate of Substitutions* (MRS). MRS merupakan tingkat di mana konsumen bersedia menukar berapa banyak barang y untuk mendapatkan satu barang x.

Secara matematis, kondisi optimal tercapai ketika:

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}$$

Di mana MU_x dan MU_y masing-masing adalah *marginal utility* untuk barang x dan y. P_x dan P_y masing-masing adalah harga untuk barang x dan barang y.

Jika kondisi optimal belum tercapai, maka konsumen yang bersikap rasional akan mengalokasikan pendapatannya untuk mengonsumsi barang atau jasa yang memberikan *marginal utility* per IDR yang lebih besar. Jika dituliskan ke dalam persamaan matematis:

- Jika $\frac{MU_x}{P_x} > \frac{MU_y}{P_y}$, maka konsumen akan menambah konsumsi barang x
- Jika $\frac{MU_x}{P_x} < \frac{MU_y}{P_y}$, maka konsumen akan menambah konsumsi barang y

Menurut prinsip *rational choice*, konsumen harus mengatur pengeluarannya sesuai dengan *budget* jika dua pilihan barang memberikan *marginal utility* per IDR yang berbeda. Apabila dua pilihan telah memberikan *marginal utility* per IDR yang sama maka kondisi optimal telah tercapai dan konsumen telah memaksimalkan utilitasnya serta terjadi keseimbangan konsumen.

F. Efek Substitusi dan Efek Pendapatan

Efek substitusi dan efek pendapatan adalah konsep kunci dalam memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi perilaku konsumsi, dan keduanya berkaitan erat dengan hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa, *ceteris paribus* (dengan asumsi faktor-faktor lain tetap), ketika harga suatu barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat, dan sebaliknya, ketika harga naik, jumlah permintaan akan menurun. Hukum ini mencerminkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan jumlah yang diminta ketika harga berubah dapat dijelaskan dengan dua efek utama: efek substitusi dan efek pendapatan.

a) Efek Substitusi

Efek substitusi terjadi ketika penurunan harga suatu barang membuatnya relatif lebih murah dibandingkan barang lain, sehingga konsumen cenderung menggantikan konsumsi barang yang lebih mahal dengan barang yang lebih murah. Misalkan harga kopi menurun sementara harga teh tetap. Kopi sekarang menjadi relatif lebih murah daripada teh, sehingga konsumen mungkin memutuskan untuk membeli lebih banyak kopi daripada teh, menggantikan teh dengan kopi. Efek substitusi meningkatkan jumlah permintaan terhadap barang yang harganya turun, sesuai dengan hukum permintaan. Penurunan harga kopi menyebabkan konsumen lebih memilih kopi daripada teh, sehingga jumlah kopi yang diminta meningkat.

b) Efek Pendapatan

Efek pendapatan terjadi ketika perubahan harga suatu barang memengaruhi daya beli konsumen, seolah-olah konsumen memiliki pendapatan yang lebih besar atau lebih kecil. Ketika harga barang turun, konsumen memiliki sisa pendapatan lebih banyak setelah membeli jumlah barang yang sama. Daya beli mereka meningkat, yang mungkin mendorong mereka untuk membeli lebih banyak barang, termasuk barang yang harganya turun. Sebaliknya, jika harga naik, konsumen merasa daya belinya menurun, sehingga mereka cenderung mengurangi pembelian barang tersebut atau

bahkan barang lain. Misalnya, Jika harga beras turun, konsumen merasa lebih kaya karena dapat membeli lebih banyak beras dengan uang yang sama. Mereka mungkin memilih untuk mengonsumsi lebih banyak beras atau bahkan meningkatkan konsumsi barang lain dengan sisa uang tersebut.

Ketika harga suatu barang menurun, baik efek substitusi maupun efek pendapatan bekerja bersama-sama untuk meningkatkan jumlah barang yang diminta. Efek substitusi mendorong konsumen untuk menggantikan barang lain dengan barang yang harganya turun. Efek pendapatan menambah daya beli konsumen, membuat mereka cenderung membeli lebih banyak barang tersebut. Begitu juga ketika harga naik, kedua efek ini bekerja untuk mengurangi jumlah barang yang diminta.

G. Penutup

Pemahaman tentang perilaku konsumen dalam memilih barang dan jasa sangatlah penting dalam studi ekonomi. Dengan menggabungkan konsep preferensi konsumen, teori utilitas, dan kendala anggaran, kita dapat memahami bagaimana konsumen membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan dalam keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Analisis ini tidak hanya membantu dalam memahami keputusan individu, tetapi juga memiliki implikasi yang luas pada dinamika pasar, distribusi sumber daya, dan perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Melalui studi perilaku konsumen, ekonomi dapat merancang strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Colander, D. C. (2004). *Economics* (5th ed.). The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Nicholson, W., & Snyder, C. (2008). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions* (10th ed.). Thomson Higher Education, USA.
- Perloff, J. M. (2012). *Microeconomics* (6th ed.). Pearson education Inc. & Pearson Addison Wesley.

Profil Penulis



Dr. Ani Silvia, M.S.M

Lahir di Jakarta pada 6 Juni 1983. Penulis menempuh pendidikan S1 Teknik Pertanian Subprogram studi Sistem Manajemen Informasi Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur PMDK. Pengalaman di bidang industri keuangan syariah memotivasi dirinya untuk melanjutkan studi S2 pada program studi Magister Sains Management dengan konsentrasi keuangan di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) dengan dukungan beasiswa internal dari ITB. Penulis memperoleh gelar doktor dari Program Pascasarjana Ilmu Manajemen (PPIM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) dengan konsentrasi keuangan dan perbankan pada tahun 2024 dengan dukungan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia – Dalam Negeri (BUDI-DN) dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini, penulis adalah dosen tetap Program Studi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Teori Produksi dan Biaya

Oleh: Junet Kaswoto

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Pada era kini dan yang akan datang aktivitas perekonomian tidak akan lepas dari kegiatan produksi atau industri karena di dalam kegiatan ekonomi itu ada produk yang dijual, produk tidak datang secara tiba-tiba melainkan harus diciptakan. Membahas tentang penciptaan produk maka akan terkait dengan kegiatan perusahaan industri. Perusahaan industri sebelum menciptakan produk maka terlebih dahulu merancang dan mempelajari bagaimana proses produk itu dikerjakan agar menjadi produk yang baik kualitasnya dan efisien dari segi biaya.

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori produksi yang merupakan cabang dari ekonomi mikro, mempelajari bagaimana perusahaan menentukan proses produksi untuk memaksimalkan output dengan memanfaatkan input yang tersedia. Teori produksi memberikan dasar kepada perusahaan untuk membuat keputusan strategis seperti investasi membeli peralatan baru atau mengadakan pelatihan kepada pekerja untuk meningkatkan produksi. Dengan memahami teori produksi maka perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan memenangkan persaingan pasar karena produk yang dihasilkan berkualitas baik dari segala lini termasuk kualitas biaya.

Tentang biaya produksi juga akan diuraikan dalam bab ini karena erat hubungannya dengan perusahaan industri yang menghasilkan produk dan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh perusahaan.

A. Fungsi Produksi

1. Konsep Dasar

Fondasi penting dalam ekonomi untuk memahami bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan berbagai input untuk menghasilkan *output* dinamakan konsep dasar fungsi produksi. Konsep dasar dari fungsi produksi antara lain adalah:

a) *Input dan Output*

Input merupakan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal (mesin, gedung, tanah dan teknologi).

Output adalah produk atau jasa yang dihasilkan dari kombinasi berbagai input.

b) Efisiensi produksi

Data yang menunjukkan seberapa baik input dipergunakan untuk menghasilkan output yang maksimal dan tidak menghamburkan sumber daya.

c) *Diminishing Returns*

Prinsip dimana setelah mencapai titik tertentu, tambahan input akan memberikan tambahan output yang semakin kecil jika input lainnya tetap konstan.

d) *Return to Scale*

Mengkaji bagaimana perubahan proporsional dalam semua input berpengaruh terhadap output.

e) Isoquant

ialah kurva yang menunjukkan semua kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama.

f) *Marginal Product*

Tambahan *output* yang dihasilkan dari tambahan satu unit *input*. Gunanya untuk menentukan kontribusi input tertentu terhadap produksi.

g) Teknologi

Inovasi dan perbaikan teknologi dapat meningkatkan output dengan input yang sama, hal ini terkait dengan faktor penentu dalam efisiensi produksi.

h) *Short-Run* dan *Long-Run*

Short-Run merupakan periode dimana setidaknya satu input bersifat tetap. Sedangkan *Long-Run* pengertiannya adalah semua input bersifat variable.

2. Jenis-jenis Fungsi Produksi

a) Produksi Jangka Pendek dan produksi jangka panjang

Dalam produksi jangka pendek periodenya cukup singkat, minimal ada satu faktor produksi dianggap tetap (modal atau gedung), sedangkan faktor lainnya, seperti tenaga kerja dapat berubah.

Karakteristik produksi jangka pendek antara lain sebagai berikut :

1. Faktor tetap; Beberapa input seperti mesin atau bangunan tidak bisa dirubah.
2. Biaya Tetap; Merupakan jenis biaya yang tidak berubah meskipun kuantitas produksi berubah, contohnya biaya sewa dan gaji karyawan tetap.
3. Hukum Hasil yang Berkurang; Di mana ada titik apabila menambah lebih banyak variabel input maka mulai menghasilkan output tambahan yang semakin berkurang.

Dalam produksi jangka Panjang, Perusahaan dapat membuat keputusan yang signifikan terkait dengan ukuran operasi dan biaya struktural, pada jenis produksi ini semua faktor produksi dapat diubah.

Karakteristik produksi jangka panjang antara lain :

- 1) Variabilitas input; Pengertiannya adalah bahwa semua input dapat disesuaikan, sehingga Perusahaan dapat mengubah skala produksi.
- 2) Biaya Variabel; Semua biaya menjadi variabel, artinya dapat disesuaikan berdasarkan skala produksi.

- 3) Skala Ekonomi; Perusahaan dapat mengalami keuntungan atau menderita kerugian dari skala, ditentukan oleh seberapa efisien mereka bisa mengoperasikan skala produksi yang lebih besar atau lebih kecil.

b) Fungsi Produksi Coob-Douglas

Fungsi produksi Coob-Douglas adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih input produksi (misalnya tenaga kerja dan modal) dengan jumlah output yang dihasilkan.

Rumus dasar dari fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu:

$$Q = AL^{\alpha} K^{\beta}$$

Di mana:

Q : adalah output total

A : adalah Faktor efisiensi total factor, yang merepresentasikan teknologi atau produktivitas keseluruhan

L : adalah input tenaga kerja

K : adalah input modal

α dan β : adalah elastisitas output masing-masing terhadap tenaga kerja dan modal. Nilai-nilai ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam input mempengaruhi output.

Karakteristik utama dari fungsi Cobb-Douglas yaitu :

- 1) Skala Hasil: Apabila $\alpha + \beta = 1$, maka fungsi menunjukkan hasil skala tetap.
Apabila $\alpha + \beta < 1$, menunjukkan hasil skala menurun; dan jika $\alpha + \beta > 1$, maka menunjukkan hasil skala meningkat.
- 2) Elastisitas Substitusi: Fungsi ini mengasumsikan elastisitas substitusi antara input adalah konstan walaupun bukan satu-satunya Tingkat substitusi.
- 3) Peran Teknologi: Faktor A memungkinkan fungsi untuk menangkap perubahan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas.

3. Hukum Hasil Tambahan Menurun (*Law of Diminishing Returns*)

Law of Diminishing Returns adalah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa apabila satu input variabel ditambah terus-menerus sedangkan input yang lainnya tetap konstan, maka akan tiba saatnya di mana tambahan output yang dihasilkan dari setiap satuan tambahan input itu akan mulai menurun. Hukum Hasil Tambahan Menurun ini biasanya diterapkan dalam hal produksi.

Contohnya kita lihat di bidang pertanian misalnya: Apabila kita tambahkan pupuk pada sebidang tanah secara terus-menerus, pada awalnya hasil panen biasanya akan meningkat dengan cepat, tetapi setelah melewati titik tertentu, maka hasil tambahan dari setiap kantong pupuk tambahan akan semakin kecil dan pada akhirnya akan merusak tanaman.

Dalam pengambilan Keputusan bisnis dan ekonomi penting untuk memperhatikan hukum hasil tambahan menurun ini karena penambahan terus-menerus dalam input tidak selalu mengarah pada peningkatan proporsional dalam output.

B. Skala Ekonomi

Menurut Kimberly Amadeo (2024) "*Economies of scale are cost reductions that occur when companies increase production*". Skala Ekonomi adalah pengurangan biaya yang terjadi ketika perusahaan meningkatkan produksi.

Dapat dikatakan bahwa skala ekonomi adalah konsep dalam ekonomi yang mengacu pada pengurangan biaya produksi per unit pada saat volume produksi meningkat, maknanya berarti bahwa semakin besar sebuah Perusahaan menghasilkan produksi maka semakin rendah biaya per unitnya.

Jenis-jenis skala ekonomi antara lain:

1. Skala ekonomi internal; Skala internal dapat dialami Perusahaan secara individual dalam hal efisiensi karena penggunaan teknologi, pembelian bahan baku dalam jumlah besar, manajerial yang lebih baik, sisi keuangan mudah mendapatkan permodalan dan dari pemasaran mendapatkan biaya iklan yang lebih rendah.

2. Skala ekonomi eksternal; Faktor eksternal ini bukan terjadi di bawah kendali Perusahaan namun berpengaruh dalam industri tersebut misalnya seperti infrastruktur (fasilitas umum pendukung industri yang baik), kluster industri, dan pengembangan pasokan (pemasok bahan baku lebih efisien karena permintaan industry yang berkembang).

Pemanfaatan skala ekonomi merupakan tujuan penting bagi bisnis karena dapat meningkatkan daya saing dengan menurunkan biaya sehingga keuntungan optimal.

C. Pengukuran Produktivitas

Produktivitas merupakan ukuran efisiensi produksi dan menunjukkan seberapa efektif input digunakan untuk menghasilkan output. Ada dua konsep utama dalam produktivitas yaitu produktivitas parsial dan produktivitas total.

1. Produktivitas parsial dan Total

Produktivitas parsial mengukur output terhadap satu jenis input yang berarti bahwa hanya ada satu faktor produksi yang diperhitungkan ketika menghitung produktivitas. Contohnya :

- a) Produktivitas tenaga kerja; Output yang dihasilkan per unit tenaga kerja (misalnya jam kerja atau jumlah karyawan).
- b) Produktivitas Modal; Output per unit modal yang dipergunakan (misalnya perangkat keras mesin).
- c) Produktivitas Material; Output per unit bahan baku yang dipergunakan.

Kegunaan mengukur produktivitas parsial adalah untuk mengidentifikasi efisiensi pemakaian sumber daya tertentu dan menentukan area mana yang memerlukan perbaikan.

Produktivitas total, produktivitas ini disebut juga sebagai produktivitas multifaktor, mengukur output dengan mempertimbangkan semua input yang digunakan dalam proses produksi. Menggabungkan faktor tenaga kerja, modal dan bahan lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efisiensi seluruhnya.

Rumus dasarnya yaitu:

$$\text{Produktivitas total} = \text{Total Output} / \text{Total input.}$$

Produktivitas total menawarkan pandangan yang lebih lengkap tentang efisiensi proses produksi dan lebih baik dalam mengevaluasi perubahan teknologi atau strategi manajemen.

2. Metode Pengukuran Produktivitas

Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada tujuan dan skala operasionalnya.

Beberapa metode pengukuran produktivitas yang umum digunakan antara lain:

1. Produktivitas parsial; hanya ada satu faktor produksi yang diperhitungkan ketika menghitung produktivitas, contohnya produktivitas tenaga kerja dan lainnya.
2. Produktivitas Total; Dihitung dengan cara membagi Total Output dengan Total Input.
3. Analisa titik impas (*Break-even Analysis*); Metode ini membantu menentukan pada titik mana biaya total sama dengan pendapatan total, sehingga produktivitas tidak merugi. Metode ini lebih konsentrasi pada pengaturan volume produksi dan penjualan yang menguntungkan.
4. Analisis Nilai Tambah; Pada metode ini melihat bagaimana setiap tahap dalam proses produksi menambah pada nilai produk. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan biaya dibandingkan dengan nilai yang ditambahkan, yang membantu menemukan area yang perlu ditingkatkan.
5. Benchmarking; Metode ini membandingkan produktivitas internal dengan standar industri atau pesaing untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang peningkatan.
6. Indeks Produktivitas; Metode ini digunakan sebagai skor komposit yang menggabungkan berbagai aspek produktivitas untuk memantau perubahan dalam efisiensi dari waktu ke waktu.

Setiap metode pengukuran di atas memberikan wawasan yang berbeda dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan entitas guna meningkatkan efisiensi dan keuntungan.

D. Teori Biaya Produksi

Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan Perusahaan pada saat menawarkan layanan atau membuat produk. Biaya produksi terdiri dari berbagai unsur yaitu biaya bahan, upah karyawan, biaya pemeliharaan pabrik dan biaya pengiriman.

Dalam analisis biaya maka perlu dibedakan antara biaya tetap, biaya variable dan biaya total. Berikut ini penjelasan tentang masing-masing jenis biaya tersebut:

1. Biaya Tetap, Biaya Variabel dan Biaya Total

a) Biaya Tetap (*Fixed Cost*)

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun Tingkat produksi atau penjualan berubah.

Contoh dari biaya tetap yaitu sewa bangunan, gaji pegawai tetap, biaya asuransi, dan pajak gedung.

Karakteristik dari biaya tetap konstan dalam jangka pendek dan tidak dipengaruhi oleh biaya produksi.

b) Biaya Variabel (*Variable Cost*)

Biaya Variabel yaitu biaya yang berubah seiring dengan perubahan Tingkat produksi dan penjualan.

Contoh dari biaya variable yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya Listrik untuk mesin produksi.

Karakteristik dari biaya variable adalah akan meningkat seiring dengan peningkatan produksi dan begitu juga sebaliknya.

c) Biaya Total (*Total Cost*)

Biaya total adalah jumlah total dari biaya tetap dan biaya variabel pada Tingkat produksi tertentu.

Rumus dari Biaya Total yaitu : $\text{Biaya Total} = \text{Biaya Tetap} + \text{Biaya Variabel}$

Karakteristik dari Biaya Total yaitu memberikan Gambaran keseluruhan mengenai pengeluaran untuk berbagai Tingkat aktivitas operasi.

Pemahaman tentang biaya tetap, biaya variable dan biaya total sangat penting untuk penetapan harga, perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan strategis terutama pada saat mempertimbangkan ekspansi atau melakukan pengurangan kapasitas produksi.

2. Grafik Biaya Produksi

Untuk memahami biaya produksi, grafik biaya dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total terhadap tingkat produksi.

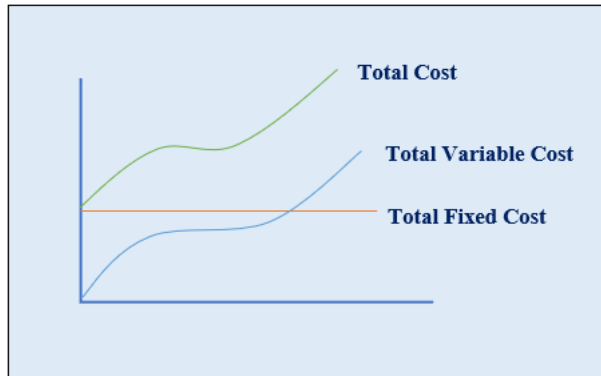
Komponen utama dalam grafik dan analisisnya sebagaimana berikut ini:

- a) Sumbu X (Horizontal); Umumnya merepresentasikan jumlah unit yang diproduksi.
- b) Sumbu Y (Vertikal); Mewakili biaya dalam satuan uang (misalnya, dolar atau rupiah).

Jenis Garis Dalam Grafik

- a) Garis Biaya Tetap; Digambarkan sebagai garis horizontal karena biaya tetap tidak berubah dengan tingkat produksi.
- b) Garis Biaya Variabel; Bergerak naik dari titik asal, kemiringan garis menunjukkan laju biaya variabel per unit. Semakin curam garis maka akan semakin tinggi biaya variabel per unit.
- c) Garis Biaya Total; Bergerak naik mulai dari titik di mana garis biaya tetap memotong sumbu Y. Ini adalah penjumlahan dari garis biaya tetap dan biaya variabel. Apabila digambarkan maka s

Apabila digambarkan maka sebagaimana berikut ini



Gambar 5.1 Diagram Biaya Produksi
Sumber: Studiekonomi.com

3. Analisis Grafik

- 1) *Break-Even Point*; Titik di mana biaya total sama dengan total pendapatan. Pada keadaan ini, perusahaan tidak menghasilkan laba atau rugi.
- 2) Slope dan Kemiringan; Menunjukkan laju perubahan biaya variabel. Hal ini sangat penting dalam menentukan efisiensi produksi.
- 3) Area di Bawah Garis Biaya Total dan Pendapatan; Menandakan laba (jika pendapatan lebih tinggi dari biaya total) atau kerugian (jika biaya total lebih tinggi dari pendapatan) pada tingkat produksi tertentu.
- 4) Pengaruh Skala Produksi; Grafik memungkinkan untuk melihat bagaimana skala produksi mempengaruhi total biaya, membantu dalam keputusan kapasitas produksi dan efisiensi operasi.

Dengan menggunakan grafik, perusahaan dapat mengidentifikasi bagaimana berbagai komponen biaya berkontribusi terhadap biaya total dan bagaimana perubahan dalam volume produksi dapat mempengaruhi profitabilitas.

4. Biaya Rata-rata dan Marginal

a) Biaya Rata-rata (*Average Cost*)

Biaya rata-rata adalah total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Hal ini memberikan gambaran tentang

berapa banyak biaya yang dikeluarkan rata-rata untuk memproduksi satu unit barang.

Formula Biaya Rata-rata (AC). $AC = \frac{TC}{Q}$

Di mana (TC) adalah total biaya dan (Q) adalah kuantitas produksi.

Komponen Biaya Rata-rata antara lain :

- 1) Biaya Rata-rata Tetap (AFC); Biaya tetap per unit menurun pada saat lebih banyak unit yang diproduksi karena biaya tetap tersebar pada lebih banyak unit.
- 2) Biaya Rata-rata Variabel (AVC); Biaya variabel per unit dapat berubah sesuai efisiensi produksi.

b) Biaya Marginal (*Marginal Cost*)

Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan. Hal ini membantu dalam memahami dampak finansial dari peningkatan produksi.

Formula Biaya Marginal (MC) : $MC = \frac{\Delta C}{\Delta Q}$

Keterangan :

MC = Biaya Marginal

ΔC = Perubahan Total Biaya dan

ΔQ = Perubahan Kuantitas

Penggunaan Biaya Marginal

- 1) Penentuan Harga; Biaya marginal dapat dipakai untuk Menentukan harga minimum guna menutupi biaya unit tambahan.
- 2) Keputusan Produksi; Biaya marginal dapat dipakai untuk Memutuskan apakah akan menambah produksi atau tidak.

Jika biaya marginal lebih rendah dari penerimaan marginal, maka produksi dapat ditingkatkan.

Dengan memahami dan menganalisis biaya rata-rata dan marginal, maka manajemen Perusahaan dapat membuat

keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan produksi dan dalam hal strategi penetapan harga.

E. Struktur Biaya dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Ada perbedaan pengaruh antara Struktur Biaya jangka pendek dan jangka Panjang terhadap keputusan produksi dan biaya suatu Perusahaan.

Pada Struktur biaya jangka pendek, perusahaan fokus pada memperbaiki efisiensi dan menyesuaikan tingkat output berdasarkan struktur biaya tetap dan biaya variabel.

Sedangkan dalam jangka panjang, Perusahaan lebih fleksibel dalam mengubah semua input yang mempengaruhi pengurangan atau peningkatan biaya total. Keputusan jangka Panjang melibatkan pertimbangan strategis yang lebih kompleks, seperti ekspansi kapasitas dan inovasi teknologi.

F. Efisiensi dan Optimalisasi Produksi

Efisiensi dan optimalisasi produksi bagi Perusahaan industri sangat penting untuk mencapai hasil terbaik dalam sebuah industri.

Berikut ini beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi produksi:

- 1) Pemanfaatan Teknologi; Perusahaan perlu menggunakan teknologi terbaru untuk mempercepat dan mengotomatiskan proses produksi seperti mesin otomatis dan sistem kendali digital.
- 2) Pelatihan Karyawan; Usahakan karyawan mendapatkan pelatihan reguler agar keterampilan mereka selalu up-to-date dengan teknologi dan metode baru.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya; Mengatur dan mempergunakan sumber daya, seperti bahan baku dan energi, secara efisien. Hindari pemborosan dan kerugian.
- 4) Pemeliharaan Mesin; Lakukan pemeliharaan dan inspeksi rutin terhadap semua mesin dan alat untuk mencegah kerusakan yang bisa menunda produksi.

- 5) Analisis Data Gunakan data analytics untuk mengidentifikasi pola dalam proses produksi yang dapat ditingkatkan atau dioptimalkan.
- 6) Pengembangan Produk yang Berkelanjutan; Melakukan inovasi produk agar lebih efisien dalam hal biaya produksi dan lebih disukai oleh pasar.
- 7) Manajemen Rantai Pasokan; Optimalkan rantai pasokan untuk memastikan bahwa bahan baku tiba tepat waktu dan mengurangi biaya penyimpanan.
- 8) Pengendalian Kualitas; Terapkan sistem pengendalian kualitas yang ketat pada setiap tahap produksi untuk memastikan produk akhirnya memenuhi standar.
- 9) *Lean Manufacturing*; Implementasikan prinsip-prinsip lean manufacturing untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional.
- 10) *Feedback* Pelanggan; Pergunakan umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, dapat membantu Perusahaan meningkatkan output mereka sambil mengurangi biaya, menyelamatkan waktu, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

G. Aplikasi Teori Produksi dan Biaya

1. Strategi Manajemen Produksi

Strategi manajemen produksi yang efektif dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik.

Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Perusahaan yaitu:

- a) *Just-In-Time* (JIT); Pada strategi ini, produksi dilakukan tepat waktu sesuai dengan permintaan, mengurangi persediaan dan mengurangi biaya penyimpanan.
- b) Pengendalian Kualitas Total (TQM); Pada strategi ini, perusahaan fokus pada kualitas di semua tahap proses produksi dengan melibatkan setiap orang dalam organisasi.

- c) *Lean Manufacturing*; Pada strategi ini yang dilakukan yaitu mengurangi pemborosan dalam proses produksi tanpa mengorbankan efisiensi dan kualitas.
- d) Otomasi; Perusahaan memanfaatkan teknologi dan mesin untuk mempercepat proses produksi serta mengurangi kesalahan manusia.
- e) Six Sigma; Merupakan metodologi untuk meningkatkan proses dengan mengidentifikasi dan menghilangkan cacat dalam produksi.
- f) *Forecasting*; Perusahaan menggunakan data historis dan analisis pasar untuk memprediksi permintaan dan merencanakan kapasitas produksi dengan tepat.
- g) Manajemen Rantai Pasok; Pada strategi ini Integrasi efisien dari pemasok dengan proses produksi untuk memastikan alur bahan dan produk secara lancar.
- h) Layout Pabrik Efisien; Pada strategi ini, Perusahaan Merancang tata letak pabrik untuk meminimalkan pergerakan bahan dan tenaga kerja, meningkatkan aliran produksi.
- i) Pelatihan dan Pengembangan Karyawan; Adalah strategi mempertahankan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan untuk memastikan mereka tetap kompetitif.
- j) Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan; Pada strategi ini, Perusahaan selalu menilai dan mencari cara baru untuk meningkatkan proses produksi, agar membuatnya lebih efisien.

Dalam menerapkan strategi-strategi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan kapasitas perusahaan, serta keterlibatan semua bagian dari organisasi.

2. Contoh Penerapan Teori Produksi dan Biaya

Teori produksi dan biaya digunakan dalam berbagai industri untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Berikut ini adalah beberapa contoh penerapannya:

- a) Optimalisasi Input Produksi;
 - Pertanian: Petani menggunakan analisis biaya-manfaat untuk menentukan kombinasi terbaik antara pupuk, pestisida, dan tenaga

kerja untuk memaksimalkan panen dengan biaya produksi minimum.

b) Skala Ekonomi;

Manufaktur Otomotif; Pabrik mobil memproduksi dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya per unit melalui efisiensi skala, menurunkan biaya tetap per unit.

c) Penggunaan Teknologi;

Industri Elektronik Perusahaan elektronik mengimplementasikan teknologi otomatisasi untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan kecepatan produksi, menurunkan biaya variabel.

d) *Lean Production*;

Industri Makanan Cepat Saji;

Rantai makanan cepat saji menerapkan praktik lean untuk menghilangkan pemborosan, mempercepat waktu produksi, dan memastikan kualitas konsisten, mengurangi biaya operasional.

e) Analisis Biaya Marginal;

Pabrik Kimia: Memantau biaya marginal untuk memutuskan apakah akan meningkatkan produksi atau tidak, memastikan bahwa tambahan biaya produksi tidak melebihi tambahan pendapatan.

f) Substitusi Input;

Industri Tekstil; Menggantikan bahan baku yang mahal dengan alternatif yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas untuk mengurangi biaya produksi total.

g) *Break-even Analysis* (Analisis Titik Impas);

Startup Teknologi:

Menghitung titik impas untuk menentukan harga yang tepat dan volume penjualan minimum yang dibutuhkan agar perusahaan tidak merugi.

h) *Outsourcing*;

Perusahaan Pakaian

Mengalihdayakan beberapa proses produksi ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah untuk mengurangi biaya produksi total.

i) Jadwal Produksi;

Industri Logistik: Mengoptimalkan jadwal pengiriman dan produksi berdasarkan permintaan musiman untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan stok yang berlebih.

Dengan menerapkan teori produksi dan biaya, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, pengeluaran yang lebih rendah, dan daya saing yang lebih tinggi di pasar

H. Kesimpulan

Teori produksi dan biaya merupakan konsep ekonomi yang penting untuk memahami bagaimana Perusahaan memproduksi barang dan jasa serta bagaimana menentukan biaya yang terkait dengan produk tersebut.

Biaya produksi dapat dinarasikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan dipergunakan perusahaan untuk menciptakan barang-barang yang dihasilkan Perusahaan.

Fondasi penting dalam ekonomi untuk memahami bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan berbagai input untuk menghasilkan output dinamakan konsep dasar fungsi produksi. Apabila memahami konsep dasar fungsi produksi maka Perusahaan akan mencapai Tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan produktivitas tinggi maka harga sebuah produk akan mampu bersaing dipasaran.

Pemanfaatan skala ekonomi merupakan tujuan penting bagi bisnis karena dapat meningkatkan daya saing dengan menurunkan biaya sehingga keuntungan optimal.

Biaya produksi sangat berpengaruh terhadap kalkulasi keuntungan Perusahaan. Apabila Perusahaan keliru dalam menghitung biaya produksi maka akan mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan keuntungan atau kerugian yang diperoleh Perusahaan.

Referensi

- Sutiono, Agus et al (2023). Dasar-Dasar Ekonomi (Panduan Praktis Teori dan Konsep) PT. Sonpedia Publishing Indonesia Jambi.
- Yuli Anita, Siska et al (2022). Pengantar Ekonomi (Mikro dan Makro). PT. Sada Kurnia Pustaka. Carenang, Serang Banten
- Sukirno (2016) Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Leiwinanggung, Tapos, Depok
- <https://www.thebalancemoney.com/economies-of-scale-3305926>
(diakses 13 November 2024)
- Priyono, et al (2016) Teori Ekonomi. Dharma Ilmu. Surabaya

Profil Penulis



Dr. Junet Kaswoto, M.M

Pria kelahiran Belitang, Sumatra Selatan pada 11 September 1968 ini merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara pasangan Madio Diharjo dan Sitrunsi. Junet menghabiskan masa kecilnya di Lampung, pendidikan dasar hingga sarjana muda Fakultas Ekonomi Universitas Lampung ditempuh di tanah Sai Bumi Ruwai Jurai itu. Pada 14 Desember 1997, Junet Kaswoto menikah dengan Siti Rohana dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Nadya Amalia Juana, Khazaini Tanaffasa Juana, dan Muhammad Hafiz Juana. Pada November 2017 melanjutkan studi ke jenjang S3 (Program Doktor) jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economic Finance) di Universitas Trisakti Jakarta dan lulus tahun 2021. Mulai bekerja pada tahun 1991 di berbagai bidang (Industri manufakturing juga Properti) dan sejak Desember 2005 hingga sekarang bekerja sebagai Senior manajer bagian Keuangan pada Grup Perusahaan Swasta Asing di Serang Banten.

Mengemban amanah organisasi tingkat Cabang, Daerah dan Wilayah di Muhammadiyah Provinsi Banten, Anggota Pengurus MUI Kecamatan Panongan dan sebagai anggota Dewan Pakar pada Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Tangerang periode 2023-2028.

Buku yang sudah ditulis, baik sendiri maupun secara kolaborasi antara lain: Strategi Membantu Karyawan Bebas dari Jerat Rentenir, Berbasis Ekonomi Syariah di Penerbit Rajawali Pers, Ekonomi Islam dan 7 buku lainnya yang diterbitkan oleh Minhaj Pustaka.

Aktivitas Akademisi: Tahun 2014-2017 dosen pada Program Studi Manajemen di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Tahun 2021-2022 Sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah AR. Fachruddin Tangerang. Sejak Juni 2022 hingga sekarang sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) pada Program Studi Manajemen.

Struktur Pasar dan Perilaku Konsumen

Oleh: Ria Puspitasari

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Dalam bidang ekonomi dikenal istilah struktur pasar dan perilaku produsen. Struktur pasar merujuk pada karakteristik dan kondisi suatu pasar yang dilihat dari jumlah pembeli dan penjual, keragaman produk hingga hambatan yang ada dalam pasar. Struktur pasar merupakan hal yang perlu diketahui karena dapat memberi petunjuk mengenai aspek-aspek penting yang berkaitan dengan perilaku usaha dan kinerja pasar secara keseluruhan.

Selain itu, struktur pasar ini juga mempengaruhi perilaku produsen atau usaha produsen dalam masuk dan bertahan di dalam struktur pasar yang mereka masuki. Dengan begitu, pelaku usaha bisa mengetahui tingkat persaingan yang terjadi di pasar dan harga produk yang ditawarkan.

A. Pengertian Struktur Pasar

1. Lipsey (1990)

Struktur pasar merujuk pada keseluruhan aspek yang ada pada pasar seperti banyaknya jumlah suatu perusahaan dan berbagai jenis dari produk yang dijual yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku pasar dan kegiatan operasional perusahaan yang berada pada pasar tersebut.

2. Sukirno (2016)

Struktur pasar berisi mengenai jenis barang yang dihasilkan, banyak sedikitnya penjual dan pembeli, mudah tidaknya suatu

perusahaan baru memasuki pasar dan besarnya pengaruh perusahaan yang berkuasa dalam pasar.

3. Tri Kunawangsih (2006)

Struktur pasar menggambarkan keadaan suatu pasar yang membahas berbagai aspek seperti banyak sedikitnya penjual dan pembeli, hambatan untuk masuk dan keluar pasar, keberagaman produk yang diperjualbelikan, sistem penyaluran barang dan tingkat penguasaan pasar yang memberikan pengaruh cukup penting terhadap perilaku usaha dan kinerja dalam pasar.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pasar berkaitan dengan harga yang akan diperoleh pembeli melalui proses tawar menawar dan akan mempengaruhi tingkat efisiensi pasar. Jumlah pelaku yang makin banyak di pasar, maka makin tinggi tingkat kompetisi atau persaingan dalam pasar. Pasar juga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas jual beli antara konsumen dan produsen.

Berikut adalah beberapa faktor yang berperan dalam struktur pasar antara lain:

1. Jumlah pelaku pasar
2. Sifat atau jenis barang diperjualbelikan
3. Hambatan yang berpengaruh terhadap sulit tidaknya perusahaan masuk ke dalam pasar
4. Elastisitas permintaan akan suatu produk
5. Lokasi pasar
6. Tingkat penguasaan terhadap teknologi
7. Tingkat efisiensi pasar yang ditentukan oleh kemampuan penjual atau pembeli
8. Informasi yang dimiliki penjual dan pembeli berkaitan dengan pasar yang akan dihadapi.

B. Fungsi Pasar

Struktur pasar berkaitan dengan aktivitas pasar. Maka perlu dipahami bahwa pasar sebagai suatu tempat berlangsungnya penjualan atau pembelian yang berlangsung pada waktu tertentu. Menurut Awaluddin dan Wijayati (2019), fungsi pasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tempat pembentukan harga
Harga yang terbentuk di pasar berasal dari interaksi tawar menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli sehingga menghasilkan harga yang disepakati atas nilai barang tersebut
2. Distribusi
Pasar memberikan kemudahan bagi produsen dalam melakukan kegiatan pendistribusian suatu barang secara langsung kepada konsumen atau pembeli
3. Promosi
Pasar dapat menjadi tempat bagi produsen dalam rangka memperkenalkan barangnya kepada konsumen

C. Bentuk Struktur Pasar

Menurut Case & Fair (2008) struktur pasar berdasarkan faktor yang mendukungnya yaitu pasar persaingan sempurna serta pasar persaingan tidak sempurna yang terbagi atas pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli.

1. Struktur Pasar Persaingan Sempurna

Struktur pasar ini paling ideal dibanding dstruktur pasar yang lain. Hal ini dikarenakan sistem pasar pada jenis struktur ini memberikan jaminan terbentuknya efisiensi yang optimal dalam kegiatan memproduksi suatu barang dan jasa. Dalam struktur pasar ini, penjual di dalam pasar saling menjual barang dengan jenis yang sama sehingga harga barang yang dijual tidak saling bersaing satu dengan yang lain.

Mekanisme dari struktur pasar ini berasal dari tawar menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli sehingga menciptakan harga dalam pasar. Berikut adalah ciri dari struktur pasar persaingan sempurna:

- a) Memiliki penjual dan pembeli dalam jumlah yang banyak
- b) Barang yang diperjualbelikan adalah homogen
- c) Produsen dapat secara mudah keluar dari pasar atau masuk ke pasar karena terdapat banyak produsen
- d) Produsen sebagai *price taker*. Penjual tidak berkuasa sama sekali dalam penentuan harga, karena penjual hanya sebagian kecil dari

keseluruhan yang ada dalam pasar dan juga produk yang dihasilkan memiliki karakteristik yang sama dengan produsen lainnya.

- e) Harga yang terbentuk berasal dari tawar menawar antara penjual dan pembeli
- f) Kondisi pasar diketahui oleh penjual dan pembeli
- g) Promosi dan iklan kurang efektif karena pembeli sudah tahu kesamaan barang yang dipasarkan dengan barang lain

Pada pasar persaingan sempurna mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dari struktur pasar persaingan sempurna:

- a) Terciptanya efisiensi sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan secara normal dalam jangka waktu yang panjang melalui biaya produksi yang minim
- b) Informasi yang ada di pasar meminimalkan kecurangan di pasar sehingga aturan dan prosedur yang ada harus dipatuhi oleh semua orang
- c) Harga tidak dapat dikendalikan oleh satu penjual maupun satu pembeli saja sehingga harga cenderung stabil
- d) Masyarakat memudahkan dalam mengkonsumsi barang karena tidak perlu waktu yang banyak untuk tawar menawar harga barang atau memilih kualitas barang

Sedangkan kelemahan dari struktur pasar persaingan sempurna ini yaitu:

- a) Penelitian dan pengembangan produk tidak dapat dilakukan karena ketidaktersediaan dana dan minim motivasi karena kesamaan produk yang ditawarkan
- b) Pembeli memiliki keterbatasan untuk memilih karena barang yang dijual hampir sama maka akan ada perebutan pembeli sehingga terjadi ketidakmerataan hasil oleh produsen
- c) Penghematan mengakibatkan rendahnya gaji dan upah yang diberikan pada karyawannya

2. Struktur Pasar Monopoli

Struktur pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang memiliki kuasa atas kegiatan produksi, pemasaran dan penggunaan barang dan jasa.

Tingkat keuntungan pada pasar monopoli adalah melebihi normal. Hal ini dikarenakan besarnya hambatan yang diperoleh kepada perusahaan-perusahaan yang memasuki pasar tersebut.

Menurut pendapat Burhan (2006), perusahaan monopolis dapat bertahan dengan status yang dimiliki dalam pasar bergantung pada sulit atau mudahnya perusahaan potensial untuk masuk ke pasar (*barriers to entry*). Semakin kuat *barriers to entry* maka suatu perusahaan dalam pasar monopoli akan dapat mempertahankan dalam jangka waktu lama. Namun demikian, semakin lemah *barriers to entry* maka akan dengan mudah berbagai perusahaan baru muncul menjadi pesaingnya.

Selain itu harga produk dalam pasar ini ditentukan secara monopolis atau oleh penjual (Sukirno, 2016). Perusahaan yang terdapat dalam pasar monopoli dapat menaik turunkan harga yang berlaku di pasar karena perusahaan dapat menentukan secara mudah jumlah produk yang akan dihasilkan. Banyaknya jumlah barang yang diproduksi, akan mengakibatkan harga barang menjadi semakin lebih murah, sedangkan sedikitnya jumlah barang yang diproduksi akan mengakibatkan harga barang tersebut semakin mahal.

Tabel 6.1 Kelebihan dan Kekurangan Pasar Monopoli

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Biaya produksi yang dikeluarkan lebih murah serta tingkat produksi atas barang yang dihasilkan juga lebih besar	Pembeli tidak dapat memilih barang yang akan dibeli karena tidak tersedia pilihan lainnya
2	Adanya upaya menekan biaya produksi melalui dorongan pengembangan teknologi dan juga inovasi	Tidak terdapat pemerataan pendapatan karena laba hanya bisa dinikmati oleh perusahaan tunggal
3	Peningkatan mutu barang dan penurunan harga barang apabila perusahaan membuat	Daya beli masyarakat tidak dihiraukan dalam penentuan harga jual produk sehingga

	pembaharuan dalam hal teknologi dan juga inovasi	dapat dikatakan terjadi eksploitasi kepada pembeli
4	Masyarakat bisa merasakan kesejahteraan apabila barang yang dihasilkan pada pasar monopoli lebih murah dan bermutu	
5	Keuntungan penjual cukup tinggi dengan menerapkan sistem penjualan dengan perbedaan harga yang terjadi pada dua pasar berbeda atau biasa disebut dengan istilah diskriminasi harga	

Berikut beberapa faktor yang membentuk pasar monopoli, yaitu:

- Bahan mentah yang bersifat potensial dan strategis serta teknik untuk memproduksi barang dikuasai oleh produsen unggul
- Pemerintah memberikan izin terkait penetapan kebijakan perdagangan terhadap kepemilikan hak penjualan kepada produsen tunggal
- Aktivitas pasar dan kegiatan penyaluran atau distribusi produk yang dibatasi
- Besarnya investasi yang dilakukan di awal sehingga membatasi pembentukan harga
- Produsen dapat membuat kebijakan terkait limitasi harga

D. Pasar Monopolistik

Merupakan struktur pasar yang di dalamnya memiliki penjual dengan jumlah tidak sedikit dengan menghasilkan barang dan menjualnya dengan jenis dan karakteristik berbeda. Pasar yang bersifat monopolistik memiliki posisi antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli.

Berdasarkan pendapat Burhan (2006) struktur pasar yang bersifat monopolistik menunjukkan kondisi yang bersifat wajar karena

banyaknya perusahaan di dalamnya yang memproduksi barang yang berbeda-beda, akan tetapi secara sifat bisa saling menggantikan.

Pasar monopolistik juga memiliki karakteristik yang menyerupai pasar yang bersifat persaingan sempurna, kecuali produk yang dihasilkan bersifat heterogen. Pasar monopolistik memiliki keuntungan bahwa sebagai akibat dari produk yang dijual bersifat heterogen, sehingga konsumen lebih memiliki loyalitas terhadap suatu produk yang dihasilkan dari pasar tersebut.

Dalam pelaksanaan aktivitasnya pasar monopolistik terdapat banyak perusahaan yang berpartisipasi tanpa adanya batasan memasuki pasar serta karena barang yang dihasilkan bersifat heterogen sehingga perusahaan-perusahaan baru lebih memiliki kebebasan memasuki pasar. Pasar monopolistik dicontohkan restoran yang menjual *fast food* seperti KFC, McDonalds, dan perusahaan lainnya yang menjual *fried chicken*.

Berikut adalah karakteristik dari pasar monopolistik, yaitu:

1. Penjual dan pembeli di pasar ini berjumlah banyak, namun tidak sebanyak jumlah penjual dan pembeli di pasar persaingan sempurna
2. Barang yang dihasilkan dalam pasar memiliki fungsi utama yang sama namun tetap ada perbedaannya
3. Perusahaan-perusahaan lain memiliki kemudahan untuk memasuki pasar dan juga keluar pasar
4. Kekuasaan untuk mempengaruhi harga cukup sulit dilakukan perusahaan didalamnya
5. Aktivitas pemasaran atau promosi dalam bentuk iklan sangat diperlukan

Tabel 6.2 Kelebihan dan Kekurangan Pasar Monopolistik

No	Kelebihan	Kekurangan
1.	Produk yang dihasilkan memiliki perbedaan corak	Efisiensi aktivitas yang terjadi di dalamnya tidak sebesar dengan yang terjadi pada pasar persaingan sempurna dikarenakan tingginya harga barang dan jumlah barang yang diproduksi tergolong rendah
2.	Distribusi atas pendapatan yang diperoleh tidak rata	Kurang melakukan pembaharuan dalam bidang teknologi dan inovasi

E. Pasar Oligopoli

Struktur pasar ini menyerupai pasar monopoli murni dengan terdapat beberapa perusahaan atau produsen yang bersifat dominan. Menurut Burhan (2006), dalam pasar oligopoli perilaku perusahaan cenderung memperlihatkan persaingan yang ketat. Maka dari itu, seringkali sebelum menentukan keputusan atau cara yang akan diambil, perusahaan akan secara hati-hati dalam memperhitungkan dan mengantisipasi reaksi yang akan ditunjukkan oleh para pesaingnya.

Dalam pasar oligopoli, perusahaan dapat mengambil keputusan seberapa banyak produk yang akan diproduksi akan mempengaruhi penentuan besarnya harga. Perusahaan dalam pasar oligopoli akan memprediksi jumlah barang yang diminta berdasarkan atas reaksi para pesaingnya terhadap harga yang dirubah.

Pasar oligopoli terbagi menjadi pasar yang bersifat oligopoli murni (*pure oligopoly*) dan pasar yang bersifat oligopoli dengan pembeda (*differentiated oligopoly*). Pasar oligopoli murni memperjualbelikan barang yang bersifat identik, contohnya perusahaan yang memproduksi air minum mineral. Pasar oligopoli dengan pembedaan dimana barang yang diperjualbelikan bisa dibedakan, misalnya

perusahaan yang menghasilkan kendaraan motor roda dua di Indonesia seperti Honda, Yamaha dan Suzuki.

Berikut adalah ciri-ciri dari pasar oligopoly, yaitu:

- 1. Perusahaan yang didalamnya jumlahnya sedikit
- 2. Produk yang dihasilkan bisa bersifat standar (homogen) atau yang memiliki perbedaan karakteristik (terdeferensiasi)
- 3. Kekuasaan dalam penentuan harga pada suatu waktu tertentu dapat bersifat lemah ataupun tangguh
- 4. Aktivitas pemasaran atau promosi melalui iklan perlu dilakukan
- 5. Perusahaan lain dimungkinkan dapat masuk pasar tetapi tidak mudah
- 6. Kompetisi bersifat non harga

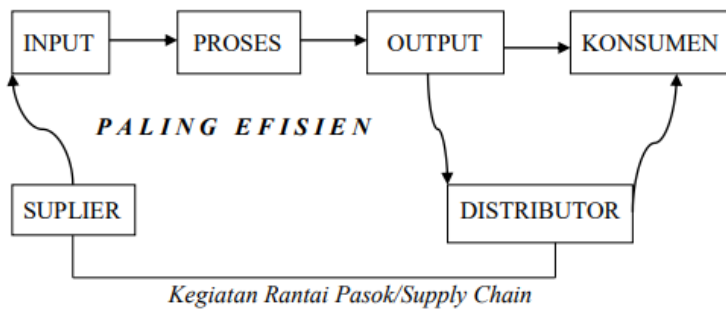
Tabel 6.3 Kelebihan dan Kekurangan Pasar Oligopoli

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Penjual berjumlah tidak banyak karena biaya investasi yang dibutuhkan besar	Efisiensi produk dengan tingkat rendah
2	Proses pengembangan produk diimbangi dengan kemajuan teknologi	Ada kemungkinan eksploitasi
3	Penjual memiliki keleluasaan menentukan harga	Antar produsen satu dengan yang lain saling berperang dalam hal harga
4	Keuntungan dapat diperoleh secara lebih	Aktivitas antar produsen yang saling bekerjasama (kartel) akan membuat konsumen rugi

F. Perilaku Produsen

Teori Perilaku Produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien.

Secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter- karakter yang melekat padanya



Gambar 6.1 Alur Produksi

Permasalahan produksi akan berpengaruh dalam faktor penjualan, karena kendala dalam penjualan adalah bagaimana cara suatu perusahaan memproduksi barang tersebut. Biasanya kendala dalam produksi itu adalah kekurangan bahan mentah dan bahan pendukung untuk di olah, karena setiap memproduksi barang, perusahaan harus tahu dan mengerti keseimbangan bahan mentah agar bahan mentah tidak kekurangan bahan pendukung (manajemen logistik dan rantai pasok/supply chain management).

G. Faktor Produksi

Faktor-faktor produksi (sumber-sumber daya) merupakan benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Berikut adalah beberapa faktor produksi, yaitu:

1. Tanah dan Sumber Alam

Faktor produksi yang disediakan alam, meliputi: tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan dan sumber alam lainnya yang dapat dijadikan modal.

2. Tenaga Kerja

Faktor produksi berupa tenaga kerja ini adalah manusia/SDM yang mempunyai keahlian dan ketrampilan yang dibedakan 3 golongan, yaitu:

- a) Tenaga kerja kasar, adalah tenaga yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan (contoh: tukang sapu jalan, kuli bangunan dll)
- b) Tenaga kerja terampil, adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja (contoh: montir mobil, tukang kayu, perbaikan TV dan lain-lain).
- c) Tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu (contoh: dokter, akuntan insinyur, dan lain-lain).

3. Modal

Faktor produksi berupa benda yang diciptakan manusia akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan (contoh: bangunan pabrik, mesin-mesin dan peralatan pabrik, alat-alat angkutan, dan lain-lain).

4. Skill

Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan usaha untuk mendirikan dan mengembangkan keterampilan berupa benda yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan.

Pengertian *skills* antara lain:

- a) *Managerial skills* atau *entrepreneurial skills*. Kemampuan untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan sebaik baiknya
- b) *Technological skills*. Berhubungan dengan keahlian yang khusus bersifat ekonomis teknis yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan produksi.
- c) *Organizational skills*. Kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha. Hal ini bertalian dengan hal-hal didalam lingkungan sebuah perusahaan (hal-hal intern dari perusahaan) maupun dengan kegiatan-kegiatan di dalam rangka masyarakat seperti usaha menyusun koperasi, bank-bank dsb.

Dalam teori ekonomi, setiap proses produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu

fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga produk. Jadi fungsi produksi adalah model matematis yang menunjukkan hubungan antara jumlah input-an produksi yang dipakai dengan jumlah output barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi.

Dalam ekonomi mikro dalam membentuk fungsi produksi, biasanya hubungan matematis penggunaan faktor produksi disederhanakan dalam dua faktor produksi, yaitu:

1. *One input variable*

$$Q = f(L)$$

2. *Two input variable*

$$Q = f(L, K)$$

Dimana:

Q = tingkat output

K = *Capital* / barang modal

L = *Labour* (tenaga kerja)

Referensi

- Burhan, M. Umar. (2006). Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro. Malang: BPFE Unibraw
- Kunawangsih, Tri dan Antyo Pracoyo. (2006). Aspek Dasar Ekonomi Mikro. Jakarta: PT Grasindo
- Lipsey, Steiner dan Douglas. (1990). Pengantar Mikroekonomi. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Mankiw N. Grogery. (2020). Principles Of Economics, 9E, Cengage Learning, Inc., Boston, MA, 2021
- Sukirno, Sadono. (2016). Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tati Suhartati Joesron, M.Fathorrazi. (2012). Teori Ekonomi Mikro. Yogyakarta: Graha Ilmu

Profil Penulis



Ria Puspitasari, S.S.T., ME

Merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang sekaligus praktisi perbankan. Sebelumnya mengikuti pendidikan program S1 dan S2 di Universitas Trisakti, Jakarta. Penulis mengampu mata kuliah Anggaran Perusahaan, *Good Corporate Governance*, Etika Bisnis Syariah, Manajemen Investasi, Ekonomi Mikro, Ekonomi

Makro, Manajemen Keuangan, Statistik Bisnis 1 dan Manajemen Operasional.

Selain mengampu mata kuliah, penulis juga turut serta dalam kolaborasi penulisan buku dengan dosen dari berbagai universitas, dimana buku yang sudah dihasilkan oleh penulis antara lain Manajemen pemasaran modern, *Welcoming To 5.0 Industry Management*, Sistem Pengendalian Manajemen Berbasis Risiko, Pengantar Ekonomi Digital, Prinsip Dasar Etika Ekonomi, Manajemen Perubahan, Manajemen UMKM Terpadu dan *Good Corporate Governance*.

Teori Pendapatan Nasional

Oleh: Humairoh

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Teoris pendapatan nasional, yang juga dikenal sebagai teori ekonomi makro, adalah konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah secara keseluruhan. Teori ini meneliti berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penciptaan dan distribusi pendapatan nasional, termasuk pendapatan pribadi, pendapatan perusahaan, dan pendapatan pemerintah. Ekonom dan pembuat kebijakan menggunakan estimasi pendapatan nasional untuk berbagai tujuan, seperti mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi, menilai kelayakan langkah-langkah yang diusulkan, dan memahami dampak faktor-faktor seperti perpajakan, perdagangan, dan konflik bersenjata terhadap kekayaan negara (Kuznets, 1940).

A. Definisi Pendapatan Nasional

Berikut adalah beberapa definisi Pendapatan Nasional dari berbagai ahli:

1. Menurut Marshall, Pendapatan Nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama satu tahun. Pendapatan ini berasal dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tersebut.
2. Simon Kuznets mendefinisikan Pendapatan Nasional sebagai jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, diukur

berdasarkan harga pasar, dan digunakan untuk konsumsi serta akumulasi selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun.

3. J.M. Keynes menyatakan bahwa Pendapatan Nasional adalah jumlah total dari pendapatan yang diterima oleh seluruh individu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian, termasuk pendapatan dari tenaga kerja, modal, dan tanah dalam periode tertentu.
4. Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus mendefinisikan Pendapatan Nasional sebagai total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Ini mencerminkan aktivitas ekonomi total dan standar hidup di negara tersebut.
5. Richard Lipsey mendefinisikan Pendapatan Nasional sebagai total pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara dari aktivitas produksi mereka, baik dalam bentuk upah, laba, bunga, maupun sewa. Pendapatan ini digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan ekonomi suatu negara.
6. Kuznets Pendapatan nasional dapat didefinisikan sebagai nilai total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam batas-batas suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Ini termasuk pendapatan yang diperoleh oleh warga negara dan bukan warga negara yang tinggal di dalam negara tersebut.
7. Gregory Mankiw berpendapat bahwa pendapatan nasional adalah akumulasi pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara melalui kegiatan produksi barang dan jasa

Terlepas dari definisi spesifiknya, ada benang merah dalam pemahaman pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi dan produktivitas keseluruhan suatu negara atau wilayah. Konsep pendapatan nasional terkait erat dengan gagasan keberlanjutan, karena penting untuk mempertimbangkan penipisan sumber daya alam dan lingkungan saat mengukur kekayaan sejati suatu negara.

B. Teori Pendapatan Nasional

Beberapa teori yang bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor utama dan proses dinamis yang memengaruhi tingkat pendapatan nasional secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Teori-teori ini memberikan berbagai perspektif tentang mekanisme dan pendorong

kompleks yang membentuk pendapatan nasional dan kinerja ekonomi suatu negara.

1. Teori Klasik

Ekonom klasik, seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus, mengembangkan teori komprehensif pendapatan nasional yang menekankan peran penting faktor-faktor sisi penawaran dalam menentukan tingkat output dan pendapatan dalam suatu perekonomian. Mereka berpendapat bahwa ketersediaan dan produktivitas faktor-faktor produksi, khususnya tenaga kerja dan modal, merupakan pendorong utama pendapatan nasional. Teori klasik berpendapat bahwa perekonomian secara alami akan cenderung menuju keadaan lapangan kerja penuh, dengan setiap penyimpangan dari keseimbangan ini bersifat sementara dan dapat diperbaiki sendiri melalui mekanisme harga.

Teori klasik pendapatan nasional juga mengakui pentingnya pembagian kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi dalam meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Faktor-faktor ini dipandang sebagai pendorong utama yang dapat meningkatkan tingkat output dan pendapatan nasional secara signifikan. Pembagian kerja memungkinkan spesialisasi dan efisiensi yang lebih besar dalam produksi, sementara akumulasi modal menyediakan sumber daya dan alat yang diperlukan untuk memperluas kapasitas produksi. Selain itu, pengembangan dan adopsi teknologi baru dipandang penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong keseluruhan output ekonomi, yang pada akhirnya mengarah pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi.

Teori klasik juga menekankan peran penting tabungan dan investasi dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Teori ini berpendapat bahwa tabungan akan secara otomatis dan sepenuhnya diinvestasikan, yang mengarah pada tingkat pendapatan nasional yang seimbang. Menurut pandangan klasik, tabungan dianggap sebagai suatu keutamaan, karena tabungan menyediakan modal yang diperlukan untuk investasi dan perluasan kapasitas produksi ekonomi. Proses ini diyakini menghasilkan keseimbangan yang dapat mengoreksi diri

sendiri, di mana pendapatan nasional akan dimaksimalkan dan dipertahankan pada tingkat kesempatan kerja penuh.

a) Konsep Keseimbangan Pasar

Teori klasik pendapatan nasional didasarkan pada konsep keseimbangan pasar, di mana penawaran dan permintaan barang dan jasa seimbang. Keseimbangan ini dicapai melalui mekanisme harga, di mana harga menyesuaikan diri untuk memastikan bahwa jumlah yang dipasok sama dengan jumlah yang diminta. Menurut pandangan klasik, ekonomi secara alami akan cenderung ke arah keadaan kesempatan kerja penuh ini, dengan setiap penyimpangan dari keseimbangan bersifat sementara dan dapat diperbaiki sendiri. Harga dan upah diasumsikan fleksibel, yang memungkinkan pasar untuk membersihkan dan mempertahankan tingkat output dan kesempatan kerja penuh.

Asumsi teori klasik ini telah ditentang oleh teori Keynesian, yang berpendapat bahwa ekonomi dapat mengalami setengah pengangguran atau pengangguran yang terus-menerus dan bahwa intervensi pemerintah mungkin diperlukan untuk memulihkan kesempatan kerja penuh. Pandangan Keynesian menolak asumsi klasik tentang penyelesaian pasar otomatis dan kesempatan kerja penuh, yang menyatakan bahwa ekonomi dapat terjebak dalam keadaan keseimbangan setengah pengangguran di mana permintaan agregat tidak cukup untuk mendukung kesempatan kerja penuh. Keynes percaya bahwa dalam situasi seperti itu, kebijakan pemerintah seperti langkah-langkah fiskal dan moneter diperlukan untuk meningkatkan permintaan agregat dan merangsang aktivitas ekonomi untuk mencapai kesempatan kerja penuh.

b) Peran Penawaran dan Permintaan

Teori klasik pendapatan nasional menekankan peran penting penawaran dan permintaan dalam menentukan tingkat *output* dan pendapatan nasional. Menurut teori ini, tingkat pendapatan nasional terutama ditentukan oleh ketersediaan dan produktivitas faktor-faktor produksi, khususnya tenaga kerja dan modal. Para ekonom klasik percaya bahwa ekonomi secara alami akan cenderung menuju

keadaan kesempatan kerja penuh, dengan setiap penyimpangan dari keseimbangan ini bersifat sementara dan dapat diperbaiki sendiri melalui mekanisme harga. Mereka berpendapat bahwa pembagian kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi merupakan pendorong utama yang dapat secara signifikan meningkatkan tingkat output dan pendapatan nasional (Dutt, 2006).

2. Teori Keynesian

Teori pendapatan nasional Keynesian, yang dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes, menawarkan perspektif yang sangat berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat pendapatan nasional dibandingkan dengan teori ekonomi klasik. Sementara teori klasik menekankan faktor-faktor sisi penawaran, seperti ketersediaan dan produktivitas faktor-faktor produksi, teori Keynesian berfokus pada peran permintaan agregat dalam menentukan tingkat pendapatan nasional.

Sedangkan teori pendapatan nasional klasik menekankan faktor-faktor sisi penawaran, seperti ketersediaan dan produktivitas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal, teori Keynesian berfokus pada peran permintaan agregat dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Keynes berpendapat bahwa ekonomi dapat mengalami pengangguran atau kekurangan pekerjaan yang terus-menerus, dan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter mungkin diperlukan untuk merangsang permintaan agregat dan memulihkan tingkat output dan pekerjaan penuh.

Menurut teori Keynesian, tingkat pendapatan nasional terutama ditentukan oleh keputusan pengeluaran konsumen, bisnis, dan pemerintah. Keynes berpendapat bahwa perekonomian dapat mengalami pengangguran atau kekurangan lapangan kerja yang terus-menerus, dan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter mungkin diperlukan untuk merangsang permintaan agregat dan memulihkan tingkat output dan lapangan kerja penuh. Teori Keynesian menekankan peran penting permintaan agregat dalam menentukan tingkat pendapatan nasional, berbeda dengan fokus utama teori klasik pada faktor-faktor sisi penawaran seperti ketersediaan dan

produktivitas faktor-faktor produksi. Keynes berpendapat bahwa perekonomian dapat mengalami kekurangan lapangan kerja atau pengangguran yang terus-menerus, dan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter mungkin diperlukan untuk merangsang permintaan agregat dan memulihkan tingkat output dan lapangan kerja penuh. Hal ini menandai perbedaan mendasar antara perspektif Keynesian dan klasik tentang pendorong utama pendapatan nasional.

a) Pengaruh Pengeluaran Agregat

Teori Keynesian menyatakan bahwa tingkat pendapatan nasional terutama ditentukan oleh tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian, yang meliputi konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Menurut Keynes, jika tingkat pengeluaran total oleh konsumen, bisnis, dan pemerintah tidak cukup untuk membeli tingkat output kesempatan kerja penuh, perekonomian akan mengalami resesi atau depresi. Keynes berpendapat bahwa mekanisme pasar saja tidak cukup untuk memastikan kesempatan kerja penuh dan menjaga stabilitas ekonomi. Ia percaya bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter, seperti pengeluaran defisit dan kebijakan moneter ekspansif, mungkin diperlukan untuk merangsang permintaan agregat dan memulihkan perekonomian ke tingkat output dan kesempatan kerja penuh. Keynes menekankan peran penting pemerintah dalam mendorong stabilitas ekonomi dan kesempatan kerja penuh, karena mekanisme pasar mungkin gagal untuk secara otomatis memperbaiki ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang dapat menyebabkan pengangguran atau kekurangan pekerjaan yang terus-menerus.

b) Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi

Teori Keynesian menekankan peran penting intervensi pemerintah dalam mendorong stabilitas ekonomi dan kesempatan kerja penuh. Keynes berpendapat bahwa tanpa kebijakan pemerintah yang aktif, ekonomi dapat mengalami pengangguran atau kekurangan pekerjaan yang terus-menerus, karena mekanisme pasar saja

mungkin gagal untuk secara otomatis memperbaiki ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Menurut pandangan Keynesian, kebijakan pemerintah seperti langkah-langkah fiskal dan moneter diperlukan untuk merangsang permintaan agregat dan memulihkan ekonomi ke tingkat output dan kesempatan kerja penuh. Keynes percaya bahwa intervensi pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, berbeda dengan ketergantungan teori ekonomi klasik pada sifat pasar yang dapat mengoreksi diri sendiri.

Teori Keynesian memiliki pengaruh yang signifikan dan bertahan lama pada kebijakan ekonomi, dengan banyak pemerintah di seluruh dunia mengadopsi kebijakan seperti pengeluaran defisit dan kebijakan moneter ekspansif dalam upaya untuk merangsang permintaan agregat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Keynes berpendapat bahwa mekanisme pasar saja tidak selalu mampu secara otomatis memulihkan tingkat output dan kesempatan kerja penuh, dan bahwa intervensi aktif pemerintah melalui tindakan fiskal dan moneter sering kali diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi.

3. Teori Moneteris

Teori moneteris tentang pendapatan nasional, yang dikembangkan oleh para ekonom seperti Milton Friedman, menekankan peran penting pasokan uang dan kebijakan moneter dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Menurut pandangan moneteris, perubahan dalam pasokan uang dapat berdampak langsung dan signifikan pada tingkat pendapatan nasional, dengan peningkatan pasokan uang yang mengarah pada pendapatan nasional yang lebih tinggi dan sebaliknya (Messaoudi et al., 2023). Moneteris berpendapat bahwa bank sentral dapat menggunakan alat kebijakan moneter, seperti menyesuaikan suku bunga atau pasokan uang, untuk memengaruhi tingkat pendapatan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori moneteris, tingkat pendapatan nasional terutama ditentukan oleh pasokan uang dan kecepatan uang, yang merupakan laju peredaran uang dalam perekonomian. Teori moneteris juga menekankan peran penting ekspektasi dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Monetaris berpendapat bahwa agen ekonomi, seperti konsumen dan bisnis, membentuk ekspektasi tentang arah kebijakan moneter di masa depan, termasuk keputusan bank sentral mengenai suku bunga, pasokan uang, dan alat kebijakan lainnya. Ekspektasi ini dapat berdampak signifikan pada keputusan pengeluaran dan investasi agen ekonomi ini. Misalnya, jika agen mengharapkan bank sentral untuk mengejar kebijakan moneter ekspansif, mereka dapat meningkatkan konsumsi dan investasi mereka, yang mengarah pada permintaan agregat dan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika agen mengharapkan kebijakan moneter kontraksioner, mereka dapat mengurangi pengeluaran dan investasi mereka, yang melemahkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Jadi, menurut pandangan moneteris, pembentukan ekspektasi oleh agen ekonomi merupakan penentu utama tingkat pendapatan nasional dalam perekonomian.

a) Hubungan antara Uang dan Pendapatan

Teori moneteris mengemukakan hubungan langsung dan kausal antara jumlah uang beredar dan tingkat pendapatan nasional. Monetaris berpendapat bahwa perubahan jumlah uang beredar dapat berdampak langsung dan signifikan pada tingkat pendapatan nasional, dengan peningkatan jumlah uang beredar menyebabkan peningkatan yang sesuai pada tingkat pendapatan nasional, dan penurunan jumlah uang beredar mengakibatkan penurunan pendapatan nasional. Menurut perspektif moneteris, bank sentral dapat menggunakan alat kebijakan moneter, seperti menyesuaikan suku bunga atau jumlah uang beredar, untuk secara aktif memengaruhi tingkat pendapatan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Friedman dan monetaris lainnya berpendapat bahwa bank sentral dapat secara aktif menggunakan alat kebijakan moneter, seperti menyesuaikan suku bunga atau jumlah uang beredar, untuk secara

langsung memengaruhi dan memanipulasi tingkat pendapatan nasional. Mereka percaya bahwa dengan menerapkan kebijakan moneter ekspansif atau kontraksioner, bank sentral dapat secara efektif merangsang atau meredam permintaan agregat, dan dengan demikian mendorong atau memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti yang diinginkan.

Teori moneteris menekankan peran penting ekspektasi dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kaum moneteris berpendapat bahwa agen ekonomi, seperti konsumen dan bisnis, membentuk ekspektasi tentang arah kebijakan moneter di masa mendatang, termasuk keputusan bank sentral mengenai suku bunga, pasokan uang, dan perangkat kebijakan lainnya. Ekspektasi ini dapat berdampak signifikan pada keputusan pengeluaran dan investasi para agen ekonomi ini. Misalnya, jika agen mengharapkan bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter ekspansif, mereka dapat meningkatkan konsumsi dan investasi mereka, yang mengarah pada permintaan agregat dan pendapatan nasional yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika agen mengharapkan kebijakan moneter kontraksif, mereka dapat mengurangi pengeluaran dan investasi mereka, yang melemahkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Jadi, menurut pandangan kaum moneteris, pembentukan ekspektasi oleh agen ekonomi merupakan penentu utama tingkat pendapatan nasional dalam perekonomian.

b) Inflasi dan Pendapatan Nasional

Teori moneteris juga menekankan hubungan erat antara inflasi dan tingkat pendapatan nasional. Kaum moneteris berpendapat bahwa inflasi terutama merupakan fenomena moneter, yang didorong oleh pertumbuhan pasokan uang. Menurut pandangan monetaris, bank sentral dapat menggunakan berbagai alat kebijakan moneter, seperti menyesuaikan suku bunga atau mengendalikan jumlah uang beredar, untuk mengendalikan laju inflasi secara efektif dan mendorong stabilitas ekonomi. Dengan memanipulasi jumlah uang beredar secara aktif, bank sentral dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, dengan perluasan jumlah uang beredar yang mengarah pada pendapatan nasional yang lebih tinggi dan

sebaliknya. Moneteris percaya bahwa bank sentral memiliki kemampuan untuk secara langsung mengelola tingkat pendapatan nasional melalui keputusan kebijakan moneterinya, yang dapat berdampak signifikan pada kinerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berbagai teori pendapatan nasional menawarkan perspektif yang berbeda-beda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat pendapatan nasional. Teori moneteris, yang dikembangkan oleh para ekonom seperti Milton Friedman, menekankan peran penting jumlah uang beredar dan kebijakan moneter dalam memengaruhi pendapatan nasional (Gordon, 1975). Sebaliknya, model pertumbuhan Solow berfokus pada penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan populasi (Zarabozo, 2021)(Messaoudi et al., 2023) (Chaitip et al., 2015).

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi, yang dikembangkan oleh ekonom seperti Robert Solow, berfokus pada faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini menekankan peran penting faktor-faktor seperti akumulasi modal fisik dan manusia, kemajuan teknologi, dan perubahan ukuran dan komposisi populasi dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi dalam jangka panjang.

a) Model Solow

Model pertumbuhan Solow, yang dikembangkan oleh ekonom terkenal Robert Solow, adalah model pertumbuhan ekonomi yang banyak digunakan dan berpengaruh yang menekankan peran penting beberapa faktor utama dalam menentukan tingkat pendapatan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Model tersebut menyoroti pentingnya akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan populasi sebagai pendorong utama pertumbuhan dan kemajuan ekonomi.

Menurut model pertumbuhan Solow, tingkat pendapatan nasional ditentukan oleh interaksi dan interaksi tiga faktor utama: tingkat

modal fisik, ukuran dan kualitas tenaga kerja, dan tingkat kemajuan teknologi dalam perekonomian. Model tersebut juga menekankan peran penting tabungan dan investasi dalam menentukan tingkat stok modal, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara khusus, model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi mengarah pada akumulasi modal fisik yang lebih besar, yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan berkontribusi pada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Model pertumbuhan Solow memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi, dengan banyak pemerintah mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam modal fisik, seperti mesin dan infrastruktur, serta mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Selain itu, kebijakan yang difokuskan pada peningkatan modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengelolaan pertumbuhan populasi, telah dilaksanakan berdasarkan wawasan yang diberikan oleh model pertumbuhan Solow ((Jones & Manuelli, 1995).

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Model pertumbuhan Solow mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk:

1. Modal fisik: Akumulasi dan investasi dalam modal fisik, seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan kapasitas produksi ekonomi, investasi dalam modal fisik dapat berkontribusi pada tingkat output, pendapatan, dan ekspansi ekonomi secara keseluruhan yang lebih tinggi.
2. Modal manusia: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas tenaga kerja, yang mengarah pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran secara keseluruhan yang lebih tinggi. Dengan mengembangkan modal manusia suatu masyarakat

melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, kapasitas produktif dan potensi inovatif tenaga kerja dapat ditingkatkan secara signifikan, yang mendorong perluasan ekonomi dan mendorong peningkatan standar hidup.

3. Kemajuan teknologi: Kemajuan teknologi dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal, yang mengarah pada tingkat pertumbuhan dan hasil ekonomi yang lebih tinggi. Inovasi dalam bidang-bidang seperti otomatisasi, teknologi digital, dan terobosan ilmiah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi, yang memungkinkan bisnis dan industri menghasilkan lebih banyak hasil dengan lebih sedikit masukan. Kemajuan teknologi ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan memacu perluasan ekonomi, yang berkontribusi pada pendapatan nasional yang lebih tinggi dan peningkatan standar hidup.
4. Pertumbuhan populasi dan perubahan demografi: Variasi dalam ukuran, distribusi usia, dan komposisi keterampilan populasi dapat secara signifikan memengaruhi ukuran dan kualitas angkatan kerja, yang pada gilirannya dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi yang cepat, misalnya, dapat meningkatkan populasi usia kerja dan memperluas pasokan tenaga kerja, yang berpotensi meningkatkan hasil ekonomi. Sebaliknya, populasi yang menua atau penurunan jumlah individu usia kerja dapat membatasi angkatan kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perubahan dalam pencapaian pendidikan dan tingkat keterampilan penduduk dapat mengubah produktivitas angkatan kerja, yang selanjutnya memengaruhi laju kemajuan ekonomi.

Secara keseluruhan, teori pertumbuhan ekonomi dan berbagai model yang telah dikembangkan, seperti model pertumbuhan Solow, memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor utama yang mendorong kemajuan ekonomi jangka panjang dan peningkatan pendapatan nasional. Model-model ini menekankan peran penting akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan dinamika

populasi dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan memahami interaksi dari pendorong-pendorong fundamental ini, para pembuat kebijakan dapat merancang strategi untuk mendorong investasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingkat kemakmuran nasional yang lebih tinggi.

C. Pentingnya Pendapatan Nasional dalam Ekonomi

Pendapatan nasional merupakan konsep yang penting dan memiliki banyak sisi dalam ilmu ekonomi, karena konsep ini memberikan ukuran yang komprehensif mengenai aktivitas ekonomi, kinerja, dan kesejahteraan suatu negara secara keseluruhan. Estimasi pendapatan nasional merupakan alat penting yang digunakan oleh para pembuat kebijakan, ekonom, dan masyarakat untuk mengevaluasi keadaan terkini dan lintasan jangka panjang suatu perekonomian. Ukuran-ukuran ini membantu menginformasikan keputusan dan intervensi penting yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Estimasi pendapatan nasional memiliki berbagai tujuan penting. Para pembuat kebijakan dan politisi sering kali memanfaatkan data pendapatan nasional untuk menilai kelayakan dan potensi konsekuensi dari berbagai kebijakan ekonomi, seperti perpajakan, tarif, dan regulasi upah dan laba. Informasi ini membantu menginformasikan proses pengambilan keputusan mereka dan memungkinkan mereka untuk lebih memahami potensi dampak pilihan kebijakan mereka terhadap lanskap ekonomi secara keseluruhan.

Para ekonom yang berpikiran empiris juga sangat bergantung pada statistik pendapatan nasional sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja dan efisiensi sistem ekonomi yang lebih luas. Metrik ini memberikan wawasan berharga tentang faktor-faktor yang memengaruhi kekayaan suatu negara dan dapat digunakan untuk menyimpulkan dampak berbagai kekuatan ekonomi terhadap kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Data pendapatan nasional sangat penting untuk memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dan fenomena sosial

lainnya. Mahasiswa yang mempelajari berbagai masalah sosial dapat menggunakan estimasi pendapatan nasional untuk menjelaskan cara faktor-faktor ekonomi berinteraksi dengan dan memengaruhi berbagai aspek organisasi dan penyesuaian sosial.

Pentingnya ukuran pendapatan nasional melampaui ranah ekonomi dan pembuatan kebijakan. Estimasi ini berfungsi sebagai kerangka acuan penting untuk memahami kelayakan dan kemungkinan konsekuensi dari berbagai intervensi dan kebijakan ekonomi. Lebih jauh lagi, angka pendapatan nasional digunakan sebagai titik acuan untuk menilai fungsi sistem ekonomi dan menganalisis dampak berbagai faktor terhadap kekayaan suatu negara (Asheim, 1997). Ekonom dapat berkonsultasi dengan data pendapatan nasional untuk mempelajari dinamika pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sementara mahasiswa masalah sosial lainnya dapat menggunakan data tersebut untuk memahami peran aktivitas ekonomi dalam membentuk organisasi sosial dan mengatasi tantangan masyarakat.

Pentingnya pendapatan nasional dalam ilmu ekonomi terletak pada kemampuannya untuk memberikan ukuran yang komprehensif atas kinerja ekonomi suatu negara, sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan, ekonom, dan masyarakat untuk membuat keputusan dan intervensi yang tepat guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

D. Komponen Pendapatan Nasional

Komponen pendapatan nasional terdiri dari pendapatan dari

1. Pendapatan nasional terdiri dari pendapatan dari berbagai faktor produksi, termasuk upah dan gaji yang diperoleh individu, sewa yang diterima dari kepemilikan tanah dan properti, bunga yang diperoleh dari aset keuangan, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, dan laba yang ditahan oleh bisnis.
2. Produk domestik bruto, yang mengukur total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam batas-batas suatu negara selama periode tertentu, merupakan komponen utama pendapatan nasional. PDB menangkap kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh warga negara, terlepas dari lokasi mereka, serta

pendapatan setelah pajak yang diterima oleh individu dan perusahaan, dan pajak bersih yang dipungut oleh pemerintah.

3. Pendapatan nasional bersih, yang merupakan total pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara, merupakan komponen utama pendapatan nasional. Pendapatan nasional bersih dihitung dari produk domestik bruto dan dikurangi depresiasi dan pajak tidak langsung, serta ditambah subsidi, untuk memperoleh pendapatan bersih yang diperoleh faktor-faktor produksi di dalam wilayah negara tersebut. Pendapatan nasional dan berbagai komponennya merupakan indikator ekonomi penting yang memungkinkan para pembuat kebijakan dan ekonom untuk mengevaluasi kesehatan ekonomi, produktivitas, dan standar hidup suatu negara secara keseluruhan.

E. Metode Pengukuran Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan indikator ekonomi yang penting, karena memberikan wawasan berharga tentang kesehatan ekonomi, produktivitas, tingkat ketenagakerjaan, dan standar hidup suatu negara secara keseluruhan. Dengan mengukur nilai moneter total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara, pendapatan nasional berfungsi sebagai metrik menyeluruh yang memungkinkan para pembuat kebijakan dan ekonom untuk menilai kinerja ekonomi negara, membandingkannya dengan negara lain, dan membuat keputusan yang tepat tentang kebijakan dan strategi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, perhitungan pendapatan nasional bukannya tanpa kerumitan. Akuntan pendapatan nasional harus dengan cermat menentukan apa yang harus dimasukkan dalam penghitungan akhir, karena beberapa kegiatan ekonomi mungkin sulit diukur atau mungkin tidak berkontribusi secara langsung terhadap kesejahteraan negara secara keseluruhan. Misalnya, penyertaan atau pengecualian kegiatan ekonomi informal tertentu, seperti pertanian subsisten atau pekerjaan rumah tangga, dapat berdampak signifikan pada angka pendapatan nasional akhir.

Ada tiga pendekatan utama yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional:

1. Pendekatan produksi, yang menghitung nilai moneter total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara selama periode tertentu, merupakan salah satu metode utama yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional. Pendekatan ini berfokus pada nilai tambah pada setiap tahap proses produksi, yang pada akhirnya menjumlahkan nilai pasar total dari semua produk dan jasa akhir untuk memperoleh angka pendapatan nasional.
2. Pendekatan pendapatan, yang menjumlahkan total pendapatan yang diperoleh oleh berbagai faktor produksi di dalam negara, termasuk upah dan gaji yang diperoleh oleh individu, sewa yang diterima dari kepemilikan tanah dan properti, bunga yang diperoleh dari aset keuangan, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, dan laba yang ditahan oleh bisnis.
3. Pendekatan pengeluaran, yang menghitung nilai moneter total dari semua barang dan jasa akhir yang diminta oleh berbagai pelaku ekonomi, termasuk konsumen yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi, bisnis yang berinvestasi dalam barang modal dan inventaris, dan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi dan investasi publik.

Masing-masing pendekatan ini secara teoritis akan menghasilkan angka pendapatan nasional yang sama, karena pendekatan-pendekatan tersebut mengukur aktivitas ekonomi yang sama dari perspektif yang berbeda. Pilihan metode pengukuran pada akhirnya bergantung pada ketersediaan dan keandalan data yang mendasarinya, serta kebutuhan spesifik dan kerangka analitis para pembuat kebijakan atau ekonom yang melakukan analisis pendapatan nasional.

F. Kebijakan Ekonomi dan Pendapatan Nasional

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua alat penting yang dapat digunakan pemerintah untuk memengaruhi tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal, yang melibatkan keputusan pemerintah tentang pengeluaran dan perpajakan, dapat berdampak signifikan pada pendapatan nasional. Dengan menyesuaikan pengeluaran dan perpajakan pemerintah, pembuat kebijakan dapat merangsang atau meredam permintaan agregat, sehingga memengaruhi tingkat keseluruhan aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional. Misalnya, kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak, dapat menyebabkan tingkat pengeluaran konsumen dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan pendapatan nasional.

Kebijakan moneter, di sisi lain, mengacu pada tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan moneter ekspansif, yang dicirikan oleh suku bunga yang lebih rendah dan peningkatan jumlah uang beredar, dapat merangsang investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya mengarah pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi.

Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat menjadi penentu penting pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dalam konteks integrasi global, kebijakan moneter yang terkoordinasi dengan baik dapat membantu mengendalikan pasokan uang dan mendukung aliran modal, sehingga berkontribusi pada dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup.

Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam memengaruhi pendapatan nasional dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan tantangan spesifik yang dihadapi suatu negara. Seperti yang disorot dalam sumber yang disediakan, dampak kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bantuan asing, investasi asing langsung, perdagangan, dan pengembangan sumber daya manusia.

G. Analisis Pendapatan Nasional dalam Konteks Global

1. Perbandingan Pendapatan Nasional antar Negara

Perbandingan pendapatan nasional antar negara merupakan upaya yang rumit dan memiliki banyak sisi, karena melibatkan pertimbangan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Tingkat pendapatan nasional sering digunakan sebagai proksi untuk kinerja ekonomi dan pembangunan suatu negara secara keseluruhan, tetapi penting untuk menyadari bahwa pendapatan nasional saja tidak memberikan gambaran lengkap tentang kesejahteraan atau kualitas hidup suatu negara.

Satu pertimbangan penting dalam membandingkan pendapatan nasional antar negara adalah konsep paritas daya beli. Pendekatan ini memperhitungkan perbedaan biaya hidup dan harga relatif barang dan jasa di berbagai negara, sehingga memungkinkan perbandingan standar hidup dan kesejahteraan ekonomi yang lebih akurat. Selain itu, komposisi pendapatan nasional, seperti kontribusi relatif dari berbagai sektor ekonomi, dapat memberikan wawasan berharga tentang struktur dan kekuatan dasar suatu ekonomi.

Lebih jauh lagi, distribusi pendapatan nasional di suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap kohesi sosial, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Selain faktor ekonomi, perbandingan pendapatan nasional antar negara juga harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan lingkungan yang lebih luas. Faktor-faktor seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya, serta status keberlanjutan lingkungan, dapat secara signifikan memengaruhi kualitas hidup dan pembangunan keseluruhan suatu negara.

2. Dampak Globalisasi terhadap Pendapatan Nasional

Globalisasi, meningkatnya keterkaitan ekonomi, perdagangan, dan masyarakat dunia, telah berdampak signifikan pada dinamika pendapatan nasional. Di satu sisi, globalisasi telah membuka peluang baru bagi negara-negara untuk berpartisipasi dalam pasar internasional, mengakses modal asing, dan memanfaatkan rantai pasokan global, yang dapat berkontribusi pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi. Seperti yang disorot dalam sumber yang disediakan, globalisasi telah menyebabkan peningkatan arus barang, modal, dan tenaga kerja lintas batas, serta pertukaran informasi, teknologi, dan pengetahuan manajemen. Faktor-faktor ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada perluasan pendapatan nasional, khususnya di negara-negara berkembang yang mampu memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh globalisasi (Thorbecke & Nissanke, 2006).

Namun, dampak globalisasi terhadap pendapatan nasional tidak selalu positif. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa meskipun globalisasi menawarkan peluang baru untuk pertumbuhan dan pembangunan, globalisasi juga menimbulkan tantangan dan memberikan kendala bagi para pembuat kebijakan dalam mengelola sistem ekonomi nasional, regional, dan global. Salah satu masalah utama yang diangkat adalah potensi distribusi manfaat globalisasi yang tidak merata, di mana orang miskin mungkin tidak memperoleh manfaat secara proporsional, atau bahkan terkena dampak buruk dari proses tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keadilan dan pemerataan tatanan ekonomi global, dan perlunya kebijakan dan strategi yang memastikan jalur yang lebih inklusif dan berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi.

Secara keseluruhan, hubungan antara globalisasi dan pendapatan nasional bersifat kompleks dan memiliki banyak segi. Sementara globalisasi dapat menghadirkan peluang bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, globalisasi juga menghadirkan tantangan yang memerlukan pertimbangan kebijakan yang cermat untuk

memastikan bahwa manfaatnya dibagi secara merata di seluruh masyarakat (Tang et al., 2020) (Robaro & A. Erigbe, 2019).

3. Isu-isu Pendapatan Nasional di Negara Berkembang

Negara berkembang sering menghadapi tantangan unik dalam bidang pendapatan nasional dan pembangunan ekonomi. Salah satu masalah utama yang disorot dalam sumber yang disediakan adalah potensi untuk memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang sebagai akibat dari globalisasi. (Kang'ethe, 2014) menyatakan bahwa meskipun globalisasi berpotensi untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan melibatkan lebih banyak negara dalam kegiatan bisnis internasional, globalisasi juga dapat menjadi alat eksploitasi dan imperialisme, dengan negara maju memperluas kekuatan politik dan ekonominya atas negara berkembang. Lebih jauh, sumber tersebut menunjukkan bahwa aliran modal dan investasi tidak selalu searah dengan yang diharapkan oleh teori keseimbangan neoklasik, dengan pengalaman dan pengamatan yang menunjukkan aliran ke arah yang berlawanan, dari negara berkembang ke negara maju. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan keberlanjutan sistem ekonomi global, dan perlunya kebijakan dan strategi yang mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam konteks ini.

Salah satu pendekatan yang mungkin untuk mengatasi masalah ini, seperti yang disarankan oleh sumber-sumber tersebut, adalah perlunya upaya global untuk memaksimalkan aspek-aspek positif pembangunan sosial di negara-negara berkembang. Hal ini dapat melibatkan pembatalan utang oleh negara-negara maju, memastikan adanya persaingan yang adil dalam perdagangan, dan negosiasi antara semua negara untuk mengatasi tantangan globalisasi bagi negara-negara berkembang.

Referensi

- Asheim, G. B. (1997). Adjusting green NNP to measure sustainability. *Scandinavian Journal of Economics*, 99(3), 355–370. <https://doi.org/10.1111/1467-9442.00068>
- Chaitip, P., Chokethaworn, K., Chaiboonsri, C., & Khounkhalax, M. (2015). Money Supply Influencing on Economic Growth-wide Phenomena of AEC Open Region. *Procedia Economics and Finance*, 24(December), 108–115. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00626-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00626-7)
- Dutt, A. K. (2006). Aggregate demand, aggregate supply and economic growth. *International Review of Applied Economics*, 20(3), 319–336. <https://doi.org/10.1080/02692170600736094>
- Gordon, R. J. (1975). The Demand for and Supply of Inflation. *The Journal of Law and Economics*, 18(3), 807–836. <https://doi.org/10.1086/466845>
- Jones, L. E., & Manuelli, R. E. (1995). Growth and the effects of inflation. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 19(8), 1405–1428. [https://doi.org/10.1016/0165-1889\(94\)00835-6](https://doi.org/10.1016/0165-1889(94)00835-6)
- Kang'ethe, S. M. (2014). Panacea and Perfidy of Globalisation as an Engine of Social Development in Developing Countries. *J Hum Ecol*, 47(2), 193–200. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2011.01.005>
- Messaoudi, A., Derbal, F. Z., Hasnaoui, M., & Belhamidi, H. (2023). How far does the central bank influence its economies? The example of Algeria. *SocioEconomic Challenges*, 7(2), 45–53. [https://doi.org/10.21272/sec.7\(2\).45-53.2023](https://doi.org/10.21272/sec.7(2).45-53.2023)
- Robaro, M. O. M. A., & A. Erigbe, P. (2019). Globalization and Indigenous Entrepreneurship Development in Developing Economies: A Case Study of Manufacturing and Commerce (Trade) in Nigeria. *Journal of Small Business and Entrepreneurship Development*, 7(2). <https://doi.org/10.15640/jsbed.v7n2a6>

- Tang, S., Wang, Z., Yang, G., & Tang, W. (2020). What are the implications of globalization on sustainability?-A comprehensive study. *Sustainability (Switzerland)*, 12(8), 1–11. <https://doi.org/10.3390/SU12083411>
- Thorbecke, E., & Nissanke, M. (2006). Introduction: The impact of globalization on the world's poor. *World Development*, 34(8), 1333–1337. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.10.007>
- Zarabozo, J. (2021). The Rise of New Atheism and Its Relationship to Islam. *The Assembly of Muslim Jurists of America 17th Annual Imams' Conference Houston- United States*.

Profil Penulis



Dr. Humairoh, SP, MM

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang sejak tahun 2016 dan mengampu beberapa mata kuliah Ekonomi Manajerial, Pengantar Manajemen, Studi Kelayakan Bisnis, Pemasaran Internasional, Metodologi Penelitian, Matematika Bisnis, dan Statistika Bisnis. Penulis pernah bekerja di perusahaan retail sebagai manager pemasaran. Penulis menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor (SP). Penulis berhasil menyelesaikan S2 pada Program Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Tangerang (MM) dan S3 pada Prodi Program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Persada Y.A.I. Jakarta (Dr.). Penulis aktif dalam mengikuti penelitian Hibah dari Dikti dan dalam menulis jurnal terindeks Sinta, Copernicus dan Scopus.

Kebijakan Fiskal dan Moneter

Oleh: Ahmad Refki Saputra

Universitas Muhammadiyah Palopo

Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua instrumen utama dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengaturan anggaran pemerintah, termasuk pengeluaran dan penerimaan negara, yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga oleh bank sentral untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Handoko et al., 2023).

Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Keduanya tidak dapat bekerja secara terpisah karena dampak kebijakan yang diambil di salah satu sektor dapat mempengaruhi sektor lainnya (Sari et al., 2018). Misalnya, kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa diimbangi dengan kebijakan moneter yang tepat dapat memicu inflasi. Sebaliknya, kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah dan bank sentral diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, peran kebijakan fiskal dan moneter menjadi krusial, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan tingkat suku bunga di Indonesia (Handoko et al., 2023). Analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

A. Kebijakan Fiskal

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian negara yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dengan cara mengatur pengeluaran negara dan penerimaan negara melalui pajak. Secara umum, kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, merangsang pertumbuhan ekonomi, serta mengendalikan inflasi dan pengangguran (Sudarmanto et al., 2024). Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengaturan tarif pajak, alokasi belanja pemerintah, serta pengelolaan utang negara. Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal berfungsi untuk menyeimbangkan perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perekonomian negara.

Secara lebih rinci, kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau penurunan aktivitas ekonomi, dengan tujuan untuk mendorong permintaan agregat (*total demand*) melalui peningkatan belanja pemerintah atau pengurangan pajak. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif diterapkan pada saat perekonomian tumbuh terlalu cepat dan menyebabkan inflasi, di mana pemerintah mengurangi belanja negara atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat dan menurunkan tekanan inflasi (Mankiw, 2021).

Salah satu komponen utama dalam kebijakan fiskal adalah pengaturan pajak. Penerimaan pajak yang optimal sangat penting untuk mendukung kebijakan fiskal yang efektif, baik untuk pembiayaan

pengeluaran negara maupun untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat, sementara tarif yang terlalu rendah dapat menyebabkan defisit anggaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara penerimaan pajak dan pengeluaran negara agar dapat mencapai tujuan fiskal yang diinginkan (Suranata, 2020).

Selain itu, kebijakan fiskal juga memainkan peran penting dalam redistribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi. Dengan menggunakan instrumen pajak dan belanja negara, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Belanja negara yang difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan mobilitas sosial (Rochman, 2022).

Pentingnya kebijakan fiskal dalam menjaga keseimbangan perekonomian negara menjadikan kebijakan ini sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi makro. Dalam prakteknya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak atau besaran pengeluaran negara, tetapi juga pada kondisi ekonomi global dan domestik yang mempengaruhi keputusan fiskal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kebijakan fiskal adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka mencapai tujuan ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, mengatasi inflasi, mengurangi pengangguran, serta mendukung pemerataan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus disusun dengan hati-hati agar dapat efektif dalam menjawab tantangan ekonomi yang ada (Mankiw, 2021; Suranata, 2020; Rochman, 2022).

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dengan cara mengatur pengeluaran negara dan penerimaan negara melalui pajak. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro, kebijakan fiskal

memiliki tujuan yang luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, merangsang pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pemerataan sosial-ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif, kontraktif, atau netral sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mengendalikan perekonomian agar tetap stabil. Stabilitas ekonomi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Pada periode resesi atau ketika perekonomian mengalami kontraksi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk meningkatkan pengeluaran negara dan mengurangi pajak agar dapat merangsang permintaan agregat dan mendorong pemulihan ekonomi. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang berkembang terlalu pesat dan berisiko menyebabkan inflasi tinggi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif dengan cara mengurangi pengeluaran negara dan menaikkan pajak untuk menurunkan permintaan agregat dan mengendalikan inflasi (Mankiw, 2021).

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Untuk itu, pemerintah sering kali menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor strategis lainnya. Pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur, misalnya, dapat meningkatkan kapasitas produksi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan riset di sektor swasta dengan memberikan insentif fiskal atau pajak yang lebih rendah bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi baru (Suranata, 2020).

Selain itu, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja. Pengangguran adalah salah

satu masalah utama yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran adalah dengan meningkatkan pengeluaran negara dalam sektor-sektor yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada sektor swasta agar mereka mau memperluas usaha dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang padat karya (Rochman, 2022).

Tujuan berikutnya dari kebijakan fiskal adalah untuk mengendalikan inflasi. Inflasi yang tinggi dapat merusak daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, serta mengganggu kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mengendalikan inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak, yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan fiskal kontraktif semacam ini digunakan ketika inflasi meningkat tajam sebagai respons terhadap permintaan yang berlebihan dalam perekonomian. Sebaliknya, pada saat deflasi atau stagnasi ekonomi, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan untuk merangsang permintaan dan menghindari penurunan harga yang berlebihan (Mankiw, 2021).

Pemerataan pendapatan dan keadilan sosial juga merupakan tujuan penting dari kebijakan fiskal. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan pajak progresif yang memungut lebih banyak pajak dari individu atau perusahaan yang memiliki pendapatan lebih tinggi, dan mengalihkan pendapatan tersebut kepada sektor-sektor yang lebih membutuhkan melalui belanja sosial, seperti subsidi untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Di negara-negara berkembang, kebijakan fiskal sering kali berfokus pada upaya redistribusi pendapatan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar (Suranata, 2020; Rochman, 2022).

Selain itu, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan dan mendukung keberlanjutan fiskal negara. Neraca perdagangan yang defisit dapat menyebabkan tekanan pada cadangan devisa dan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Melalui kebijakan fiskal yang bijaksana, pemerintah dapat mengatur pengeluaran negara untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperbaiki posisi neraca perdagangan. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan anggaran dan meminimalkan defisit anggaran, agar negara tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri. Mengelola utang negara dengan hati-hati merupakan bagian dari tujuan kebijakan fiskal untuk memastikan keberlanjutan fiskal di masa depan (Rochman, 2022; Suranata, 2020).

Di sisi lain, kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif fiskal kepada industri-industri yang dianggap strategis, seperti sektor energi terbarukan, pertanian, atau teknologi informasi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor tersebut, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang lebih rentan terhadap perubahan global, seperti sektor minyak dan gas. Kebijakan fiskal semacam ini dapat membantu menciptakan keberagaman dalam struktur ekonomi dan mempersiapkan negara menghadapi tantangan global di masa depan (Mankiw, 2021).

Tidak kalah pentingnya, kebijakan fiskal juga berperan dalam memperkuat sistem perekonomian melalui peningkatan pendapatan negara. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang memadai akan membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran untuk berbagai sektor penting, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Sebuah sistem pajak yang adil dan efisien dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan pajak yang progresif dan berbasis pada potensi ekonomi masing-masing sektor,

sehingga penerimaan pajak dapat diperoleh secara optimal dan pemerataan dapat tercapai (Rochman, 2022).

Dengan demikian, tujuan dari kebijakan fiskal sangat beragam dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, serta menciptakan pemerataan sosial-ekonomi. Namun, pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah dan memerlukan perencanaan serta implementasi yang hati-hati agar kebijakan fiskal dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian negara.

3. Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu negara. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal mencakup berbagai instrumen yang digunakan untuk mempengaruhi perekonomian melalui pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara, terutama dalam hal pajak dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pendapatan, dan pengurangan pengangguran.

a. Pajak (*Taxation*)

Salah satu instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan negara. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat. Pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan pada penghasilan atau kekayaan individu atau perusahaan, sementara pajak tidak langsung dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak yang diterapkan dalam kebijakan fiskal dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Misalnya, kebijakan pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan konsumsi, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pengurangan pajak dapat merangsang konsumsi dan investasi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat mengubah struktur pajak untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu atau untuk mencapai tujuan sosial, seperti mengurangi ketimpangan pendapatan melalui pajak progresif (Suranata, 2020).

b. Pengeluaran Pemerintah (*Government Spending*)

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen fiskal lainnya yang digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial. Belanja negara yang lebih tinggi dapat merangsang permintaan agregat dalam perekonomian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, pengurangan pengeluaran negara dapat digunakan untuk mengurangi inflasi atau mengurangi defisit anggaran negara.

Belanja pemerintah juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerataan sosial. Pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk mendanai program-program yang ditujukan untuk membantu kelompok-kelompok yang kurang mampu, seperti program subsidi bahan pokok atau bantuan langsung tunai. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan dapat meningkatkan efisiensi perekonomian dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Rochman, 2022).

c. Subsidi (*Subsidies*)

Subsidi adalah bentuk bantuan atau dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, seperti pertanian, energi, atau industri tertentu. Subsidi dapat diterapkan untuk menurunkan harga barang atau jasa yang dianggap penting atau untuk merangsang produksi dan konsumsi di sektor-sektor tertentu. Misalnya, subsidi untuk bahan bakar minyak atau listrik dapat mengurangi biaya hidup bagi masyarakat dan membantu industri-industri tertentu agar tetap kompetitif.

Namun, meskipun subsidi dapat memiliki dampak positif dalam jangka pendek, penggunaan subsidi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan distorsi pasar dan membebani anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu hati-hati dalam merancang kebijakan subsidi agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada bantuan pemerintah dan untuk memastikan bahwa subsidi digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Suranata, 2020).

d. Transfer Langsung (*Direct Transfers*)

Transfer langsung adalah bentuk bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, seperti melalui program bantuan sosial atau jaminan sosial. Program transfer langsung biasanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta untuk mendukung daya beli rumah tangga yang kurang mampu. Contoh dari transfer langsung adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau bantuan sosial lainnya.

Transfer langsung dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperbaiki ketimpangan pendapatan dan meningkatkan konsumsi masyarakat, terutama pada masa krisis ekonomi. Transfer langsung memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang kemudian akan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Namun, kebijakan ini

memerlukan manajemen yang baik agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan (Rochman, 2022).

e. Utang Negara (*National Debt*)

Utang negara atau pembiayaan melalui utang adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai defisit anggaran atau untuk membiayai proyek-proyek besar yang memerlukan dana besar. Pemerintah dapat menerbitkan surat utang (obligasi) untuk menarik dana dari pasar domestik atau internasional. Penggunaan utang negara memungkinkan pemerintah untuk melakukan belanja lebih besar tanpa harus segera menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran yang ada.

Meskipun utang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, utang yang berlebihan dapat menimbulkan masalah jangka panjang, seperti beban bunga yang tinggi dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Oleh karena itu, manajemen utang yang hati-hati sangat diperlukan agar negara tidak terjebak dalam masalah utang yang dapat mengganggu stabilitas fiskal. Pembayaran utang yang tinggi juga dapat mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah untuk merespons krisis atau kebutuhan ekonomi lainnya (Mankiw, 2021).

f. Kebijakan Fiskal Ekspansif (*Expansionary Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk merangsang perekonomian, terutama pada saat perekonomian sedang mengalami resesi atau perlambatan pertumbuhan. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal ekspansif meliputi peningkatan pengeluaran pemerintah dan pengurangan pajak. Dengan meningkatkan belanja negara, permintaan agregat akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan pajak akan meningkatkan pendapatan disposabel masyarakat dan merangsang konsumsi.

Kebijakan fiskal ekspansif juga dapat digunakan untuk mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, terutama

melalui proyek-proyek infrastruktur besar yang memerlukan tenaga kerja. Di sisi lain, kebijakan ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi atau defisit anggaran yang tidak terkendali (Barro & Gorodnichenko, 2021).

g. Kebijakan Fiskal Kontraktif (*Contractionary Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk mengatasi inflasi atau mengurangi permintaan yang berlebihan dalam perekonomian. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal kontraktif adalah pengurangan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak. Dengan mengurangi pengeluaran, permintaan agregat dalam perekonomian akan turun, yang dapat membantu menurunkan inflasi. Selain itu, peningkatan pajak juga dapat menurunkan konsumsi dan investasi, yang dapat mengurangi tekanan inflasi.

Kebijakan fiskal kontraktif sering digunakan pada saat ekonomi mengalami overheating atau pertumbuhan yang terlalu cepat yang dapat menyebabkan inflasi tinggi. Meskipun kebijakan ini dapat membantu mengendalikan inflasi, pemerintah harus berhati-hati agar tidak memperburuk resesi atau menambah pengangguran dalam prosesnya (Auerbach & Gorodnichenko, 2021).

h. Insentif Pajak (*Tax Incentives*)

Insentif pajak adalah pengurangan atau pembebasan pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong investasi atau aktivitas ekonomi tertentu. Insentif pajak dapat diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu, seperti teknologi, energi terbarukan, atau penelitian dan pengembangan. Insentif pajak ini bertujuan untuk menarik investasi dan mendorong sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Insentif pajak juga dapat digunakan untuk merangsang ekspor atau mendorong pengembangan industri-industri yang memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing global. Namun, insentif pajak harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menyebabkan distorsi pasar atau ketergantungan pada insentif yang berlebihan (Suranata, 2020).

B. Kebijakan Moneter

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengelola jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian, dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, terutama dalam hal mengendalikan inflasi, mengatur tingkat pengangguran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sudarmanto et al., 2024). Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam perekonomian makro, karena dapat mempengaruhi perekonomian secara langsung, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bank sentral, sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan moneter, menggunakan berbagai instrumen untuk mempengaruhi kondisi moneter dan keuangan dalam perekonomian.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, dengan tujuan utama menjaga stabilitas ekonomi (Sudarmanto et al., 2021). Secara umum, kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan pokok yang berhubungan erat dengan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, dan tingkat pengangguran. Dalam prakteknya, kebijakan moneter berperan sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan perekonomian jangka panjang yang berkelanjutan.

a. Menjaga Stabilitas Harga (Inflasi)

Salah satu tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Inflasi yang tidak terkendali dapat merusak daya beli masyarakat, mengganggu perencanaan bisnis, dan menciptakan ketidakpastian dalam

perekonomian. Bank sentral, melalui kebijakan moneter, berusaha untuk mempertahankan inflasi pada tingkat yang moderat, biasanya di sekitar target inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral itu sendiri (Mishkin, 2020).

Inflasi yang terlalu tinggi atau rendah memiliki dampak negatif terhadap perekonomian. Inflasi yang tinggi cenderung mengurangi nilai mata uang, menaikkan harga barang dan jasa, serta mempersulit perencanaan bisnis karena ketidakpastian. Sebaliknya, deflasi atau inflasi yang sangat rendah dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, pengangguran, dan berpotensi menciptakan resesi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang diterapkan bertujuan untuk mengatur dan menjaga agar inflasi tetap dalam kisaran yang sehat, dengan menggunakan instrumen seperti penetapan suku bunga dan pengaturan jumlah uang yang beredar.

b. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan kebijakan moneter lainnya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perekonomian yang stagnan atau mengalami kontraksi dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan, dan ketimpangan sosial yang lebih besar. Kebijakan moneter ekspansif sering digunakan dalam situasi seperti ini untuk merangsang permintaan agregat. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menurunkan suku bunga yang akan meningkatkan konsumsi dan investasi.

Dalam hal ini, penurunan suku bunga bertujuan untuk mendorong individu dan perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak, mengajukan pinjaman, dan meningkatkan pengeluaran. Hal ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan merangsang aktivitas ekonomi dalam sektor-sektor yang penting, seperti industri dan sektor jasa. Selain itu, peningkatan dalam konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran dalam perekonomian (Taylor, 2019).

Namun, kebijakan moneter juga harus sangat hati-hati, terutama dalam periode ekspansi ekonomi yang terlalu cepat. Jika

pertumbuhan ekonomi terlalu cepat, bank sentral dapat memilih untuk mengadopsi kebijakan moneter kontraktif guna mencegah inflasi yang berlebihan.

c. Meningkatkan Stabilitas Nilai Tukar

Stabilitas nilai tukar mata uang sangat penting bagi perekonomian internasional, terutama untuk negara yang bergantung pada perdagangan luar negeri. Kebijakan moneter juga memiliki tujuan untuk mendukung stabilitas nilai tukar mata uang suatu negara. Kebijakan moneter yang terlalu longgar atau terlalu ketat dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar mata uang. Ketidakpastian nilai tukar dapat mempengaruhi harga impor, memengaruhi biaya ekspor, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku pasar.

Bank sentral dapat memanfaatkan kebijakan moneter untuk mengelola nilai tukar melalui pengaturan tingkat suku bunga dan intervensi langsung di pasar valuta asing. Misalnya, jika mata uang suatu negara melemah terlalu tajam, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menarik investor asing dan meningkatkan permintaan terhadap mata uang lokal, yang pada gilirannya dapat membantu menguatkan nilai tukar. Sebaliknya, jika mata uang terlalu menguat, kebijakan moneter ekspansif dapat diterapkan untuk menurunkan nilai tukar agar lebih kompetitif di pasar internasional.

d. Mengurangi Pengangguran

Mengurangi tingkat pengangguran adalah salah satu tujuan kebijakan moneter yang tidak kalah penting. Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, kemiskinan, dan penurunan produktivitas ekonomi. Bank sentral berusaha untuk menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengatur tingkat suku bunga sehingga dapat mendorong kegiatan investasi yang lebih banyak, yang pada gilirannya akan menciptakan peluang pekerjaan.

Kebijakan moneter ekspansif, seperti penurunan suku bunga, bertujuan untuk merangsang sektor-sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti konstruksi dan manufaktur. Dengan menurunkan biaya pinjaman, pengusaha lebih cenderung untuk melakukan ekspansi usaha dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang turut mendukung permintaan agregat dan mempercepat proses penciptaan lapangan kerja (Blinder, 2018).

e. Mencegah Krisis Keuangan

Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Krisis keuangan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan likuiditas dan sistem perbankan yang tidak sehat dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi. Untuk itu, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat mengguncang perekonomian.

Salah satu cara untuk mencegah krisis keuangan adalah dengan menjaga kestabilan pasar uang. Bank sentral bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank-bank komersial memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban mereka. Jika terjadi kegelisahan pasar yang dapat memicu krisis likuiditas, bank sentral dapat berperan sebagai lender of last resort dengan menyediakan pinjaman darurat kepada bank yang membutuhkan likuiditas.

Dengan kebijakan yang hati-hati dan responsif terhadap kondisi pasar, bank sentral dapat mengurangi risiko terjadinya krisis yang dapat mengguncang perekonomian dan menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi (Mishkin, 2020).

f. Mencapai Keberlanjutan Ekonomi

Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan moneter yang tidak terkontrol dan tidak terukur dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi, yang dapat berdampak buruk pada generasi mendatang. Dengan menjaga stabilitas harga, mengontrol inflasi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, kebijakan

moneter mendukung tercapainya ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan ini adalah dengan menghindari kebijakan moneter yang terlalu agresif, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, seperti gelembung aset atau krisis keuangan. Dengan kebijakan yang lebih bijaksana, bank sentral berusaha untuk menciptakan perekonomian yang dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil tanpa menciptakan masalah jangka panjang (Bernanke, 2019).

g. Meningkatkan Kepercayaan Investor

Kepercayaan investor sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan moneter yang transparan dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun internasional. Ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang tepat, seperti menurunkan suku bunga di saat yang tepat atau menaikkannya ketika diperlukan, investor merasa lebih yakin untuk berinvestasi di pasar keuangan.

Kepercayaan ini akan berimplikasi pada lebih banyaknya investasi yang masuk ke pasar, baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio. Dengan meningkatkan aliran investasi, perekonomian dapat berkembang pesat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat (Taylor, 2019).

3. Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan kondisi kredit dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan moneter digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan tersebut.

a. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operations* – OMO)

Operasi Pasar Terbuka (OMO) adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang paling umum digunakan oleh bank sentral. OMO melibatkan pembelian dan penjualan surat berharga, seperti obligasi negara, di pasar terbuka. Tujuan utama dari OMO adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek.

- **Pembelian Surat Berharga.** Ketika bank sentral membeli surat berharga, hal ini akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di sistem perbankan. Bank-bank komersial yang menerima pembayaran dari penjualan surat berharga akan memiliki lebih banyak cadangan uang, yang memungkinkan mereka untuk memberikan pinjaman lebih banyak kepada individu dan perusahaan. Hal ini dapat mendorong pengeluaran dan investasi, yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan ekonomi.
- **Penjualan Surat Berharga.** Sebaliknya, ketika bank sentral menjual surat berharga, jumlah uang yang beredar dalam perekonomian akan berkurang karena bank-bank komersial harus membayar untuk membeli surat berharga tersebut. Proses ini dapat membantu menurunkan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk pinjaman dan pengeluaran, yang dapat menekan permintaan agregat.

OMO adalah instrumen yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan cepat, memungkinkan bank sentral untuk merespons perubahan kondisi ekonomi secara efisien. Kebijakan ini juga memiliki dampak langsung terhadap suku bunga pasar uang, yang mempengaruhi tingkat bunga yang dibebankan oleh bank-bank komersial dalam pinjaman jangka pendek (Mishkin, 2020).

b. Suku Bunga Acuan (*Interest Rate Policy*)

Suku bunga acuan adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral untuk memengaruhi suku bunga pasar dan aktivitas ekonomi. Bank sentral menggunakan instrumen ini untuk mengatur biaya pinjaman dan tabungan di seluruh perekonomian. Suku bunga acuan memiliki dampak yang luas terhadap

perekonomian karena dapat mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi.

- Penurunan Suku Bunga Acuan. Ketika bank sentral menurunkan suku bunga acuan, biaya pinjaman menjadi lebih rendah. Hal ini mendorong individu dan perusahaan untuk meminjam uang lebih banyak untuk konsumsi dan investasi. Selain itu, suku bunga yang lebih rendah juga membuat instrumen investasi lainnya, seperti obligasi, menjadi kurang menarik, sehingga mendorong investor untuk menanamkan dananya dalam bentuk aset yang lebih berisiko, seperti saham dan properti.
- Kenaikan Suku Bunga Acuan. Sebaliknya, ketika bank sentral menaikkan suku bunga acuan, pinjaman menjadi lebih mahal, yang dapat mengurangi konsumsi dan investasi. Ini sering kali dilakukan untuk mengendalikan inflasi ketika perekonomian tumbuh terlalu cepat atau ketika ada kekhawatiran tentang gelembung aset yang dapat terjadi. Bank sentral menggunakan suku bunga acuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pengendalian inflasi.

Suku bunga acuan juga berfungsi sebagai indikator untuk menetapkan suku bunga jangka panjang yang lebih stabil dan memengaruhi keputusan investasi, baik di pasar domestik maupun internasional (Taylor, 2019).

c. Fasilitas Pinjaman dan Deposito (*Lender of Last Resort*)

Bank sentral dapat menyediakan fasilitas pinjaman bagi bank-bank komersial yang mengalami kesulitan likuiditas. Fasilitas pinjaman ini sering disebut sebagai "*lender of last resort*," yang berarti bank sentral akan memberikan pinjaman kepada bank-bank yang tidak dapat memperoleh dana di pasar uang. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank komersial memiliki akses ke likuiditas yang cukup selama krisis keuangan atau ketegangan pasar.

Selain itu, bank sentral juga dapat menawarkan fasilitas deposito bagi bank-bank komersial. Fasilitas deposito memungkinkan bank-bank untuk menempatkan dana cadangan mereka di bank sentral, dengan

imbal hasil yang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar. Hal ini memberi insentif bagi bank untuk menyimpan cadangan mereka di bank sentral, alih-alih menggunakannya untuk pinjaman yang dapat meningkatkan risiko.

Fasilitas pinjaman dan deposito ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan dan menghindari terjadinya krisis likuiditas yang dapat mengguncang perekonomian (Blinder, 2018).

d. Kebijakan Cadangan Wajib (*Required Reserve Ratio*)

Cadangan wajib adalah persentase dari simpanan yang harus disimpan oleh bank-bank komersial dalam bentuk cadangan di bank sentral. Bank sentral dapat mengubah cadangan wajib untuk memengaruhi jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank-bank komersial. Ketika cadangan wajib ditingkatkan, bank-bank akan memiliki lebih sedikit uang untuk dipinjamkan, yang dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan menekan inflasi. Sebaliknya, jika cadangan wajib diturunkan, bank-bank akan memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan, yang dapat merangsang pengeluaran dan investasi dalam perekonomian.

Cadangan wajib adalah instrumen yang lebih langsung dan lebih kuat dalam memengaruhi jumlah uang yang beredar dibandingkan dengan instrumen lainnya, meskipun penggunaannya lebih jarang dibandingkan dengan OMO atau suku bunga acuan (Mankiw, 2021).

e. Kebijakan Diskonto (*Discount Rate*)

Kebijakan diskonto mengacu pada suku bunga yang dibebankan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial untuk meminjamkan uang dalam jangka pendek. Ketika bank-bank komersial mengalami kesulitan likuiditas, mereka dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat bunga yang disebut sebagai suku bunga diskonto. Kebijakan diskonto digunakan untuk mengatur ketersediaan kredit di pasar.

- Penurunan Suku Bunga Diskonto. Penurunan suku bunga diskonto dapat mempermudah akses bank komersial ke pinjaman dari bank sentral, yang dapat memperbaiki kondisi likuiditas dan memungkinkan mereka untuk memperluas pinjaman kepada sektor riil.
- Kenaikan Suku Bunga Diskonto. Kenaikan suku bunga diskonto akan membuat pinjaman dari bank sentral lebih mahal, yang dapat mengurangi jumlah kredit yang diberikan kepada bank-bank komersial dan pada gilirannya memperlambat ekspansi kredit di sektor riil.

Meskipun kebijakan diskonto tidak sebanyak digunakan sebagai OMO atau suku bunga acuan, kebijakan ini tetap memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan menjaga ketersediaan kredit dalam perekonomian (Bernanke, 2019).

f. Intervensi Valuta Asing

Intervensi valuta asing adalah kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Melalui intervensi ini, bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan nilai tukar atau untuk menstabilkan pasar valuta asing.

Jika nilai tukar mata uang domestik melemah terlalu tajam, bank sentral dapat membeli mata uang domestik dengan menggunakan cadangan devisa untuk menguatkan nilai tukar. Sebaliknya, jika nilai tukar terlalu menguat, bank sentral dapat menjual mata uang domestik untuk menurunkan nilai tukarnya.

Intervensi valuta asing sering digunakan ketika ada fluktuasi nilai tukar yang dapat merusak stabilitas perekonomian dan perdagangan internasional. Instrumen ini juga digunakan untuk mengatur daya saing produk domestik di pasar global (Mishkin, 2020).

C. Penutup

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengelola perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara melalui pengeluaran pemerintah dan perpajakan, yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, atau mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, guna mencapai stabilitas harga dan mendukung perekonomian yang sehat.

Keduanya saling terkait dan perlu diseimbangkan agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Kebijakan fiskal yang ekspansif, misalnya, dapat menambah permintaan dalam perekonomian, sementara kebijakan moneter yang longgar akan mendorong akses ke pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang ketat dan kebijakan moneter yang restriktif dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi yang tinggi.

Penerapan kebijakan yang tepat akan menciptakan stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan mengurangi ketidakpastian dalam perekonomian. Namun, implementasi kebijakan fiskal dan moneter harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, serta memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2021). *Fiscal Policy and Business Cycles*. Cambridge University Press.
- Barro, R. J. (2022). *Macroeconomics*. MIT Press.
- Bernanke, B. S. (2019). *The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and Its Aftermath*. W.W. Norton & Company.
- Blinder, A. S. (2018). *After the Music Stopped: The Financial Crisis, the Response, and the Work Ahead*. Penguin Press.
- Handoko, O., Raysharie, A., & Alviandi, R. (2023). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Manajemen dan Lingkungan*, 1(1), 1-10.
- IMF (International Monetary Fund). (2021). *Fiscal Monitor: A Fair Shot*. IMF Publications.
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics (10th ed.)*. Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Mishkin, F. S. (2020). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (12th ed.)*. Pearson Education.
- Mishkin, F. S. (2019). *Financial Markets and Institutions*. Pearson.
- OECD. (2021). *OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2*. OECD Publishing.
- Rochman, I. (2022). *Kebijakan Fiskal dan Perekonomian Indonesia*. Gramedia.
- Sari, D. W., Siregar, H., & Andati, T. (2018). Analysis of the Impact of Fiscal and Monetary Policy on Indonesian Economy Using SVAR Model. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 95-109.
- Sudarmanto, E., Syaiful, M., Fazira, N., Hasan, M., Muhammad, A., Faried, A.I., Tamara, S.Y., Mulianta, A., Nainggolan, L.E.,

- Prasetyo, I., Arfandi, S.N., Ahmad, M.I.S., Fitriana, L., Damanik, D., Basmar, E., Zaman, N., Purba, B. (2021). *Teori Ekonomi: Mikro dan Makro*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudarmanto, E., Erdawati, L., Purwaningsih, N., Wulandjani, H., Widianingsih, D.M., Humairoh, H., Possumah, L., Suhendra, C., Astuti, S.Y., Indriani, R., Wijayanti, S., Ardiyanti, A., Zatira, D., Aman, S., Wahidin, W., Wijayanti, M., Faturrohman, M., Mubarak, A.Z. (2024). *Teori Ekonomi Modern Mikro dan Makro*. Minhaj Pustaka.
- Suranata, I. (2020). *Ekonomi Makro: Teori dan Aplikasi*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Taylor, J. B. (2019). *Principles of Economics (4th ed.)*. W.W. Norton & Company.

Profil Penulis



Ahmad Refki Saputra, S.E., M.E

Lahir pada 04 Desember 1994 di Palopo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Berasal dari keluarga yang memandang tinggi pendidikan, dengan Ayah bernama alm. Sarkawi dan Ibu bernama Marianna. Saat ini penulis menjalani aktivitasnya sebagai Dosen sekaligus menjabat sebagai Ketua Unit Pelaksana Tugas Pusat Karir dan Alumni

Universitas Muhammadiyah Palopo.

Penulis memulai pendidikannya di SDN 07 Ponjalae, kemudian dilanjutkan di SMPN 3 Palopo. Tahun 2010 ia melanjutkan pendidikannya ke SMAN 2 Palopo dan lulus tahun 2013. Dan melanjutkan pendidikan sarjananya ditahun yang sama di Program Studi IESP, STIE Muhammadiyah Palopo (yang sekarang berubah status menjadi Universitas Muhammadiyah Palopo) dan lulus pada tahun 2017.

Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di Program Magister Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang dan Lulus di Tahun 2023.

Pasar Modal dan Investasi

Oleh: Ahmad Junaidi

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Investasi dan pasar modal adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dan meskipun dua hal tersebut dalam implementasinya bisa berbeda. Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang pasar modal menyebutkan bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi. Dari penjelasan tersebut dapat dibedakan antara keduanya. Pada kenyataannya banyak masyarakat belum memahami peran pasar modal dalam meningkatkan perekonomian dan oleh karena itu perlu dilakukan proses pemahaman kepada masyarakat. Merujuk pada UU tentang pasar modal, maka pasar modal memiliki peran yaitu:

- a. Sarana bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sumber pembiayaan selain yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan, yaitu diperoleh melalui penawaran saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) kepada masyarakat atau investor. Perusahaan memilih cara ini karena ini adalah cara yang mudah bila dibandingkan dengan cara lainnya seperti pengajuan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya.

- b. Sarana bagi masyarakat umum untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya melalui pembelian saham-saham perusahaan yang *listing* di pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan *capital gain*. Pasar modal menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginvestasikan dana miliknya. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dananya seperti membelikan polis asuransi, membeli emas batangan, menyimpan uang dalam mata uang US\$ dsb.

A. Definisi Pasar Modal

Menurut Suhartono (2009), pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

B. Fungsi Pasar Modal

Menurut (Muklis, 2016) pasar modal suatu negara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha
Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah.
2. Pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan
Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan.
3. Pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi
Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat.
4. Pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja
Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.
5. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara

Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara.

6. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara

Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.

C. Jenis-jenis Pasar Modal

Menurut Martalena dan Malinda (2012), menyatakan bahwa pasar modal dibedakan menjadi 2 yaitu pasar perdana dan pasar sekunder:

1. Pasar Perdana (*primary market*)

Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (*issue*) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang *go public* berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi dan melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodal usaha.

2. Pasar Sekunder

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaan saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan.

D. Instrumen Investasi Pasar Modal

Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya, kita bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari

diperdagangkan. Menurut (Fitria Puteri Sholikhah et al., 2022) jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah:

1. Saham

Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan, berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba.

2. Reksadana

Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya.

3. Surat utang atau obligasi

Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindahtangankan, dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan.

4. *Exchange traded fund* (ETF)

Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham.

5. Derivatif

Selanjutnya, ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat 2 jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu *warrant* dan *right*.

E. Manfaat Pasar Modal

Menurut (Muklis, 2016) pasar modal memiliki manfaat bagi emiten (Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku), maupun untuk para investor.

Manfaat Pasar Modal untuk Emiten;

1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar
2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai

3. Tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan
4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil

Manfaat Pasar Modal untuk Investor;

1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain
2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi
3. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko

F. Definisi Investasi

Pada dasarnya, pengertian investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti *peer to peer lending*, saham, obligasi, eksadana, deposito, dan lain sebagainya.

Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.

G. Jenis Investasi

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek berlangsung antara kurang dari satu tahun hingga tiga tahun saja.

Sebagai contohnya, seorang pemuda berusia 25 tahun berniat untuk menikah tiga tahun ke depan. Maka dia membutuhkan dana segar untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang tidak murah.

Mengingat akan kebutuhan itu, maka pemuda tersebut disarankan untuk berinvestasi di instrumen rendah risiko dalam artian memiliki fluktuasi nilai yang stabil, likuiditas yang tinggi sehingga mudah dikonversikan dalam bentuk cash, serta bisa menghasilkan pendapatan tetap. Beberapa instrumen yang disarankan untuknya adalah deposito, reksadana pasar uang, atau surat utang negara jangka pendek.

Apakah bisa, pemuda tersebut berinvestasi di saham untuk tujuan finansial ini? Bisa, namun tentu saja kurang disarankan. Alasannya saham adalah instrumen yang memiliki fluktuasi nilai yang tinggi dalam jangka pendek. Membeli saham sama saja dengan membeli bisnis, dan pertumbuhan bisnis tentu tidak bisa dinilai hanya dalam jangka waktu pendek.

2. Investasi Jangka Menengah

Ketika seseorang memiliki tujuan finansial antara 3 hingga 10 tahun, maka hal ini bisa disebut dengan investasi jangka menengah.

Sebut saja, dalam lima tahun ke depan Bapak Budi harus mendaftarkan diri putranya ke sebuah universitas ternama di Jakarta. Maka Bapak Budi membutuhkan dana yang cukup besar untuk membayar uang pangkal serta semester I. Mengingat kebutuhan dananya di atas lima tahun, Bapak Budi bisa memilih instrumen dengan risiko sedikit lebih tinggi dari deposito, reksadana pasar uang, atau surat utang negara, dengan harapan memperoleh timbal hasil yang lebih tinggi.

Instrumen yang dimaksud adalah reksadana pendapatan tetap (obligasi), obligasi swasta, reksadana campuran.

3. Investasi Jangka Panjang

Ketika tujuan investasinya di atas 10 tahun, maka investasi ini sudah masuk dalam kategori investasi jangka panjang.

Tujuan-tujuan investasi itu bisa berupa biaya pendidikan anak, biaya penyelenggaraan pesta pernikahan anak, pembelian aset ke anak cucu, dan dana pensiun.

Semakin panjang periode investasi, makin fleksibel seseorang memilih instrumennya. Mereka bisa memilih instrumen dengan risiko rendah, moderat, tinggi, maupun instrumen yang tidak dapat dikonversi dengan cepat.

Beberapa instrumen yang bisa dipilih untuk investasi jangka panjang antara lain logam mulia, reksadana saham, saham, hingga properti.

H. Keuntungan Melakukan Investasi

1. Menyediakan Pendapatan Pasif

Pertama-tama, investasi dapat menyediakan sumber pendapatan pasif yang dapat membantu mencapai kebebasan finansial di masa depan.

Melalui instrumen investasi seperti reksadana atau properti sewa, kamu dapat memperoleh penghasilan yang menjanjikan secara teratur tanpa harus bekerja secara aktif.

Pendapatan pasif ini memungkinkan untuk menjaga gaya hidup agar bisa tetap sama, bahkan setelah pensiun, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pendapatan utama.

Jadi, dengan merencanakan investasi dengan bijak, kamu dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan stabil bagi diri sendiri dan keluarga.

2. Mengantisipasi Inflasi dan Meningkatkan Nilai Aset

Investasi juga dapat membantu mengalahkan laju inflasi dan meningkatkan nilai aset seseorang seiring waktu. Ketika kamu menyimpan uang di bank atau dalam bentuk tabungan, nilai uang tersebut cenderung berkurang seiring dengan meningkatnya inflasi.

Namun, dengan berinvestasi dalam instrumen tertentu seperti saham, obligasi, atau properti, kamu dapat menghasilkan keuntungan yang melebihi tingkat inflasi.

Dengan demikian, nilai kekayaan akan tetap terjaga atau bahkan meningkat dalam jangka waktu tertentu. Jadi, hal ini bisa membantu seseorang mencapai tujuan keuangan dengan lebih baik.

3. Mengurangi Risiko dengan Diversifikasi Portofolio

Beberapa orang yang belum memahami sepenuhnya terkait apa itu investasi kerap mengatakan bahwa ini adalah kegiatan finansial ini sangat berisiko.

Padahal, salah satu keuntungan utama dari investasi adalah kemampuan untuk diversifikasi portofolio. Dengan memiliki beragam jenis instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, properti, atau lainnya, kamu dapat mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi pasar.

Sebab ketika salah satu aset dalam portofolio mengalami penurunan nilai, aset lain yang mungkin bertumbuh nilainya dapat membantu mengimbangi kerugian tersebut.

Selain itu, diversifikasi portofolio juga memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan peluang investasi yang berbeda-beda, sehingga meningkatkan potensi keuntungan dalam jangka panjang.

4. Mengembangkan Pengetahuan dan Keterampilan Finansial

Terakhir, investasi juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan finansial seseorang.

Dengan memahami apa itu investasi, mempelajari berbagai jenis instrumen investasi yang ada, dan memahami cara kerja pasar keuangan, kamu dapat menjadi lebih ahli dalam mengelola keuangan pribadi maupun keluarga.

Selain itu, berinvestasi juga dapat membuka kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, sehingga membantu memperluas jaringan dan memberikan banyak wawasan baru tentang dunia keuangan dan bisnis.

I. Jenis-Jenis Instrumen Investasi dan Cara Memulainya

Setelah memahami apa itu investasi beserta berbagai potensi keuntungannya, berikut ini adalah beberapa jenis instrumen investasi yang bisa kamu pertimbangkan dan cara memulai berinvestasi di instrumen tersebut:

1. Deposito

Deposito adalah salah satu instrumen investasi yang cukup populer. Deposito sering dianggap sebagai tabungan berjangka karena prinsip kerjanya adalah dengan menyetor sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu dengan imbal hasil yang bersifat tetap.

Instrumen investasi satu ini cocok jika kamu ingin mengamankan dana dalam jangka pendek dengan risiko yang relatif rendah.

Untuk memulai berinvestasi dalam deposito, kamu perlu menghubungi bank atau lembaga keuangan yang menawarkan produk investasi ini dan membuka rekening deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Obligasi

Selanjutnya ada obligasi, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji untuk membayar kembali pokok utang beserta timbal hasil dalam jangka waktu tertentu.

Investasi dalam obligasi dapat memberikan pendapatan tetap dalam bentuk timbal hasil dan dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih stabil daripada saham.

Untuk memulai berinvestasi dalam instrumen ini, kamu bisa membeli obligasi langsung dari penerbitnya atau melalui pasar sekunder.

3. Logam Mulia

Investasi dalam logam mulia, terutama emas, telah lama menjadi pilihan populer bagi banyak investor. Pasalnya, emas dianggap sebagai aset berharga yang nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat seiring waktu.

Kamu dapat memulai investasi dalam logam mulia dengan membeli emas dalam bentuk fisik seperti perhiasan atau koin emas, atau melalui pembelian produk investasi seperti emas batangan atau reksadana emas.

4. Reksadana

Reksadana adalah pola pengelolaan dana yang dikelola oleh manajer investasi (MI) dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen pasar modal yang berbeda seperti saham, obligasi, dan pasar uang.

Investasi reksadana cocok untuk kamu yang ingin berinvestasi namun tidak memiliki waktu atau pengetahuan yang cukup untuk mengelola portofolio investasi sendiri.

Jika ingin memulai berinvestasi di instrumen ini, kamu bisa membeli unit penyertaan melalui perusahaan manajer investasi atau platform daring khusus yang menyediakan layanan tersebut.

5. Saham

Investasi saham adalah salah satu cara untuk memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan dan memperoleh profit dari pertumbuhan nilai perusahaan serta pembagian dividen.

Meski sering dianggap sebagai instrumen investasi yang memiliki potensi profit yang tinggi, namun saham juga memiliki risiko yang sesuai.

Adapun untuk dapat memulai berinvestasi saham, kamu perlu membuka rekening efek di perusahaan sekuritas dan melakukan pembelian saham sesuai dengan analisis dan strategi tertentu.

6. Properti

Investasi dalam properti, seperti rumah atau apartemen, dapat menjadi pilihan yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Alasannya, properti cenderung mengalami apresiasi nilai atau kenaikan harga seiring waktu, dan kamu juga dapat memperoleh pendapatan pasif dari penyewaan properti tersebut.

Namun untuk berinvestasi pada properti, kamu perlu melakukan riset pasar, mencari properti yang sesuai dengan anggaran dan tujuan investasi, hingga mempertimbangkan aspek perizinan dan peraturan yang berlaku.

7. P2P Lending

Peer to peer (P2P) lending adalah suatu kegiatan peminjaman modal antara investor dengan peminjam melalui platform daring. Salah satu contoh platform yang menyediakan sistem ini adalah *microfinance marketplace* Amatha.

Sebagai *lender*, kamu dapat memulai berinvestasi dalam sistem ini dengan mendaftar sebagai investor dan memilih peminjam atau pengusaha kecil dan mikro yang sesuai dengan toleransi risiko maupun tujuan investasi.

J. Cara Berinvestasi

Tidaklah sulit untuk berinvestasi, mengingat di era digital seperti saat ini, informasi mengenai instrumen investasi atau riset pasar sangatlah mudah didapat. Namun, investasi tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Berikut adalah cara berinvestasi yang baik, agar bisa mewujudkan tujuan keuangan kita.

a. Pastikan Kita Telah Sehat Secara Finansial

Sebelum berinvestasi, pastikan telah memiliki dana darurat yang ideal dan memiliki proteksi keuangan dengan memiliki jaminan kesehatan atau asuransi.

Merencanakan keuangan untuk masa depan memang sangat penting. Namun jangan pernah sepelekan hal-hal yang menjadi perhatian dan prioritas di masa kini.

Tanpa dana darurat yang ideal, kita akan kesulitan dalam menghadapi risiko hilangnya pendapatan akibat PHK atau ketidakpastian ekonomi. Tanpa perlindungan kesehatan, kita juga bisa kehilangan dana yang cukup besar ketika harus berobat.

b. Tentukan Tujuan Terlebih Dulu

Ketahuiilah tujuan-tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam berbagai periode. Sebut saja untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tanpa tujuan yang jelas, maka proses investasi akan menjadi tidak teukur.

Setelah menentukan tujuan, tentukan pula kebutuhan dana untuk merealisasikannya. Kita bisa memulai proses investasi setelah memahami kebutuhan dana.

c. Kenali Profil Risiko

Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik investasi yang berbeda-beda, dan setiap investor juga memiliki profil risiko yang berbeda. Profil risiko bergantung kepada kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menoleransi risiko investasi.

Investor konservatif cendeung menghindari instrumen dengan volatilitas tinggi, dan investor agresif lebih berani mengambil risiko karena menghendaki imbal hasil yang tinggi.

Profil risiko tentu saja bisa berubah ketika pemahaman seseorang akan investasi mulai meningkat. Peningkatan pemahaman akan berinvestasi akan meningkatkan kemampuan menoleransi risiko.

d. Kenali Risiko Sistematis dan Non-Sistematis Investasi

Bila profil risiko memiliki tolak ukur berupa kondisi psikis sang investor, ada pula risiko investasi yang tidak boleh luput dari investor.

Dalam investasi, terdapat dua jenis risiko yaitu sistematis dan non-sistematis. Sistematis merupakan risiko yang sama sekali tak bisa dihindari dan diversifikasi, serta menyerang ke segala macam instrumen. Risiko tersebut bisa berupa risiko pasar, perubahan tingkat suku bunga, dan inflasi. Sementara itu risiko non-sistemik dinyatakan sebagai risiko yang masih bisa dihindari dengan cara diversifikasi instrumen investasi. Risiko tersebut antara lain adalah, risiko bisnis, risiko likuiditas, dan risiko tuntutan hukum.

Itulah hal-hal yang harus diketahui sebelum terjun berinvestasi. Pastikan sudah mengetahui jenis, risiko, hingga cara berinvestasi yang baik agar tujuan keuangan kita bisa tercapai.

K. Risiko dan Strategi Investasi di Pasar Modal

1. Risiko Investasi di Pasar Modal

Risiko investasi di pasar modal berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (*price volatility*). Menurut (Rustiana et al., 2022), risiko yang mungkin dihadapi investor antara lain sebagai berikut.

1) Risiko daya beli (*purchasing power risk*).

Sifat investor dalam menangani faktor risiko di pasar modal ini terdiri atas dua, yaitu investor yang tidak menyukai risiko (*risk averter*) dan investor justru menyukai menantang risiko (*risk averse*). Bagi investor, kategori pertama itu akan mencari atau memilih jenis investasi yang akan memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau *capital gain* dalam waktu yang tidak lama. Akan tetapi, apabila investasi tersebut memberikan waktu 10 tahun untuk mencapai 60% keuntungan sementara tingkat inflasi selama jangka waktu tersebut telah naik melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang daya belinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula. Oleh karena itu, risiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil.

2) Risiko bisnis (*business risk*).

Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunkan kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan (emiten) membayar bunga atau dividen.

3) Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*).

Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat berharga yang berpendapatan tetap termasuk harga saham. Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga instrumen pasar modal. Risiko naiknya tingkat bunga misalnya, jelas akan menurunkan harga di pasar modal.

4) Risiko pasar (*market risk*).

Apabila pasar bergairah (*bullish*) umumnya hampir semua harga saham di Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu (*beaish*), saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga surat berharga anjlok terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan.

5) Risiko likuiditas (*liquidity risk*).

Risiko itu berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti.

2. Strategi Investasi di Pasar Modal

Keuntungan (*capital gain*) dan kerugian (*capital loss*) bagi investor sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menganalisis keadaan harga saham dan kemungkinan turun naiknya harga di Bursa. Menurut (Rustiana et al., 2022), beberapa strategi dalam melakukan investasi di Bursa Efek (khususnya dalam bentuk saham) sebagai berikut.

1) Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio.

Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke beberapa jenis saham. Peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Kerugian pada salah satu jenis saham dapat tertutupi oleh keuntungan pada jenis saham lainnya.

2) Beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa.

3) Beli dan simpan.

Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar. Keuntungan yang dapat diperoleh dari strategi ini di samping dividen juga *capital gain*.

4) Beli saham tidur.

Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini dapat disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama (pendiri perusahaan). Atau dapat pula disebabkan oleh kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek usahanya masih kurang cerah sehingga kurang mendapat perhatian pemodal.

5) Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain.

Investor yang memilih strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Investor seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga- harga saham di Bursa.

6) Konsentrasi pada industri tertentu.

Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. Investor dapat memilih beberapa saham perusahaan yang bank yang memiliki bisnis dalam sektor industri yang bersangkutan.

7) Reksa dana.

Melakukan investasi dengan membeli unit penyerataan atau saham yang diterbitkan oleh reksa dana. Strategi ini cocok bagi investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi. Biasanya investor pemula cenderung memilih jenis investasi ini.

L. Penutup

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memanfaatkan pasar modal. Pasar modal menjalankan fungsi-fungsi, yaitu pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Jenis instrumen investasi yang bisa menjadi pertimbangan dalam memulai berinvestasi di pasar modal tersebut, deposito, obligasi, logam mulia, reksadana, saham, properti, P2P *lending*. Kemudian investor harus memperhatikan risiko yang mungkin akan dihadapi, risiko tersebut sebagai berikut, risiko daya beli (*purchasing power risk*), risiko bisnis (*business risk*), risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko pasar (*market risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*).

Referensi

- Fitria Puteri Sholikhah, Putri, W., & Rosalinda Maria Djangi. (2022). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 341–345. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.496>
- Martalena dan Malinda, M. (2012). Pengantar Pasar Modal. Yogyakarta: ANDI.
- Muklis, F. (2016). Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(1), 48–57. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.4>
- Rustiana, D., Ramadhani, S., & Batubara, M. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1578–1589.
- Suhartono dan Qudsi, Fadillah. 2009. Portofolio Investasi dan Bursa Efek Pendekatan Teori dan Praktik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1995. Tentang. Pasar Modal

Profil Penulis



Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si

Lahir di Palembang 1 Januari 1971. Telah menyelesaikan strata satu di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2000), Lulus strata dua di Program Studi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (2007), dan strata tiga di Program Studi Ilmu Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Bengkulu (2024). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Bengkulu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang. Penulis aktif dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ekonomi Internasional

Oleh: Eko Sudarmanto

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Ekonomi internasional adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi ekonomi antara negara-negara di dunia. Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, pemahaman tentang ekonomi internasional menjadi sangat penting untuk memahami dinamika perdagangan, investasi, dan aliran modal antar negara. Perdagangan internasional tidak hanya mencakup pertukaran barang dan jasa, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kebijakan ekonomi, seperti tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan bebas. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ekonomi internasional, negara-negara dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk memanfaatkan peluang pasar global dan mengatasi tantangan yang muncul.

Di era globalisasi, negara-negara saling tergantung dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga politik. Ketergantungan ini menciptakan kebutuhan untuk kerja sama internasional yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan bersama, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan krisis kesehatan global. Dalam konteks ini, organisasi internasional, seperti World Trade Organization (WTO) dan International Monetary Fund (IMF), memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan dan mendukung pertumbuhan

ekonomi global. Dengan demikian, studi ekonomi internasional tidak hanya relevan untuk akademisi dan peneliti, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum yang ingin memahami dan beradaptasi dengan realitas ekonomi global yang terus berubah.

A. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar negara yang menjadi salah satu pilar utama dari ekonomi global. Konsep ini mencakup semua aktivitas ekonomi yang dilakukan di luar batas negara, termasuk ekspor dan impor. Perdagangan internasional tidak hanya menguntungkan negara-negara yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat global dengan memperluas akses terhadap barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja.

1. Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional berusaha menjelaskan mengapa negara-negara melakukan perdagangan dan bagaimana perdagangan ini berlangsung. Beberapa teori klasik dan modern dalam perdagangan internasional meliputi:

- a) Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith). Teori ini menyatakan bahwa suatu negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Dengan demikian, setiap negara akan memiliki spesialisasi yang menguntungkan dalam menghasilkan barang tertentu (Smith, 1776).
- b) Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo). Teori ini mengungkapkan bahwa bahkan jika suatu negara lebih efisien dalam memproduksi semua barang, negara tersebut tetap harus mengkhususkan diri pada barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dan melakukan perdagangan untuk barang lainnya (Ricardo, 1817).
- c) Teori Heckscher-Ohlin. Teori ini berfokus pada perbedaan dalam faktor produksi antara negara-negara, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Negara yang memiliki banyak faktor

produksi tertentu akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang membutuhkan faktor tersebut (Heckscher & Ohlin, 1991).

2. Manfaat Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat:

- a) Akses ke Pasar yang Lebih Luas. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat mengakses pasar yang lebih besar untuk produk mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan volume produksi dan menurunkan biaya per unit (Krugman & Obstfeld, 2022).
- b) Diversifikasi Produk. Perdagangan internasional memperluas pilihan barang dan jasa yang tersedia bagi konsumen, yang meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan konsumen (Gourinchas & Parker, 2002).
- c) Peningkatan Efisiensi Ekonomi. Melalui spesialisasi dan pembagian kerja, perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, mendorong efisiensi dalam produksi dan meminimalkan pemborosan sumber daya (Melitz, 2003).
- d) Inovasi dan Transfer Teknologi. Perdagangan internasional juga menjadi sarana bagi transfer teknologi dan inovasi antar negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas (Braconier et al., 2016).

3. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi arus perdagangan internasional dan dampak yang ditimbulkannya. Kebijakan tersebut meliputi:

- a) Tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Tarif bertujuan untuk melindungi industri domestik dengan membuat barang asing menjadi lebih mahal, tetapi dapat juga mengurangi daya saing produk domestik di pasar global (Baldwin, 2006).
- b) Kuota. Kuota adalah batasan jumlah barang yang dapat diimpor selama periode tertentu, yang bertujuan untuk melindungi industri

domestik dengan mengurangi jumlah barang asing yang masuk (Lim & Tien, 2021).

- c) Perjanjian Perdagangan. Negara-negara sering kali membentuk perjanjian perdagangan untuk mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota. Contoh perjanjian perdagangan internasional yang terkenal adalah North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) (Petri & Plummer, 2022).

4. Globalisasi dan Perdagangan Internasional

Globalisasi telah mengubah cara perdagangan internasional berlangsung. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, arus barang dan jasa telah menjadi lebih cepat dan efisien. Globalisasi menciptakan jaringan pasokan global di mana komponen produk diproduksi di berbagai negara sebelum dirakit menjadi barang akhir. Hal ini menciptakan ketergantungan antara negara-negara dan meningkatkan kompleksitas perdagangan internasional (Rodrik, 2018).

Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan, seperti meningkatnya ketidaksetaraan antara negara kaya dan negara berkembang, serta dampak lingkungan yang negatif. Oleh karena itu, banyak negara dan organisasi internasional bekerja sama untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang berkelanjutan dan adil (Stiglitz, 2002).

5. Isu Kontemporer dalam Perdagangan Internasional

Beberapa isu kontemporer mempengaruhi perdagangan internasional, antara lain:

- a) Perubahan Iklim. Perdagangan internasional dapat berkontribusi pada perubahan iklim, baik melalui emisi gas rumah kaca dari transportasi barang maupun dampak lingkungan dari produksi (Böhringer & Rutherford, 2008).
- b) Perdagangan yang Adil. Isu keadilan sosial dan perlindungan hak pekerja semakin mendapat perhatian dalam perdagangan internasional, di mana banyak organisasi masyarakat sipil

mendorong agar negara-negara memperhatikan standar kerja yang adil (Nichols, 2021).

- c) Perang Dagang. Ketegangan antara negara-negara besar, seperti AS dan Tiongkok, telah menghasilkan perang dagang, yang mengakibatkan penerapan tarif tinggi dan penurunan arus perdagangan. Hal ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi global (Bown, 2021).

B. Investasi Asing Langsung

Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*) merupakan salah satu bentuk investasi di mana individu atau perusahaan dari suatu negara menanamkan modal dalam bentuk aset fisik atau operasional di negara lain. FDI biasanya melibatkan partisipasi aktif dalam manajemen, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di negara tujuan. Dengan demikian, FDI tidak hanya membawa aliran modal, tetapi juga berbagai manfaat lain yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara yang menerima investasi.

FDI dapat didefinisikan sebagai investasi yang dilakukan oleh investor asing dengan tujuan untuk mendapatkan kepemilikan yang signifikan dalam perusahaan yang beroperasi di negara lain. FDI dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) *Greenfield Investment*. Ini adalah bentuk investasi di mana investor asing membangun fasilitas baru di negara tuan rumah dari awal. Misalnya, perusahaan asing dapat membangun pabrik baru di negara lain untuk memproduksi barang secara lokal.
- 2) *Brownfield Investment*. Ini melibatkan akuisisi atau pengembangan fasilitas yang sudah ada. Dalam hal ini, investor asing membeli atau mengupgrade perusahaan lokal yang sudah beroperasi.
- 3) *Joint Ventures*. Dalam model ini, investor asing bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membentuk entitas baru. Kedua belah pihak berbagi modal, risiko, dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha bersama tersebut (Dunning & Lundan, 2008).

Terdapat berbagai motivasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan FDI, di antaranya:

- a) Akses ke pasar. Salah satu alasan utama perusahaan melakukan FDI adalah untuk mengakses pasar baru. Dengan berinvestasi di negara lain, perusahaan dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan produk mereka (Markusen, 2002).
- b) Pengurangan biaya produksi. Investasi di negara dengan biaya produksi yang lebih rendah dapat membantu perusahaan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keuntungan. Negara-negara berkembang sering kali menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara maju (Graham & Krugman, 1991).
- c) Akses ke sumber daya alam. Banyak perusahaan melakukan FDI untuk mendapatkan akses langsung ke sumber daya alam yang penting bagi produksi mereka, seperti mineral, energi, atau bahan baku lainnya (Wang & Wang, 2012).
- d) Transfer teknologi dan inovasi. Melalui FDI, perusahaan dapat memindahkan teknologi dan praktik terbaik ke negara tujuan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri lokal (Keller, 2004).

FDI memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara tuan rumah. Beberapa manfaat utama FDI meliputi:

- 1) Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. FDI meningkatkan aliran investasi ke negara yang menerima investasi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing sering kali menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur (Borensztein, De Gregorio, & Lee, 1998).
- 2) Transfer pengetahuan dan teknologi. DI memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi dari perusahaan multinasional ke perusahaan lokal, yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan inovasi di negara tuan rumah (Ghoshal & Bartlett, 1990).
- 3) Peningkatan persaingan. Kehadiran perusahaan asing dapat meningkatkan persaingan di pasar lokal, yang pada gilirannya dapat mendorong perusahaan domestik untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi mereka (Blomström & Kokko, 1998).

- 4) Pengembangan sumber daya manusia (SDM). Perusahaan asing sering kali membawa standar manajemen dan pelatihan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara tuan rumah (Lall, 2002).

Meskipun FDI membawa banyak manfaat, ada juga tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan:

- 1) Ketergantungan ekonomi. Negara yang terlalu bergantung pada FDI dapat menghadapi risiko jika perusahaan-perusahaan asing memutuskan untuk menarik investasi mereka, yang dapat berdampak negatif pada ekonomi lokal (Meyer, 2004).
- 2) Persaingan yang tidak seimbang. Kehadiran perusahaan multinasional dapat menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan lokal, terutama jika perusahaan asing memiliki akses yang lebih baik ke modal, teknologi, dan pasar internasional (Graham, 2000).
- 3) Dampak lingkungan. FDI, terutama di sektor ekstraktif seperti pertambangan dan energi, dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi negara tuan rumah untuk menerapkan regulasi yang ketat dalam pengelolaan sumber daya alam (Jenkins & Yakovleva, 2006).

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi FDI. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: (a) Menyediakan insentif pajak. Pemerintah dapat menawarkan insentif pajak dan fasilitas lain untuk menarik investor asing, seperti pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak selama periode tertentu (Sullivan & Sheffrin, 2003). (b) Meningkatkan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur, seperti transportasi, komunikasi, dan energi, dapat meningkatkan daya tarik suatu negara sebagai lokasi FDI (World Bank, 2020). (c) Stabilitas politik dan ekonomi. Menciptakan lingkungan politik yang stabil dan transparan sangat penting untuk menarik FDI. Investor asing cenderung mencari negara dengan risiko politik yang rendah dan kebijakan ekonomi yang konsisten (UNCTAD, 2021).

C. Kebijakan Perdagangan dan Perlindungan

Kebijakan perdagangan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mempengaruhi arus barang dan jasa

di dalam dan luar negeri. Kebijakan ini berperan penting dalam menentukan bagaimana negara berinteraksi dalam perdagangan internasional, termasuk penetapan tarif, kuota, dan regulasi lainnya. Kebijakan perlindungan, di sisi lain, merujuk pada upaya untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing yang dianggap merugikan. Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, kebijakan perdagangan dan perlindungan memainkan peran penting dalam mempengaruhi ekonomi suatu negara.

1. Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan mencakup dua pendekatan utama: perdagangan bebas dan proteksionisme.

Perdagangan bebas. Ini adalah kebijakan yang mendorong penghapusan hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota. Tujuan dari perdagangan bebas adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memungkinkan barang dan jasa bergerak bebas di antara negara-negara. Contoh dari kebijakan ini adalah perjanjian perdagangan bebas (PTA) yang dihasilkan melalui negosiasi antara negara-negara, seperti NAFTA (North American Free Trade Agreement) dan EU (European Union).

Proteksionisme. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik dengan memberlakukan tarif tinggi pada barang impor, kuota untuk membatasi jumlah barang yang dapat diimpor, dan berbagai regulasi yang mempersulit masuknya barang asing ke pasar domestik. Proteksionisme sering kali digunakan untuk melindungi pekerjaan dan mendorong pertumbuhan industri lokal (Irwin, 1996).

2. Tarif dan Kuota

Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. Tarif ini dapat bersifat *ad valorem* (persentase dari nilai barang) atau spesifik (jumlah tetap per unit barang). Kebijakan tarif dapat digunakan untuk:

- a) Menghasilkan pendapatan. Pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari tarif yang dikenakan pada barang impor.

- b) Mendorong konsumsi barang domestik. Dengan meningkatkan harga barang impor, tarif dapat mendorong konsumen untuk membeli barang yang diproduksi secara lokal.

Kuota adalah pembatasan pada jumlah atau nilai barang yang dapat diimpor selama periode tertentu. Dengan menetapkan kuota, pemerintah dapat melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Meskipun kuota efektif dalam jangka pendek, mereka sering kali menghasilkan ketidakpuasan di kalangan konsumen karena terbatasnya pilihan produk dan potensi kenaikan harga (Bhagwati, 1988).

3. Regulasi dan Standar

Selain tarif dan kuota, kebijakan perdagangan juga mencakup regulasi dan standar. Regulasi ini dapat meliputi:

- a) Standar kualitas. Pemerintah dapat menetapkan standar kualitas untuk barang impor untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau berkualitas rendah. Ini dapat mencakup regulasi tentang keamanan makanan, kesehatan, dan lingkungan.
- b) Labeling dan informasi konsumen. Kebijakan ini memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang mereka beli, termasuk asal-usul, bahan, dan potensi risiko kesehatan.

4. Dampak Kebijakan Perdagangan dan Perlindungan

Kebijakan perdagangan dan perlindungan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi, baik positif maupun negatif. Beberapa dampak tersebut antara lain:

- a) Pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perdagangan yang proaktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses ke pasar internasional, yang memungkinkan produsen domestik untuk menjual lebih banyak barang dan jasa. Dengan demikian, negara dapat menikmati peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi (Krugman & Obstfeld, 2018).
- b) Penciptaan lapangan kerja. Perlindungan industri lokal dapat membantu menjaga lapangan kerja di sektor-sektor tertentu.

Namun, perlindungan jangka panjang dapat mengarah pada inefisiensi dan menghambat inovasi, karena perusahaan domestik mungkin tidak terdorong untuk bersaing di pasar global (Tybout, 2000).

- c) Kenaikan harga untuk konsumen. Kebijakan proteksionis, seperti tarif dan kuota, dapat menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen, karena barang impor menjadi lebih mahal. Hal ini dapat menurunkan daya beli konsumen dan mengurangi kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.
- d) Retaliasi dan perang dagang. Ketika satu negara memberlakukan kebijakan proteksionis, negara lain sering kali merespons dengan tindakan serupa, yang dapat mengarah pada perang dagang. Perang dagang dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar internasional dan merugikan semua pihak yang terlibat (Bown, 2019).

Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, telah menerapkan kebijakan perdagangan dan perlindungan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Amerika Serikat menerapkan tarif pada barang impor dari Tiongkok sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi defisit perdagangan dan melindungi industri domestik. Tindakan ini memicu respons dari Tiongkok, yang memberlakukan tarif balasan pada produk-produk Amerika (Liu, 2020).

Kebijakan perdagangan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, perubahan teknologi, dan pergeseran dalam struktur ekonomi dunia memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif. Selain itu, isu-isu seperti perubahan iklim dan ketidakadilan sosial semakin mempengaruhi cara negara merumuskan kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan perdagangan dan perlindungan yang diambil (OECD, 2019).

D. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi telah menjadi salah satu fenomena utama yang mengubah tatanan ekonomi internasional dalam beberapa dekade terakhir. Secara sederhana, globalisasi adalah proses integrasi antara negara-negara melalui pergerakan barang, jasa, informasi, modal, dan manusia yang

semakin intensif. Di bidang ekonomi internasional, globalisasi berperan besar dalam membentuk pola perdagangan, investasi, dan produksi yang melibatkan berbagai negara. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi internasional terlihat dari beberapa aspek penting, seperti liberalisasi perdagangan, peningkatan arus modal internasional, kemajuan teknologi, serta pergeseran peran negara dalam perekonomian.

1. Liberalisasi Perdagangan

Salah satu dampak paling nyata dari globalisasi dalam ekonomi internasional adalah liberalisasi perdagangan. Globalisasi mendorong negara-negara untuk membuka pasar mereka melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, serta partisipasi dalam organisasi perdagangan multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut laporan WTO (2022), liberalisasi perdagangan telah meningkatkan volume perdagangan global secara signifikan. Arus perdagangan barang dan jasa antarnegara meningkat pesat, memungkinkan negara-negara untuk mengeksport produk yang mereka produksi secara efisien dan mengimpor barang yang mereka butuhkan dari negara lain. Dampak dari liberalisasi ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup di banyak negara, meskipun tidak semua negara dapat merasakan manfaat yang sama.

Namun, liberalisasi perdagangan juga menimbulkan tantangan bagi beberapa sektor. Negara-negara berkembang yang ekonominya bergantung pada produk primer sering kali menghadapi kesulitan bersaing dengan negara maju yang memiliki teknologi lebih canggih dan kapasitas produksi lebih tinggi. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antarnegara, khususnya jika kebijakan-kebijakan proteksi domestik tidak dijalankan dengan efektif (Stiglitz, 2018).

2. Arus Modal Internasional

Globalisasi juga mempercepat arus modal internasional. Negara-negara tidak hanya memperdagangkan barang dan jasa, tetapi juga modal finansial. Investor dari berbagai negara kini dengan mudah dapat menanamkan modal mereka di negara lain, baik melalui investasi

langsung (Foreign Direct Investment/FDI) maupun portofolio. Menurut laporan dari UNCTAD (2023), aliran FDI global mencapai \$1,58 triliun pada tahun 2022, menunjukkan pentingnya peran modal internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global.

FDI berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dengan cara memperkenalkan teknologi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Namun, peningkatan arus modal internasional juga menghadirkan risiko baru, seperti ketidakstabilan finansial. Negara-negara dengan pasar modal yang kurang matang sering kali rentan terhadap gejolak ekonomi global, terutama ketika ada penarikan modal besar-besaran oleh investor asing selama krisis ekonomi global (Eichengreen, 2020).

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi, yang merupakan salah satu motor penggerak globalisasi, memiliki dampak signifikan dalam ekonomi internasional. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah mengubah cara bisnis dilakukan, baik di pasar domestik maupun internasional. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan jasa mereka secara global tanpa harus memiliki kehadiran fisik di negara-negara lain. Menurut laporan McKinsey Global Institute (2023), teknologi digital telah meningkatkan produktivitas ekonomi global dan memperluas akses pasar bagi bisnis kecil dan menengah, khususnya di negara-negara berkembang.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga mengubah dinamika kompetisi antarnegara. Negara-negara yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dapat meraih keuntungan komparatif yang signifikan, sementara negara-negara yang tertinggal dalam adopsi teknologi mungkin mengalami kesulitan bersaing di pasar global (Schwab, 2021). Ini menciptakan kebutuhan bagi negara-negara untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi dan pendidikan guna memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi global.

4. Peran Negara dalam Ekonomi Global

Dalam era globalisasi, peran negara dalam mengelola perekonomian semakin kompleks. Di satu sisi, negara-negara didorong untuk mengadopsi kebijakan yang mendorong keterbukaan ekonomi, termasuk mengurangi hambatan perdagangan dan memperbaiki iklim investasi. Namun, di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa globalisasi tidak mengorbankan kepentingan domestik, seperti lapangan kerja, kesejahteraan sosial, dan stabilitas ekonomi.

Salah satu tantangan utama bagi negara dalam konteks globalisasi adalah menemukan keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan proteksi domestik. Banyak negara, terutama negara-negara berkembang, berjuang untuk melindungi sektor-sektor penting dalam ekonomi mereka dari persaingan internasional yang tidak adil. Menurut Rodrik (2022), kebijakan proteksionisme yang terlalu ekstrem dapat mengisolasi negara dari manfaat globalisasi, namun terlalu banyak keterbukaan tanpa perlindungan yang memadai juga dapat merusak industri lokal dan menyebabkan kerugian sosial yang signifikan.

5. Ketidaksetaraan Ekonomi Global

Globalisasi juga membawa dampak pada ketidaksetaraan ekonomi global. Meskipun globalisasi telah membantu mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, terutama di negara-negara seperti China dan India, ada bukti yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang tetap menjadi masalah serius. Negara-negara maju yang memiliki akses ke teknologi canggih dan modal yang besar cenderung mendapatkan manfaat lebih banyak dari globalisasi dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang sumber dayanya terbatas (Piketty, 2020).

Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga di dalam negara. Di banyak negara, golongan yang lebih kaya cenderung mendapatkan manfaat lebih banyak dari integrasi global, sedangkan golongan berpendapatan rendah sering kali menderita akibat dari perubahan struktural yang dibawa oleh globalisasi, seperti perpindahan pekerjaan ke luar negeri dan menurunnya upah pekerja domestik (Bourguignon, 2018).

E. Dampak Ekonomi Makro

Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aliran barang, jasa, dan faktor produksi lintas batas negara. Dalam konteks ekonomi makro, ekonomi internasional berdampak signifikan pada berbagai variabel utama, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan keseimbangan neraca pembayaran. Integrasi pasar global melalui perdagangan internasional, arus modal, serta teknologi telah mengubah lanskap ekonomi banyak negara, menciptakan peluang baru, tetapi juga tantangan yang perlu dikelola secara efektif.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu dampak makroekonomi yang paling signifikan dari keterlibatan dalam ekonomi internasional adalah pertumbuhan ekonomi. Teori perdagangan internasional menyatakan bahwa dengan spesialisasi dan efisiensi produksi, negara-negara dapat menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif, yang kemudian diekspor untuk mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan dari negara lain. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan Bank Dunia (2023), keterlibatan negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional melalui ekspor manufaktur dan barang-barang teknologi tinggi telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional dan penurunan tingkat kemiskinan.

Namun, tidak semua negara merasakan manfaat yang sama. Negara-negara dengan kapasitas produksi terbatas atau yang terlalu bergantung pada ekspor komoditas sering kali mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, terutama saat harga komoditas global turun. Di negara-negara berkembang, globalisasi dapat memperlebar kesenjangan antara sektor yang berorientasi ekspor dan sektor domestik yang kurang kompetitif (Rodrik, 2022).

2. Inflasi

Ekonomi internasional juga memengaruhi tingkat inflasi suatu negara. Ketika suatu negara terlibat dalam perdagangan global, harga barang

dan jasa di pasar domestiknya sering kali dipengaruhi oleh harga internasional. Ketika harga impor meningkat, hal itu dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi dan inflasi impor di negara tersebut. Misalnya, fluktuasi harga minyak global sering kali berdampak langsung pada inflasi di banyak negara, terutama yang bergantung pada impor energi. Menurut International Monetary Fund (2023), volatilitas harga energi global adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi inflasi global dalam beberapa tahun terakhir.

Sebaliknya, perdagangan internasional juga dapat menurunkan inflasi dalam situasi di mana impor barang yang lebih murah menggantikan produksi domestik yang mahal. Misalnya, impor barang-barang murah dari negara-negara berkembang dapat menekan harga barang konsumsi di negara-negara maju, sehingga membantu menekan tingkat inflasi. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada impor juga dapat membuat suatu negara rentan terhadap inflasi eksternal ketika nilai tukar mata uangnya melemah (Krugman & Obstfeld, 2022).

3. Pengangguran

Keterlibatan dalam ekonomi internasional juga dapat berdampak pada tingkat pengangguran suatu negara. Di satu sisi, ekspansi perdagangan internasional dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Peningkatan ekspor meningkatkan produksi dan pada akhirnya menciptakan lebih banyak pekerjaan. Studi oleh OECD (2022) menunjukkan bahwa negara-negara dengan integrasi perdagangan yang lebih kuat cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah karena pertumbuhan lapangan kerja yang dipicu oleh ekspor.

Namun, dampak ini tidak merata. Sektor-sektor yang tidak kompetitif di pasar global, seperti industri manufaktur di negara maju yang menghadapi persaingan dari negara dengan biaya produksi rendah, sering kali mengalami penurunan lapangan kerja. Pekerjaan di sektor-sektor ini sering kali berpindah ke negara-negara berkembang dengan biaya tenaga kerja lebih murah, menyebabkan pengangguran struktural di negara-negara maju. Dampak negatif ini sering disebut sebagai

"deindustrialisasi" di negara-negara maju yang mengalami penurunan pangsa manufaktur dalam total output ekonomi mereka (Autor, 2022).

4. Neraca Pembayaran dan Defisit Perdagangan

Ekonomi internasional juga berdampak langsung pada neraca pembayaran dan keseimbangan perdagangan suatu negara. Neraca pembayaran adalah catatan semua transaksi ekonomi yang dilakukan antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain dalam periode tertentu. Salah satu komponen utama neraca pembayaran adalah neraca perdagangan, yang mencatat nilai ekspor dan impor barang serta jasa.

Ketika suatu negara memiliki lebih banyak impor daripada ekspor, itu menciptakan defisit perdagangan. Defisit ini sering kali dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau arus masuk investasi asing. Menurut data dari World Bank (2023), banyak negara berkembang menghadapi tantangan defisit perdagangan yang kronis karena ketergantungan mereka pada impor barang-barang konsumsi dan modal. Di sisi lain, negara-negara yang memiliki surplus perdagangan, seperti China dan Jerman, dapat memperkuat posisi ekonomi mereka di pasar global.

Namun, defisit perdagangan yang berkepanjangan dapat menimbulkan masalah ekonomi makro, seperti penurunan nilai mata uang dan peningkatan utang luar negeri. Dalam jangka panjang, negara-negara dengan defisit perdagangan yang besar mungkin menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi mereka, seperti melalui devaluasi mata uang atau pembatasan impor, guna mengurangi ketidakseimbangan ini (Obstfeld & Rogoff, 2022).

5. Kebijakan Moneter dan Fiskal

Dampak ekonomi internasional pada kebijakan moneter dan fiskal juga sangat signifikan. Globalisasi ekonomi membatasi ruang gerak kebijakan ekonomi makro, karena negara-negara harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan dinamika pasar global. Sebagai contoh, ketika suatu negara mengalami arus masuk modal besar-besaran, bank sentral mungkin menghadapi tekanan untuk menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun,

kenaikan suku bunga ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi domestik dan lapangan kerja.

Kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh ekonomi internasional, terutama dalam konteks globalisasi pajak. Negara-negara dengan beban pajak tinggi sering kali menghadapi arus keluar modal dan investasi, karena perusahaan multinasional mencari negara dengan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan. Ini menciptakan tantangan bagi negara-negara untuk merancang kebijakan pajak yang kompetitif di pasar global tanpa mengorbankan pendapatan negara (Feldstein, 2022).

6. Ketidakstabilan Keuangan Global

Ekonomi internasional, dengan aliran modal lintas batas dan perdagangan global yang semakin intensif, dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan keuangan global. Krisis ekonomi global seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1997–1998 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 menunjukkan bagaimana guncangan di satu negara atau wilayah dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia melalui saluran perdagangan dan keuangan. Ketergantungan pada arus modal asing membuat negara-negara berkembang sangat rentan terhadap perubahan sentimen investor di pasar global. Menurut laporan IMF (2023), volatilitas di pasar modal global masih menjadi salah satu tantangan utama bagi stabilitas keuangan di banyak negara.

Arus modal yang besar dan fluktuatif, terutama dalam bentuk investasi portofolio, dapat memicu ketidakstabilan nilai tukar dan mempengaruhi kebijakan moneter negara-negara berkembang. Hal ini membuat pentingnya pengelolaan risiko makroekonomi dan keuangan semakin krusial dalam ekonomi global yang terintegrasi (Reinhart & Rogoff, 2022).

F. Organisasi Internasional

Ekonomi internasional memainkan peran penting dalam menghubungkan negara-negara di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, dan arus modal. Dalam sistem ekonomi global ini, organisasi internasional memiliki peran yang sangat krusial. Organisasi-organisasi ini menciptakan kerangka kerja, regulasi, dan platform untuk

mendukung kerjasama ekonomi lintas batas, mendorong stabilitas, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa organisasi internasional terkemuka di bidang ekonomi internasional adalah World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank. Selain itu, ada pula organisasi regional seperti European Union (EU) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang memainkan peran besar dalam memperkuat integrasi ekonomi di wilayah mereka masing-masing.

1. World Trade Organization (WTO)

WTO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). WTO memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi perdagangan internasional, memastikan bahwa perdagangan dilakukan dengan adil, dan mempromosikan liberalisasi perdagangan global. Fungsi utama WTO adalah menyediakan forum bagi negara-negara anggota untuk melakukan negosiasi perjanjian perdagangan dan menyelesaikan perselisihan perdagangan.

Sebagai penjaga sistem perdagangan multilateral, WTO memiliki peran penting dalam mendorong perdagangan bebas dan adil. WTO mengawasi pelaksanaan perjanjian perdagangan yang bertujuan untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Perjanjian ini berfokus pada berbagai sektor, termasuk barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. WTO juga bertindak sebagai arbitrator dalam sengketa perdagangan, membantu negara-negara menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat kebijakan perdagangan domestik yang melanggar aturan perdagangan internasional (WTO, 2023).

Namun, WTO juga menghadapi tantangan, termasuk kritik bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan yang didorongnya sering kali lebih menguntungkan negara-negara maju dibandingkan negara berkembang. Negara-negara berkembang sering kali kesulitan untuk bersaing di pasar internasional karena berbagai kendala domestik, seperti infrastruktur yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang terbatas.

2. International Monetary Fund (IMF)

IMF didirikan pada tahun 1944 untuk mendukung stabilitas keuangan internasional dan mendorong kerjasama moneter global. Tugas utama IMF adalah menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mengalami krisis neraca pembayaran atau kesulitan ekonomi makro lainnya. Bantuan ini biasanya datang dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan kebijakan tertentu yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi negara penerima.

IMF juga memainkan peran penting dalam pemantauan ekonomi global. Melalui laporan-laporan seperti *World Economic Outlook* dan *Global Financial Stability Report*, IMF memberikan analisis mendalam tentang tren ekonomi global dan risiko yang mungkin mengancam stabilitas keuangan internasional. Selain itu, IMF berperan dalam menyediakan saran kebijakan kepada negara-negara anggotanya, membantu mereka mengatasi masalah ekonomi yang kompleks, seperti inflasi tinggi, ketidakstabilan mata uang, dan defisit anggaran (IMF, 2023).

Meski demikian, IMF tidak lepas dari kritik. Banyak yang berpendapat bahwa program pinjaman IMF sering kali disertai dengan persyaratan kebijakan yang terlalu ketat, seperti pengurangan subsidi dan peningkatan pajak, yang dapat memperburuk kondisi sosial di negara-negara penerima bantuan. Contohnya adalah krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, di mana beberapa negara merasa bahwa kebijakan IMF memperpanjang resesi yang mereka alami.

3. World Bank

World Bank atau Bank Dunia, juga didirikan pada tahun 1944, dan tujuan utamanya adalah memerangi kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Bank Dunia menyediakan pinjaman dan hibah untuk proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian di negara-negara berkembang. Berbeda dengan IMF yang lebih fokus pada stabilitas makroekonomi jangka pendek, Bank Dunia memiliki fokus yang lebih jangka panjang dalam upayanya

mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank Dunia bekerja sama dengan berbagai organisasi dan pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di negara-negara berkembang dan menyediakan dana serta bantuan teknis untuk proyek-proyek yang relevan. Sebagai contoh, proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Bank Dunia, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih, telah membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di banyak negara berkembang (World Bank, 2023).

Namun, seperti IMF, Bank Dunia juga sering menjadi sasaran kritik. Beberapa proyek yang didanai Bank Dunia dinilai tidak ramah lingkungan atau tidak memperhatikan hak-hak masyarakat lokal. Ada pula kekhawatiran bahwa pendanaan proyek-proyek besar ini dapat meningkatkan beban utang negara-negara berkembang, terutama jika proyek-proyek tersebut tidak menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.

4. European Union (EU)

European Union adalah organisasi regional yang mengintegrasikan ekonomi negara-negara anggotanya, dengan tujuan utama menciptakan pasar tunggal dan mata uang bersama (Euro) di sebagian besar anggotanya. Dengan pasar tunggal, barang, jasa, tenaga kerja, dan modal dapat bergerak bebas di antara negara-negara anggota, menciptakan lingkungan ekonomi yang terintegrasi dan efisien.

Selain itu, EU juga menerapkan kebijakan ekonomi yang koheren, seperti kebijakan persaingan dan kebijakan lingkungan, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi di seluruh wilayahnya. Dengan adanya mata uang tunggal, negara-negara anggota yang menggunakan Euro juga menikmati stabilitas nilai tukar yang lebih besar dalam perdagangan internasional di antara mereka. Ini juga mengurangi risiko mata uang dan biaya transaksi yang biasanya muncul dalam perdagangan internasional (European Commission, 2023).

Namun, integrasi ekonomi melalui EU juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah pengelolaan kebijakan fiskal di zona Euro, di mana negara-negara anggota memiliki kedaulatan fiskal masing-masing tetapi berbagi satu kebijakan moneter. Krisis utang Eropa pada awal 2010-an adalah contoh bagaimana ketidakseimbangan ekonomi antara negara-negara anggota dapat menimbulkan ketegangan di seluruh wilayah tersebut.

5. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara dengan tujuan utama mempromosikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kerjasama sosial-budaya di kawasan tersebut. Salah satu inisiatif penting ASEAN di bidang ekonomi adalah pembentukan ASEAN Economic Community (AEC), yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi di Asia Tenggara. AEC berupaya menghilangkan hambatan perdagangan intra-ASEAN dan memperkuat daya saing kawasan di pasar global (ASEAN, 2023).

Selain itu, ASEAN juga berperan sebagai platform untuk negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara besar di luar kawasan, seperti China, Jepang, dan India. Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi negara-negara anggota dan mendorong investasi asing ke kawasan ASEAN. Namun, ASEAN juga menghadapi tantangan dalam proses integrasi ekonomi, terutama karena perbedaan tingkat pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggotanya.

G. Penutup

Ekonomi Internasional dalam konteks Pengantar Ilmu Ekonomi menyoroti peran penting yang dimainkan oleh interaksi ekonomi antar negara dalam mempengaruhi perekonomian global. Ekonomi internasional mencakup berbagai aspek seperti perdagangan internasional, arus investasi, perpindahan tenaga kerja, hingga kebijakan fiskal dan moneter yang lintas batas. Fenomena ini mendorong keterkaitan yang semakin erat antara negara-negara, sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendalam.

Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, serta mengakses pasar yang lebih luas. Arus modal global juga membuka peluang investasi, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi. Namun, ekonomi internasional juga membawa tantangan, seperti ketidakstabilan finansial global dan ketimpangan ekonomi antar negara. Krisis ekonomi di satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain melalui saluran perdagangan dan keuangan.

Organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia memiliki peran penting dalam mengatur kerangka kerja ekonomi global dan membantu menciptakan stabilitas di antara negara-negara. Dengan demikian, studi tentang ekonomi internasional memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan dan dinamika global dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi domestik serta hubungan antarnegara di seluruh dunia.

Referensi

- ASEAN. (2023). *ASEAN Economic Integration Brief: Promoting Inclusive Growth*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Autor, D. H. (2022). *The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Baldwin, R. (2006). *Globalization: The Great Unbundling(s)*. In: *The Growth of Globalization, NBER Working Paper No. 12571*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Bank Dunia. (2023). *World Development Report 2023: Trading for Development*. Washington, DC: World Bank.
- Bhagwati, J. (1988). *Protectionism*. MIT Press, Cambridge.
- Blomström, M., & Kokko, A. (1998). *Multinational Corporations and Spillovers*. *Journal of Economic Surveys*, 12(3), 247-277.
- Böhringer, C., & Rutherford, T. F. (2008). *The Impact of Trade Liberalization on the Environment: A CGE Model for Global Analysis*. In: *Trade, Globalization, and Development: A Handbook*. Springer.
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115-135.
- Bourguignon, F. (2018). *The Globalization of Inequality*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bown, C. P. (2019). *The WTO and the Global Trade System*. Brookings Institution Press, Washington, D.C.
- Bown, C. P. (2021). The WTO and the Crisis of Globalization. *International Economics and Economic Policy*, 18(1), 33-55.
- Braconier, H., T. K. B., & T. H. (2016). Trade, Technology, and Firm Performance: Evidence from Swedish Manufacturing Firms. *Journal of International Economics*, 101, 67-82.

- Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). *Multinational Enterprises and the Global Economy*. 2nd Edition. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- Eichengreen, B. (2020). *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System (3rd ed.)*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- European Commission. (2023). *Annual Report on the Euro Area 2023*. Brussels: European Commission.
- Feldstein, M. (2022). *International Economic Policy in the Age of Globalization*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ghoshal, S., & Bartlett, C. A. (1990). The Multinational Corporation as an Interorganizational Network. *Academy of Management Review*, 15(4), 603-625.
- Gourinchas, P. O., & Parker, J. A. (2002). Exchange Rates and Foreign Direct Investment: A Multi-Country Approach. *Review of International Economics*, 10(2), 267-290.
- Graham, E. M. (2000). Foreign Direct Investment in the United States: An Overview of the Economic Literature. *International Trade and Investment*, 23, 1-24.
- Graham, E. M., & Krugman, P. R. (1991). *Foreign Direct Investment in the United States*. 2nd Edition. Institute for International Economics, Washington, D.C.
- Heckscher, E., & Ohlin, B. (1991). *Heckscher-Ohlin Trade Theory*. MIT Press, Cambridge.
- IMF. (2023). *World Economic Outlook 2023: Global Prospects and Policies*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- International Monetary Fund. (2023). *World Economic Outlook 2023*. Washington, DC: IMF.
- Irwin, D. A. (1996). *Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade*. Princeton University Press, Princeton.

- Jenkins, H., & Yakovleva, N. (2006). Corporate Social Responsibility in the Mining Industry: Exploring Trends in Social and Environmental Disclosure. *Journal of Cleaner Production*, 14(3-4), 271-284.
- Keller, W. (2004). International Technology Diffusion. *Journal of Economic Literature*, 42(3), 752-782.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2022). *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). New York: Pearson.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (2018). *International Economics: Theory and Policy*. Pearson, Boston.
- Lall, S. (2002). *FDI and Development: A Review of the Evidence*. In: G. G. U. A. R. K. A. K. R. (Eds.), *Foreign Direct Investment: A Global Perspective*. Palgrave Macmillan, New York.
- Lim, W. H., & Tien, L. S. (2021). *Trade Policy: Theory and Practice*. Routledge, London.
- Liu, Z. (2020). US-China Trade War: Economic Impacts and Future Outlook. *Journal of Asian Economics*, 68, 101249.
- Markusen, J. R. (2002). *Multinational Firms and the Theory of International Trade*. MIT Press, Cambridge.
- McKinsey Global Institute. (2023). *The Digital Economy Report*. New York: McKinsey & Company.
- Melitz, M. J. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695-1725.
- Meyer, K. E. (2004). Perspectives on Multinational Enterprises in Emerging Economies. *Journal of International Business Studies*, 35(4), 259-276.
- Nichols, J. (2021). Trade and Labor Rights: A Critical Review of the Literature. *Journal of International Trade & Economic Development*, 30(3), 329-349.

- Obstfeld, M., & Rogoff, K. (2022). *Foundations of International Macroeconomics*. Cambridge, MA: MIT Press.
- OECD. (2019). *Trade Policy Responses to the COVID-19 Crisis*. OECD Publishing, Paris.
- OECD. (2022). *Employment Outlook 2022*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2022). The Economic Effects of Regional Trade Agreements: A Comprehensive Analysis. *Asian Economic Policy Review*, 17(2), 210-230.
- Piketty, T. (2020). *Capital and Ideology*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2022). *This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray, London.
- Rodrik, D. (2018). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton University Press, Princeton.
- Rodrik, D. (2022). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Schwab, K. (2021). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell, London.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company, New York.
- Stiglitz, J. E. (2018). *Globalization and Its Discontents Revisited*. New York: W.W. Norton & Company.
- Sullivan, A., & Sheffrin, S. M. (2003). *Economics: Principles in Action*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.

- Tybout, J. R. (2000). *Plant- and Firm-Level Evidence on 'New' Trade Theories*. In: Choi, E. K. & Harrigan, J. (Eds.), *Handbook of International Trade*. Blackwell Publishing, Oxford.
- UNCTAD. (2021). *World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery*. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva.
- UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- Wang, J. Y., & Wang, S. L. (2012). Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Role of Financial Development. *Journal of Economic Integration*, 27(4), 663–683.
- World Bank. (2020). *Global Economic Prospects*. World Bank Publications, Washington, D.C.
- World Bank. (2023). *World Development Report 2023: Data for Better Lives*. Washington, DC: World Bank.
- WTO. (2022). *World Trade Statistical Review 2022*. Geneva: World Trade Organization.
- WTO. (2023). *World Trade Statistical Review 2023*. Geneva: World Trade Organization.

Profil Penulis



Dr. Eko Sudarmanto, SE., MM., *CHMQ*

Lahir di Boyolali, anak kedua dari pasangan Dulkarim dan Sunarti. Peraih rekor MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) atas disertasi ilmiahnya ini adalah lulusan Program Doktorat di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Program Studi Magister Manajemen (MM) di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta, Program Diploma di Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi: ISO 9001:2015 Internal Quality Auditor, ISO 27001:2013 Fundamental Information Security Management System, Certified Risk Associate (CRA), Certified Risk Professional (CRP), Certified of Sharia Fintech (CSF), Certified Fundamental Tax (C.FTax), dan Certified Holistic Management in Quran (CHMQ). Pada awal tahun 2023, Penulis menjadi salah satu pendiri Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi SSQ Holistik Internasional di Malang – Jawa Timur. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia, sejak tahun 2015. Sebelumnya lebih dari 20 tahun sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui surel: ekosudarmanto.umat@gmail.com.

Ekonomi Publik dan Peran Pemerintah

Oleh: Harimurti Wulandjani

Universitas Pancasila

Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam mengelola sumber daya publik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi berbagai ketidaksempurnaan pasar. Ketika pasar gagal menyediakan barang dan jasa tertentu secara efisien, pemerintah hadir untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal, merespons masalah distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia barang publik, pengelola kebijakan fiskal, dan pelindung kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan kompleksitas perekonomian global, peran pemerintah semakin penting dalam mengatasi eksternalitas seperti polusi dan perubahan iklim, menjaga stabilitas sektor keuangan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan redistribusi pendapatan melalui sistem perpajakan dan program kesejahteraan menjadi krusial dalam mengurangi ketimpangan sosial. Melalui kebijakan fiskal dan regulasi, pemerintah memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih adil dan merata.

Dalam konteks ini, peran ekonomi publik semakin relevan di tengah tantangan ekonomi modern, seperti krisis keuangan, perubahan teknologi, dan masalah lingkungan, yang semuanya membutuhkan intervensi pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan (Stiglitz & Rosengard, 2015).

A. Konsep Dasar Ekonomi Publik

Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, terutama dalam mengalokasikan sumber daya, distribusi pendapatan, dan pengelolaan barang-barang publik. Tujuan utama dari ekonomi publik adalah memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi efisiensi, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam perekonomian secara keseluruhan (Stiglitz & Rosengard, 2015). Dalam ekonomi publik, pemerintah bertindak sebagai entitas yang mampu mengintervensi perekonomian untuk memperbaiki kegagalan pasar dan menyediakan barang-barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar secara efektif.

Ekonomi publik mencakup tiga elemen utama: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Alokasi sumber daya melibatkan keputusan tentang bagaimana barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan dalam perekonomian, sementara distribusi pendapatan berkaitan dengan pembagian pendapatan atau kekayaan di antara anggota masyarakat. Sementara itu, stabilisasi ekonomi adalah peran pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian dari ketidakstabilan, seperti inflasi atau resesi (Gruber, 2019).

Dalam pasar bebas, alokasi sumber daya dilakukan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Namun, dalam banyak kasus, mekanisme ini tidak selalu menghasilkan alokasi yang efisien, terutama dalam hal barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang bersifat non-rival dan non-eksklusif, yang berarti penggunaannya oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi individu lain, dan tidak ada yang dapat dikecualikan dari penggunaannya (Stiglitz & Rosengard, 2015). Contoh barang publik meliputi pertahanan nasional, jalan raya, dan pencahayaan jalan umum. Karena sifatnya, pemerintah

bertindak sebagai penyedia barang publik melalui pendanaan dari pajak.

Selain itu, pemerintah juga sering mengatur produksi barang semi-publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun sektor swasta dapat memproduksi barang-barang ini, tanpa intervensi pemerintah, sering kali terjadi ketimpangan dalam akses terhadap barang-barang tersebut (Gruber, 2019). Sebagai contoh, tanpa pendidikan publik yang disubsidi negara, akses terhadap pendidikan yang berkualitas bisa tidak merata.

Ekonomi publik juga mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi distribusi pendapatan di dalam suatu negara. Pasar bebas sering kali menghasilkan ketimpangan pendapatan, di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara mayoritas hidup dalam kondisi kurang mampu. Pemerintah memainkan peran penting dalam redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal seperti pajak progresif dan program kesejahteraan (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Pajak progresif adalah sistem di mana individu dengan pendapatan yang lebih tinggi dikenai tarif pajak yang lebih besar, sementara individu dengan pendapatan rendah dikenakan tarif pajak yang lebih rendah. Pajak yang terkumpul digunakan untuk mendanai berbagai program sosial, seperti subsidi kesehatan dan bantuan pendidikan, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi (Gruber, 2019).

Pemerintah juga berperan dalam mengatasi eksternalitas, yakni dampak dari aktivitas ekonomi yang memengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Eksternalitas bisa bersifat negatif, seperti polusi, atau positif, seperti peningkatan pengetahuan dari pendidikan (Gruber, 2019). Contoh eksternalitas negatif yang umum adalah polusi, di mana pemerintah harus mengatur atau mengenakan pajak pada perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat.

Sebaliknya, eksternalitas positif, seperti manfaat dari pendidikan atau inovasi teknologi, sering kali mendorong pemerintah memberikan

subsidi atau insentif. Sebagai contoh, pemerintah mungkin memberikan subsidi untuk penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Pemerintah juga berperan dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Perekonomian sering kali rentan terhadap fluktuasi siklus bisnis, seperti krisis keuangan atau perubahan harga komoditas. Pemerintah dapat mengatasi ketidakstabilan ini dengan kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi (Gruber, 2019). Kebijakan fiskal melibatkan pengelolaan anggaran negara melalui pendapatan pajak dan pengeluaran, sedangkan kebijakan moneter diatur oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

B. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Publik

Pemerintah memainkan peran penting dalam ekonomi publik dengan menjalankan berbagai fungsi untuk mengatasi masalah yang timbul dari ketidaksempurnaan pasar dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Berikut ini adalah beberapa peran utama pemerintah dalam ekonomi public.

1. Penyediaan Barang Publik

Dalam ekonomi publik, salah satu peran utama pemerintah adalah sebagai penyedia barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang bersifat non-rival dan non-eksklusif, yang artinya penggunaannya oleh satu individu tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi individu lain, serta tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari penggunaannya. Karena sifatnya, barang publik tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar bebas tanpa intervensi pemerintah (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Barang publik memiliki dua karakteristik utama, yaitu non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Non-rivalitas berarti konsumsi barang oleh satu individu tidak mengurangi kesempatan individu lain untuk menggunakan barang tersebut. Contohnya adalah pertahanan nasional, di mana perlindungan yang diberikan kepada satu warga negara tidak mengurangi perlindungan yang diberikan kepada warga negara

lainnya (Gruber, 2019). Sementara itu, non-eksklusivitas berarti tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari mengonsumsi barang publik. Sebagai contoh, semua orang dapat menikmati penerangan jalan tanpa harus membayar secara langsung untuk penggunaannya.

Pasar bebas cenderung gagal menyediakan barang publik karena tidak ada insentif bagi individu atau perusahaan untuk memproduksi barang yang konsumsi atau manfaatnya dapat dinikmati oleh semua orang tanpa adanya mekanisme pembayaran yang jelas. Ini dikenal sebagai masalah "*free rider*," di mana individu dapat menikmati manfaat dari barang publik tanpa harus membayar untuk produksinya (Stiglitz & Rosengard, 2015). Oleh karena itu, pemerintah campur tangan untuk memastikan bahwa barang-barang publik ini tersedia bagi masyarakat.

Pemerintah berperan sebagai penyedia utama barang publik melalui pembiayaan yang didapatkan dari pajak. Contoh klasik barang publik yang disediakan oleh pemerintah termasuk infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan taman umum, serta layanan seperti pertahanan nasional, sistem peradilan, dan perlindungan lingkungan. Karena barang-barang ini bersifat non-rival dan non-eksklusif, tidak ada insentif yang cukup bagi sektor swasta untuk memproduksi atau mendistribusikannya secara optimal (Gruber, 2019).

Sebagai penyedia barang publik, pemerintah juga mengelola dan merencanakan distribusi barang tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah menggunakan anggaran publik untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, serta memastikan bahwa layanan penting, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat diakses secara merata oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengatur produksi barang publik untuk menghindari ketidakefisienan dan ketimpangan dalam distribusi. Regulasi ini juga diperlukan untuk melindungi sumber daya publik dari eksploitasi yang berlebihan, yang dapat mengarah pada "*tragedy of the commons*," yakni situasi di mana sumber daya yang tidak terkelola dengan baik akan habis karena penggunaan yang berlebihan (Stiglitz & Rosengard, 2015).

2. Mengatasi Eksternalitas

Eksternalitas adalah dampak dari aktivitas ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar dan memengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Eksternalitas dapat bersifat positif atau negatif. Eksternalitas positif terjadi ketika aktivitas ekonomi menghasilkan manfaat bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung, seperti manfaat dari pendidikan atau vaksinasi. Sementara itu, eksternalitas negatif terjadi ketika aktivitas ekonomi menyebabkan kerugian bagi pihak lain, seperti polusi udara dari pabrik (Gruber, 2019).

Dalam konteks ekonomi publik, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi eksternalitas. Pasar bebas cenderung tidak mampu mengatasi eksternalitas dengan efisien karena mekanisme harga tidak mencerminkan dampak penuh dari aktivitas ekonomi tersebut. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk mengurangi dampak negatif eksternalitas dan memaksimalkan dampak positifnya (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Untuk mengatasi eksternalitas negatif, seperti polusi, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan. Salah satu cara yang umum digunakan adalah melalui regulasi, di mana pemerintah menetapkan batasan emisi atau standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Selain regulasi, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan pajak yang dikenal sebagai "pajak Pigovian." Pajak ini dikenakan pada pelaku ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif, dengan tujuan meningkatkan biaya produksi atau konsumsi yang menyebabkan eksternalitas tersebut. Contohnya, pajak karbon yang dikenakan pada perusahaan yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca adalah salah satu bentuk pajak Pigovian (Gruber, 2019). Pajak ini diharapkan mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi dan beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, untuk memaksimalkan eksternalitas positif, pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif. Misalnya, pemerintah dapat

memberikan subsidi untuk pendidikan, karena pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi individu yang menerima pendidikan tersebut, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, dan memperbaiki kualitas hidup secara umum (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Selain pendidikan, pemerintah juga sering memberikan subsidi untuk penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang teknologi, kesehatan, dan energi terbarukan. Aktivitas ini menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti penemuan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Gruber, 2019).

Pemerintah juga menggunakan pasar untuk mengatasi eksternalitas melalui skema seperti perdagangan hak emisi. Dalam skema ini, pemerintah menetapkan batas total emisi yang diperbolehkan, kemudian mendistribusikan atau menjual izin emisi kepada perusahaan. Perusahaan yang mampu mengurangi emisi mereka dapat menjual izin yang tidak terpakai kepada perusahaan lain yang kesulitan mencapai batas emisi. Skema ini menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, karena ada keuntungan finansial dari penjualan izin emisi (Stiglitz & Rosengard, 2015).

3. Redistribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan adalah salah satu peran penting pemerintah dalam ekonomi publik untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pendapatan sering kali terjadi karena distribusi sumber daya yang tidak merata di pasar bebas. Orang-orang dengan akses terhadap pendidikan, modal, atau teknologi cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, sementara mereka yang kurang beruntung bisa tertinggal secara ekonomi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah campur tangan untuk mengurangi kesenjangan tersebut melalui kebijakan redistribusi pendapatan (Gruber, 2019).

Salah satu cara utama pemerintah melaksanakan redistribusi pendapatan adalah melalui sistem perpajakan. Pajak progresif, di mana individu

dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar, merupakan instrumen kunci dalam upaya redistribusi ini. Pajak penghasilan progresif membantu mengurangi ketimpangan dengan mengambil sebagian dari pendapatan orang kaya untuk mendanai program-program kesejahteraan yang bermanfaat bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi (Stiglitz & Rosengard, 2015). Selain itu, pajak konsumsi yang dibebankan pada barang mewah juga digunakan untuk mendorong redistribusi, karena barang-barang tersebut umumnya hanya dibeli oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Di samping kebijakan perpajakan, pemerintah juga memberikan transfer pembayaran langsung kepada kelompok rentan, seperti melalui program jaminan sosial, subsidi, atau bantuan tunai. Program-program seperti bantuan sosial untuk pengangguran, pensiun, dan bantuan kesehatan merupakan contoh nyata dari redistribusi pendapatan. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan sumber daya ke kelompok masyarakat yang membutuhkan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun mereka tidak mampu bekerja atau memiliki keterbatasan ekonomi (Gruber, 2019).

Program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah juga menjadi sarana penting dalam redistribusi pendapatan. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup kelompok yang kurang beruntung. Misalnya, subsidi kesehatan melalui program asuransi kesehatan nasional membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengakses layanan kesehatan yang layak. Dengan cara ini, redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan sosial secara keseluruhan (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Selain itu, redistribusi pendapatan juga berperan dalam menciptakan kesetaraan kesempatan. Pemerintah sering kali memberikan subsidi atau beasiswa untuk pendidikan, yang memungkinkan akses pendidikan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah membantu meningkatkan mobilitas sosial dan

mengurangi kesenjangan ekonomi jangka panjang dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan kerja bagi kelompok berpenghasilan rendah (Gruber, 2019).

Meskipun kebijakan redistribusi pendapatan memiliki manfaat yang signifikan, ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa redistribusi pendapatan tidak mengurangi insentif untuk bekerja atau berinovasi. Pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi motivasi individu untuk bekerja lebih keras atau menghasilkan pendapatan tambahan. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam merancang kebijakan redistribusi yang seimbang antara keadilan sosial dan efisiensi ekonomi (Gruber, 2019).

4. Menstabilkan Perekonomian

Pemerintah memainkan peran krusial dalam menstabilkan perekonomian, terutama dalam menghadapi fluktuasi siklus ekonomi. Dalam situasi di mana perekonomian mengalami resesi atau inflasi tinggi, intervensi pemerintah menjadi penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian dapat dibagi menjadi dua kategori utama: kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Gruber, 2019).

Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ketika perekonomian berada dalam resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Pengeluaran ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi dan permintaan agregat (Stiglitz & Rosengard, 2015). Sebagai contoh, paket stimulus fiskal yang diterapkan oleh banyak negara selama krisis keuangan global 2008 dan dampak pandemi COVID-19 merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah dapat menggunakan pengeluaran untuk menstabilkan perekonomian.

Sebaliknya, dalam situasi inflasi yang tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk

mengendalikan permintaan agregat. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di perekonomian, pemerintah dapat membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga (Gruber, 2019).

Di sisi lain, kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral dan berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Ketika perekonomian melambat, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Suku bunga yang lebih rendah membuat kredit lebih terjangkau bagi bisnis dan individu, yang mendorong pengeluaran dan investasi. Sebaliknya, jika inflasi meningkat, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menstabilkan harga (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Selain penyesuaian suku bunga, bank sentral juga dapat menggunakan alat-alat lain seperti quantitative easing, di mana bank sentral membeli aset keuangan untuk meningkatkan likuiditas di pasar dan mendorong investasi. Tindakan ini membantu menjaga stabilitas perekonomian dan mencegah terjadinya krisis finansial.

Pemerintah juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan memprediksi. Ketidakpastian politik dan kebijakan dapat mempengaruhi keputusan investasi oleh perusahaan. Dengan memastikan stabilitas politik, transparansi kebijakan, dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Gruber, 2019). Selain itu, melalui peraturan yang jelas dan konsisten, pemerintah dapat mengurangi risiko bagi investor, sehingga mendorong investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Penyediaan Regulasi dan Pengawasan Pasar

Pemerintah memiliki peran penting dalam ekonomi publik, terutama dalam penyediaan regulasi dan pengawasan pasar. Dalam sistem ekonomi, regulasi dan pengawasan diperlukan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan stabilitas, serta melindungi konsumen dan pelaku pasar. Tanpa regulasi yang tepat, pasar dapat gagal berfungsi secara efisien, menyebabkan dampak negatif bagi perekonomian secara keseluruhan (Gruber, 2019).

Regulasi pasar bertujuan untuk menciptakan aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen. Pemerintah merumuskan regulasi untuk mengatasi berbagai masalah seperti monopoli, kolusi, dan praktik bisnis yang tidak adil. Dengan mengatur persaingan, pemerintah berupaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar yang dapat merugikan konsumen dan mengurangi inovasi di dalam industri (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Salah satu contoh regulasi penting adalah undang-undang antimonopoli. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun perusahaan yang mendominasi pasar dengan cara yang merugikan pesaing atau konsumen. Melalui pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah dapat mencegah penggabungan atau akuisisi yang dapat mengurangi persaingan dan meningkatkan harga barang dan jasa (Gruber, 2019).

Selain penyediaan regulasi, pengawasan pasar juga menjadi aspek penting dalam peran pemerintah. Pengawasan pasar dilakukan untuk memastikan bahwa semua pelaku ekonomi mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Badan-badan pengawas, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia, bertugas untuk memantau dan menegakkan regulasi terkait persaingan usaha (Suharto & Muis, 2020).

Pengawasan juga mencakup perlindungan konsumen. Pemerintah berwenang untuk menetapkan standar keamanan produk dan layanan, serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Dengan cara ini, konsumen terlindungi dari produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar kualitas. Contoh lainnya adalah regulasi di sektor keuangan, di mana pemerintah, melalui otoritas jasa keuangan, memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab, melindungi nasabah dari praktik penipuan (Stiglitz & Rosengard, 2015).

Regulasi dan pengawasan pasar yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan transparan. Dengan adanya regulasi yang tepat, kepercayaan konsumen terhadap pasar akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi dan aktivitas

ekonomi. Ketika konsumen merasa aman untuk bertransaksi, maka mereka lebih mungkin untuk berinvestasi dan membelanjakan uang mereka, yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Gruber, 2019).

Di sisi lain, pengawasan yang lemah atau regulasi yang tidak memadai dapat mengakibatkan kegagalan pasar. Misalnya, krisis keuangan global 2008 sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap lembaga keuangan dan produk-produk keuangan kompleks yang berisiko tinggi. Ketidakmampuan untuk mengatur dan mengawasi pasar keuangan dengan efektif berkontribusi pada keruntuhan yang merugikan banyak individu dan perekonomian di seluruh dunia (Suharto & Muis, 2020).

Dengan demikian, penyediaan regulasi dan pengawasan pasar merupakan dua elemen penting dari peran pemerintah dalam ekonomi publik. Regulasi yang baik dan pengawasan yang ketat dapat membantu menciptakan pasar yang efisien, adil, dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. Menciptakan Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan dan mengelola infrastruktur ekonomi, yang mencakup jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem transportasi, serta fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Gruber, 2019).

Investasi infrastruktur sering kali membutuhkan dana yang besar dan memiliki jangka waktu pengembalian yang panjang. Oleh karena itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berperan sebagai penggagas utama dalam pembangunan infrastruktur. Melalui anggaran pemerintah dan berbagai program pembangunan, pemerintah berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas (World Bank, 2020). Misalnya, pembangunan jalan tol dan pelabuhan yang modern akan

memfasilitasi arus barang dan mempercepat waktu pengiriman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam penyediaan infrastruktur publik yang penting untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat layanan masyarakat harus tersedia secara merata agar setiap warga negara dapat mengakses layanan dasar yang berkualitas. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di daerah urban, tetapi juga merata di daerah pedesaan dan terpencil (Suharto & Muis, 2020). Ketidakmerataan dalam penyediaan infrastruktur dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Dalam menciptakan infrastruktur, pemerintah juga sering kali menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Model kemitraan publik-swasta (PPP) memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Melalui skema ini, risiko dan manfaat pembangunan infrastruktur dapat dibagi antara pemerintah dan investor swasta, sehingga mempercepat pelaksanaan proyek tanpa membebani anggaran pemerintah secara berlebihan (OECD, 2019). Contohnya, proyek pembangunan jalan tol yang dikelola oleh konsorsium swasta dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah dapat mempercepat penyelesaian proyek dan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi standar yang ditetapkan.

Ketersediaan infrastruktur yang baik memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan mengurangi biaya transportasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong investasi. Sebagai contoh, infrastruktur transportasi yang baik akan memudahkan distribusi barang, sementara infrastruktur telekomunikasi yang handal akan mendukung pertumbuhan sektor teknologi dan informasi (Gruber, 2019). Selain itu, infrastruktur publik yang baik juga akan menarik investasi asing, karena investor cenderung memilih lokasi yang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam menciptakan infrastruktur ekonomi sangatlah vital. Melalui investasi, penyediaan fasilitas publik, dan kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

7. Mengelola Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pemerintah memegang peran penting dalam mengelola kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua alat utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mempengaruhi perekonomian, masing-masing melalui pengelolaan anggaran negara dan pengaturan pasokan uang dalam ekonomi.

Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Dalam situasi resesi, misalnya, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan pengeluaran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan konsumsi masyarakat (Gruber, 2019).

Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan pajak sebagai alat untuk mengelola ekonomi. Dengan menyesuaikan tarif pajak, pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan disposabel masyarakat. Pemotongan pajak dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, sementara peningkatan pajak dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran atau membiayai program sosial. Kebijakan pajak yang progresif juga dapat membantu dalam redistribusi pendapatan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial (OECD, 2021).

Di sisi lain, kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral dan berfokus pada pengaturan pasokan uang dan suku bunga. Melalui kebijakan moneter, bank sentral dapat mempengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nilai mata uang. Dalam situasi inflasi yang tinggi, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi

jumlah uang yang beredar dan menekan inflasi. Sebaliknya, jika perekonomian melambat, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi (Mishkin, 2019).

Kebijakan moneter juga mencakup pengaturan cadangan bank dan operasi pasar terbuka. Dengan membeli atau menjual surat berharga, bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas dalam sistem perbankan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi suku bunga dan kondisi kredit di pasar (Suharto & Muis, 2020). Tindakan ini menjadi sangat penting dalam situasi krisis keuangan, di mana intervensi bank sentral dapat mencegah penurunan yang lebih dalam dalam perekonomian.

Kedua kebijakan ini—fiskal dan moneter—perlu dikelola secara sinergis untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Misalnya, selama periode pemulihan setelah resesi, kebijakan fiskal yang ekspansif (peningkatan pengeluaran dan pemotongan pajak) dapat dipadukan dengan kebijakan moneter yang akomodatif (suku bunga rendah) untuk memaksimalkan pemulihan. Sebaliknya, jika inflasi mulai meningkat, pemerintah dan bank sentral harus bekerja sama untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter agar tidak saling bertentangan (Gruber, 2019).

Dengan demikian, pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah dan bank sentral adalah bagian integral dari ekonomi publik. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

8. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi publik, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam mencakup penggunaan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai pengatur, pengawas, dan penyedia kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara efisien dan berkelanjutan.

Pertama, pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini mencakup regulasi yang mengatur eksploitasi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya, kebijakan mengenai larangan pembalakan liar, regulasi tentang penggunaan lahan, dan pengaturan mengenai pengelolaan limbah. Kebijakan yang jelas dan tegas sangat penting untuk menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (World Bank, 2023).

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa pengawasan yang efektif, kebijakan yang telah ditetapkan mungkin tidak diikuti. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan dan individu mematuhi peraturan yang ada melalui pengawasan lapangan dan sanksi hukum. Misalnya, pengawasan terhadap kegiatan tambang dan perkebunan untuk mencegah praktik-praktik yang merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Dalam konteks keuangan, pemerintah juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan dari sektor sumber daya alam, seperti pajak dan royalti, merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi negara. Pemerintah harus mengelola pendapatan ini dengan bijak agar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan yang baik akan menciptakan efek positif bagi perekonomian, termasuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup (OECD, 2022).

Selanjutnya, pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, komunitas lokal, dan sektor swasta. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat melakukan dialog dan konsultasi dengan masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menciptakan rasa

memiliki di kalangan masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada (UNDP, 2023).

Pemerintah juga harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya teknologi baru, seperti teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini termasuk penelitian tentang cara mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (International Renewable Energy Agency, 2023).

9. Keseimbangan Pertumbuhan dan Pembangunan

Pemerintah memiliki peran penting dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara, sementara perkembangan mencakup perbaikan dalam kualitas hidup, distribusi pendapatan yang adil, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai pengatur, penyedia, dan pengawas sangat krusial untuk memastikan bahwa kedua aspek ini berjalan seiring.

Pertama, pemerintah berfungsi sebagai pengatur yang menetapkan kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat merangsang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong konsumsi. Pemerintah harus berfokus pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan menyediakan infrastruktur yang baik, mengurangi hambatan regulasi, dan memberikan insentif bagi sektor swasta. Misalnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (OECD, 2023, Paris: OECD Publishing).

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, distribusi yang adil dari hasil pertumbuhan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pemerintah dapat mengimplementasikan sistem perpajakan yang progresif dan program bantuan sosial untuk mendukung masyarakat

yang kurang beruntung. Dalam hal ini, transfer sosial yang efisien dapat membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya (World Bank, 2022, Washington, D.C.: World Bank Group).

Pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi pasar untuk mencegah praktik-praktik anti-persaingan dan monopoli. Regulasi yang efektif diperlukan untuk menjaga keadilan dalam persaingan, yang pada gilirannya dapat mendorong inovasi dan efisiensi di sektor swasta. Ketika pasar berfungsi dengan baik, konsumen dapat menikmati produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif (UNCTAD, 2023, Geneva: United Nations Conference on Trade and Development).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Kebijakan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan upaya mitigasi perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan. Investasi dalam teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan (International Renewable Energy Agency, 2023, Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency).

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pemerintah harus mendorong dialog dengan masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa mereka lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (UNDP, 2023, New York: United Nations Development Programme).

Dengan demikian, peran pemerintah dalam ekonomi publik sangat kompleks, melibatkan banyak aspek untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Melalui

kebijakan yang inklusif, regulasi yang efektif, dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.

10. Penanggulangan Krisis Ekonomi

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk resesi global, krisis keuangan, dan bencana alam, yang dapat berdampak serius pada kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah harus berfungsi sebagai pengatur, penjamin stabilitas, dan penyedia solusi yang tepat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Salah satu langkah utama yang diambil pemerintah dalam situasi krisis adalah penerapan kebijakan fiskal yang proaktif. Kebijakan ini mencakup peningkatan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menginvestasikan dana dalam proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang permintaan domestik. Sebagai contoh, selama krisis finansial global pada tahun 2008, banyak negara menerapkan paket stimulus fiskal yang besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi (OECD, 2023, Paris: OECD Publishing).

Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan moneter yang longgar untuk mendukung likuiditas dalam perekonomian. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Dalam beberapa kasus, bank sentral juga dapat melakukan program pembelian aset atau quantitative easing untuk menambah jumlah uang beredar di pasar. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor-sektor penting dalam ekonomi, seperti industri dan usaha kecil, tetap beroperasi meskipun dalam kondisi sulit (International Monetary Fund, 2022, Washington, D.C.: IMF).

Pemerintah juga berperan dalam melindungi masyarakat yang paling rentan selama krisis. Program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai

langsung dan subsidi makanan, dapat membantu mengurangi beban ekonomi bagi keluarga yang terkena dampak. Program ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem selama krisis. Beberapa negara, seperti Brasil dan Spanyol, telah menerapkan program perlindungan sosial yang efektif untuk membantu masyarakat menghadapi dampak krisis (World Bank, 2023, Washington, D.C.: World Bank Group).

Selain itu, pemerintah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi internasional untuk mengatasi krisis dengan lebih efektif. Kemitraan ini dapat menciptakan solusi inovatif dan memperkuat ketahanan ekonomi. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mempercepat distribusi vaksin dan memperkuat sistem kesehatan. Kolaborasi ini membantu menjaga kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi (UNDP, 2023, New York: United Nations Development Programme).

Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam penanggulangan krisis. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam merancang kebijakan pemulihan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan menciptakan rasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan. Sebagai contoh, beberapa negara telah melaksanakan konsultasi publik untuk memahami dampak krisis dan menciptakan program yang lebih tepat sasaran (Asian Development Bank, 2022, Manila: ADB).

Dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, perlindungan sosial, kolaborasi dengan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memainkan peran yang signifikan dalam penanggulangan krisis ekonomi. Melalui upaya ini, diharapkan pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan, serta masyarakat dapat menghadapi masa depan dengan lebih baik.

C. Penutup

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dalam perekonomian, dan melalui kebijakan serta intervensi yang bijaksana, mereka dapat berfungsi sebagai penyeimbang yang efektif dalam pasar. Dalam hal ini, pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan yang sering kali terjadi dalam masyarakat dapat diminimalisir, dan kesejahteraan sosial dapat meningkat secara signifikan.

Kebijakan pemerintah yang berfokus pada redistribusi kekayaan, seperti pajak progresif dan program bantuan sosial, membantu mengurangi ketidakadilan yang sering muncul akibat dinamika pasar yang tidak teratur. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah tidak hanya mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung tetapi juga meningkatkan stabilitas sosial. Hal ini penting, karena stabilitas sosial yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan tantangan lingkungan yang semakin mendesak, pemerintah juga dituntut untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan secara berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, mendorong inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta berinvestasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, pemerintah dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi antara kebijakan ekonomi dan sosial, pemerintah berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan saat ini.

Referensi

- Asian Development Bank. (2022). *Crisis Response: Lessons from the Pandemic*. Manila: ADB.
- Gruber, J. (2019). *Public Finance and Public Policy*. Worth Publishers, New York.
- International Monetary Fund. (2022). *Global Financial Stability Report: Navigating the New Normal*. Washington, D.C.: IMF.
- International Renewable Energy Agency. (2023). *Innovative Solutions for Sustainable Resource Management*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
- International Renewable Energy Agency. (2023). *Renewable Energy for Sustainable Development*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson, Boston.
- OECD. (2019). *Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money*. OECD Publishing, Paris.
- OECD. (2021). *Revenue Statistics in Asian Countries: Trends in Indonesia*. OECD Publishing, Paris.
- OECD. (2022). *Natural Resources and Economic Growth*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Economic Growth and Sustainable Development*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Economic Outlook: Addressing the Challenges of the Economic Crisis*. Paris: OECD Publishing.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton & Company, New York.

- Suharto, A., & Muis, M. (2020). "Peran Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 161-175.
- Suharto, A., & Muis, M. (2020). "Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Stabilitas Ekonomi Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 176-190.
- Suharto, A., & Muis, M. (2020). "Peran KPPU dalam Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 145-160.
- UNCTAD. (2023). *Competition Policy and Development: The Role of Government*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- UNDP. (2023). *Building Resilience through Community Engagement*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2023). *Engaging Local Communities in Natural Resource Management*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2023). *Promoting Inclusive Development through Community Engagement*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2020). *Infrastructure for Development: The Role of the World Bank Group*. World Bank Publications, Washington, D.C.
- World Bank. (2022). *Shared Prosperity and Economic Growth: Policies for an Inclusive Economy*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Social Protection and Jobs: Responding to Crises*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Sustainable Natural Resource Management: The Role of Governments*. Washington, D.C.: World Bank Group.

Profil Penulis



Dr. Harimurti Wulandjani, SE., MM.

Lahir di Surakarta, 15 Januari 1971, anak pertama dari pasangan Prof. H. Mardjani Danuprawiro dan Hj. Siti Marsiyam. Lulusan Program Doktorat di Universitas Pancasila. Pendidikan sebelumnya di Magister Manajemen IPWI dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Aktif sebagai Dosen tetap di Universitas Pancasila sejak tahun 1999 dan di beberapa Universitas di Jakarta, serta sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islam Bahrul Ulum Cibubur yang membawahi Sekolah KB/TK Al-Azhar 20 Cibubur, SD Al-Azhar 20 Cibubur, SMP Al-Azhar 19 Cibubur, dan SMA Al-Azhar 19 Ciracas.

Ekonomi dan Lingkungan

Oleh: Peggy Ratna Marlianingrum

Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta

A. Pendahuluan

1. Pengertian Ekonomi dan Lingkungan

Ilmu ekonomi secara konvensional sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Istilah ini bahkan mempunyai cakupan sangat luas seiring perkembangan zaman. Secara sederhana lingkungan berhubungan erat dengan alam dan penyusunnya atau di sebut dengan sumber daya alam. Sehingga ekonomi lingkungan atau biasa disebut ekonomika lingkungan adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ekonomika lingkungan, sumber daya alam dan lingkungan dipelajari dan dipertahankan serta ditingkatkan penggunaannya dengan tujuan pemakaian jangka panjang atau berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang langka ini dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kerap memberikan masalah lingkungan, karena biaya lingkungan tidak

dimasukkan ke dalam biaya produksi, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pasar. Mendapatkan nilai ekonomi tidak diseimbangkan dengan masalah lingkungan yang menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya alam dan lingkungan dalam proses produksi. Mengandung arti bahwa sumber daya alam dan lingkungan menjadi penyedia bahan baku, penyedia fasilitas dan wadah untuk limbah, sehingga berdampak pada pencemaran sumber daya alam dan lingkungan yang menimbulkan biaya, diantaranya: menurunnya kuantitas sumber daya alam dan lingkungan sebagai penyedia bahan baku, menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan sebagai fungsi dasar ekologis, menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia, memberikan dampak yang buruk kepada kesehatan dan produktivitas.

Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, begitupun sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia. Sehingga persoalan yang paling mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah bagaimana mengelola sumber daya alam dan lingkungan tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Sumber daya alam dan lingkungan didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi, dapat dikatakan sumber daya alam adalah komponen dari ekosistem yang menyebabkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan umat manusia.

2. Sejarah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pemahaman mengenai ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan, sifat *non-convexity* yang dimilikinya serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi tidaklah lengkap tanpa memahami bagaimana kerangka berfikir ekonomi sumber daya alam dan lingkungan berkembang. Dalam konteks inilah, bagian ini akan mengetengahkan bagaimana pemikiran-pemikiran ekonomi dan konsern terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang memberdakannya dengan pemikiran ekonomi konvensional yang dikembangkan sejak zaman peradaban lama hingga ke pemikiran klasik dan neo-klasikal.

Joseph Tainter (1988) dalam bukunya "*The Collapse of Complex Civilization*" mencoba menganalisis keruntuhan-keruntuhan peradaban masa lalu yang sempat mencapai zaman keemasannya. Sebagai contoh peradaban Sumerian dimana roda pertama kali ditemukan mencapai zaman keemasannya pada milenium ke 4 SM. Pada zamannya, Sumerian telah menciptakan sistim irigasi dengan tingkat *engineering* yang luar biasa dan organisasi sosial yang kompleks. Bahkan Sumerianlah yang pertama kali menciptakan "kota" dan "bahasa tertulis" (*written language*). Penemuan mereka itu barangkali setara dengan penemuan internet di zaman modern ini. Peradaban Sumerian ini demikian majunya sehingga ekonomi merekapun tumbuh pesat, namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, sistim irigasi yang mereka miliki terdapat "cacat" pada implementasinya. Dengan sistim irigasi yang mereka kembangkan, sebagian air di belakang bendungan digunakan untuk mengairi lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian mereka meningkat.

Namun sistem sirkulasi air ini lama kelamaan terganggu oleh karena diversifikasi air dan banyaknya garam yang tersisa pada lahan akibat proses evaporasi dan perkolasi. Peningkatan kadar garam di lahan ini yang kemudian menurunkan kesuburan lahan yang pada gilirannya menurunkan kemampuan lahan untuk menyuplai pangan sehingga peradaban ini kemudian hancur. Sama halnya dengan peradaban Sumerian, peradaban Maya yang berjaya dari tahun 250 sampai *collapse* nya pada tahun 900, mengalami pertumbuhan yang pesat dengan pengembangan sistim pertanian yang cukup produktif. Ekonomi mereka melesat tajam pada zamannya. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada peradaban Maya tersebut dibayar oleh deforestasi dan erosi lahan yang hebat yang kemudian menimbulkan kelangkaan pangan dan konflik antara kota-kota di wilayah Maya untuk memperebutkan pangan. Peradaban inipun kolaps karena kegagalan mereka menilai sumberdaya alam dan lingkungan dengan benar.

Selama masa kejayaan Maya, di Pasifik, suatu pulau yang bernama Pulau Paskah (*Easter Island*) juga mengalami perkembangan ekonomi yang pesat di sekitar tahun 400. Penduduk di pulau ini dianugrahi lahan yang

subur dari lahan vulkanik dan sumberdaya ikan di sekitarnya. Kejayaan mereka ini berlangsung cukup lama sehingga pendudukpun tumbuh dengan pesat mencapai 20.000 jiwa. Angka tersebut pada masa tersebut merupakan jumlah penduduk yang spektakuler karena kota London dan New York pada periode yang sama juga berkisar antara 15.000 hingga 20.000 jiwa. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula hutan ditebang yang pada gilirannya mengurangi pula bahan baku untuk keperluan membuat perahu guna menangkap ikan sebagai suplai pangan mereka. Perlahan-lahan suplai pangan dari laut ini menurun yang kemudian menyebabkan kolapsnya peradaban tersebut.

Permasalahan sumberdaya dan lingkungan juga pernah dialami peradaban Cina kuno sekitar 800 SM akibat penebangan hutan yang berlebihan (*intensif logging*) dan pertanian yang ekstensif telah menimbulkan permasalahan lingkungan yang dalam skala ketika itu cukup dirasakan mengganggu ekonomi China.

Apa yang dialami oleh masyarakat kuno juga dialami kemudian oleh Kekaisaran Romawi. Imporium Romawi pada awalnya mengandalkan sumber ekonominya dari komunitas pertanian dengan skala kecil dan *self-sufficient*. Namun situasi ini berubah ketika Romawi mulai melakukan ekspansi dan menaklukkan beberapa wilayah koloni yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan iklim yang menguntungkan untuk pengembangan pertanian. Ekspansi ini melahirkan perdagangan dan membuat struktur masyarakat pertanian Romawi semakin kompleks. Perbudakan yang berasal dari peradaban Yunani kemudian diadopsi di Romawi untuk dipekerjakan di pertanian dan pembangunan infrastruktur publik serta kebutuhan tenaga domestik bagi rumah tangga yang besar. Ekonomi Romawi semakin berkembang dengan ditaklukkannya koloni-koloni baru dan suplai tenaga kerja dari perbudakan semakin bertambah (Kula, 2001).

Saluran air yang dibangun imperium untuk menyediakan suplai air berubah menjadi bencana karena terlalu banyaknya air disedot dari daerah sekitar. Penggunaan air juga semakin tidak terkendali dengan tidak dilakukannya perlakuan terhadap air baku sehingga menimbulkan kontaminasi terhadap air dan lahan. Deforestasi, erosi lahan dan

peningkatan kadar garam pada perairan semakin marak. Perdagangan dan industri perkotaan tidak mampu lagi dilakukan dengan struktur ekonomi seperti itu. Tenaga kerja tidak lagi memiliki insentif untuk bisa menjadi produktif dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Situasi ini diperburuk oleh perbedaan yang mendasar antara Romawi dan Yunani. Tidak seperti halnya Yunani yang banyak melahirkan pemikir-pemikir dan ilmuwan ulung, Romawi justru sebaliknya. Romawi runtuh karena struktur ekonomi mereka yang berbasis sumberdaya alam tidak ditunjang oleh pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam yang bijak. Romawi juga tidak memikirkan untuk melahirkan para pemikir yang konsern terhadap dampak ekonomi yang ekspansif terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.

Pemikiran mengenai *Trade off* antara ekonomi dan sumber daya alam serta implikasinya terhadap lingkungan sebenarnya sudah berlangsung lama jauh sebelum pemikiran-pemikiran modern muncul. Plato pada tahun 400 SM dalam karyanya berjudul *Republic* nya menceritakan bagaimana nasib kota Attica yang bernasib naas karena deforestasi dan pendangkalan sungai-sungai mereka. Pemikiran-pemikiran ini kemudian berkembang pesat sejak zaman pertengahan (*medieval*). Clapp (1994) mencatat bahwa pada tahun 1388 parlemen Inggris sangat gusar dengan pencemaran yang terjadi di penalti sebesar 20 *poundsterling* untuk mencegah pembuangan sisa-sisa potongan hewan serta limbah rumah tangga yang mengganggu suplai air bersih bagi penduduk Inggris. Masalah yang dialami oleh Inggris lebih dari 600 tahun yang lalu tersebut tentu saja masih dihadapi kita bangsa Indonesia, khususnya di daerah-daerah perkotaan.

Selama beberapa tahun di zaman pertengahan, Eropa sempat mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi oleh karena wabah penyakit dan buruknya sanitasi dan konflik politik diantara elit penguasa. Namun semua ini kemudian berubah setelah lahirnya era Merkantilisme dan perdagangan dengan negara-negara di Asia dan Amerika mulai tumbuh. Merkantilisme merupakan pemikiran ekonomi pertama yang secara sistematik mengakui pentingnya kepemilikan kekayaan (*wealth*) dari sumber daya alam khususnya sumber daya tidak terbarukan (mineral) yakni emas, perak. Para merkantilis ini sangat

terobsesi sekali dengan kepemilikan asset tersebut karena dapat dijadikan sumber kekuasaan. Era merkantilisme adalah era pertama kali ekonomi berbasis sumberdaya alam begitu menjadi perhatian. Dari sini pulalah kemudian tantangan-tantangan ke arah pengelolaan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan kemudian bermunculan.

Salah satu tantangan pemikiran dari merkantilisme adalah lahirnya *Physiocrat* yang dipelopori oleh para ekonom Perancis diantaranya Quesney dan Turgot. Mereka menyebut dirinya sebagai anti merkantilisme dan doktrin yang dianut sangat bertentangan dengan doktrin merkantilisme. Menurut pandangan *Physiocrat* bukan perdagangan dan penguasaan logam berharga yang memberikan surplus ekonomi bagi masyarakat namun kepemilikan atas lahan. Quesney membuktikan doktrin tersebut lewat publikasinya berjudul *Tableau Economique* dimana surplus ekonomi diperoleh dari pertanian yang kemudian meretas ke sektor lain dan masyarakat lainnya. Pandangan *Physiocrat* terhadap kemakmuran dan sistim ekonomi secara umum bertumpu sepenuhnya pada sumber daya alam, dalam hal ini lahan. Adalah pandangan *Physiocrat* yang mengaku yang mengakui sepenuhnya akan keseimbangan alam (*natural order*) yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kepentingan manusia. Oleh karenanya *Physiocrat* melihat bahwa keseimbangan alam tidak boleh diintervensi oleh negara atau kekuatan politik lainnya.

Era *Physiocrat* tidak berlangsung lama karena pada abad ke 17 dan 18 lahir pula pemikiran ekonomi berbasis liberal yang dipelopori oleh ekonomi Inggris William Petty diikuti kemudian oleh David Hume, Jhon Locke dan Jhon Law. Paham mereka bersebrangan dengan merkantilis dan *physiocrat* karena lebih memilih paham pasar bebas. Petty, Hume dan Locke adalah juga pemikir-pemikir yang menyiapkan fondasi bagi Adam Smith, pendiri ekonomi modern yang meyakini bahwa perdagangan bebas dan pemenuhan *self interest* yang akan mencapai kemakmuran manusia. Adam Smith sedikit sekali memiliki konsern terhadap kelangkaan sumberdaya alam dan lingkungan, pencemaran dan pertambahan penduduk. Ia termasuk minoritas dalam kelompok yang meyakini keterbatasan sumberdaya alam dan dampak eksploitasi yang berlebihan. Mungkin bisa

dimaklumi karena situasi dimana ketika Adam Smith mengembangkan teori ekonominya, sumberdaya masih relatif melimpah sehingga sehingga konsern terhadap menipisnya sumberdaya alam dianggap paranoid. Situasi ini berbeda kemudian dengan apa yang dipahami oleh Robert Malthus dan David Ricardo. Sebagaimana umum diketahui, Malthus merupakan pelopor pandangan Cassandra modern yang meyakini bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan membawa beban kepada sumberdaya alam dan berakhir pada kemiskinan. Malthus mengamati ini ketika ia melihat bahwa ketika penduduk Inggris bertambah, kemiskinan di beberapa desa semakin meningkat karena peralihan sistim ekonomi perdesaan ke industri dan berbagai fenomena lainnya.

David Ricardo meski dalam satu alur fikir dengan Malthus memiliki argumen lain yakni tentang menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan khususnya lahan adalah akibat pertumbuhan dan aktifitas ekonomi sehingga pada akhirnya akan memperlambat laju pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi. Tesis Ricardo ini dalam ekonomi sering dikenal sebagai *Ricardian Stagnation* atau kemandirian *Ricardian*. Namun demikian tesis Ricardo mengenai kemandekan ini dibantah oleh Henry Carey (1793-1873). Dalam bukunya mengenai *Principles of Political Economy* yang ditulis pada tahun 1873 Carey secara implisit mengakui adanya *non-convexity* dalam sumber daya alam berupa *increasing return to scale* dalam industri sumber daya tidak pulih, sehingga dalam pandangan Carey ekstraksi sumberdaya tidak pulih akan mengalami injeksi produktifitas dari perbaikan infrastruktur, perbaikan teknologi ekstraktif dan kesempatan untuk tumbuh dari perdagangan.

Pada periode yang sama ketika Carey mengembangkan teorinya mengenai pertambangan, di bidang sumberdaya dapat pulih, Martin Faustmann (1849) mengembangkan teorinya mengenai penentuan tebang optimal pada sektor kehutanan. Faustmann kemudian samapai pada formula penebangan optimal sumber daya hutan melalui prinsip yang sejalan dengan prinsip Hotelling.

Prinsip Faustmann adalah prinsip *Golden Rule* dimana ekstraksi sumberdaya hutan hanya akan optimal jika manfaat marjinal dari

penebangan setara dengan biaya oportunitas. Hal yang sama berlaku pada sumberdaya tidak pulih, hanya yang membedakan adalah adanya faktor regenerasi atau pertumbuhan stok sumberdaya.

Konsen terhadap ekonomi dan sumber daya alam ini kemudian diikuti pula oleh Jhon Stuart Mill dan Staney Jevons. Mill adalah seorang filsuf dan ekonomi yang banyak menuis tentang ekonomi politik, perdagangan, ekonomi kesejahteraan dan sumberdaya alam. Mills mengetengahkan konsep ekonomi pertambangan (batubara), pertanian, dan juga perikanan. Mills adalah orang yang pertama kali mengemukakan perbedaan mendasar antara pertanian dan pertambangan (sumber daya alam tidak pulih) dimana ekonomi sumber daya tidak pulih dicirikan oleh *trade off* antara masa kini dan masa mendatang sehingga akan melibatkan apa yang disebut sebagai "*user cost*" (biaya pengguna) yang kemudian menjadi ide yang krusial dalam pengembangan ekonomi sumber daya alam tidak pulih di kemudian hari. Dalam konteks ini Jhon Stuart Mill menempatkan dirinya di tengah-tengah antara Adam Smith dan David Ricardo.

Pemikiran Jhon Stuart Mill juga kemudian diikuti oleh William Stanley Jevons. Jevons dikenang oleh para ekonom sebagai pelopor pemikir teori neo-klasik dengan teorinya mengenai utilitas marjinal (*marginal utility of consumption*). Jevons hidup di tengah situasi dimana industrialisasi tengah berkembang pesat di Inggris, satu situasi yang agak berbeda dengan yang dialami oleh Malthus dan Ricardo. Selain kontribusinya mengenai *marginal utility*, Jevons juga termasuk pelopor teori ekonomi sumber daya tidak pulih dengan karyanya mengenai *resource exhaustion* dimana salah satu tesis penting yang dikemukakan adalah penggerusan sumber daya tidak pulih akan menjadi konstrain utama pertumbuhan ekonomi Inggris dan menurut dia, industrialisasi telah menggerus sumber daya yang berkualitas tinggi sehingga memaksa para pengguna untuk mengekstrak sumber daya alam (khususnya batubara dan mineral) dengan kualitas yang lebih rendah. Meski sempat menjadi isu yang sangat sensitif dan menjadi perdebatan yang sengit mengenai suplai dan *demand* batubara ketika itu, pemikiran Jevons menjadi catatan penting dalam perkembangan ekonomi sumber

daya alam, khususnya yang berkaitan dengan sumberdaya alam tidak pulih.

Gaung pemikiran mengenai konsern sumber daya alam dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk yang didengungkan oleh Malthus, Ricardo, Mill dan Jevons ini kemudian berkembang pula di Amerika dengan lahirnya *The American Conservation Movement* (ACM) pada pertengahan abad ke 19. Pelopor pergerakan ini antara lain Marsh, Henry Thoreau, Jhon Muir, dan George Santanya. Menurut pandangan mereka, kelangkaan adalah hal yang permanen dan konsumsi yang berlebihan dan limbah yang ditimbulkan akan mempercepat tingkat kelangkaan sumberdaya alam. Doktrin ACM termasuk juga perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap sumberdaya alam seperti mencemari sungai, membakar hutan, *overgrazing*, ketergantungan yang berlebihan terhadap BBM, dan *mis management* terhadap sumberdaya alam termasuk ke dalam bentuk lain dari penyalahgunaan sumberdaya alam. Dalam konteks ekonomi ACM juga mempercayai bahwa tanpa kontrol dari publik, kekuatan pasar bebas akan memperparah tingkat kelangkaan dan akan menciptakan distorsi pasar berupa monopoli terhadap sumberdaya alam sehingga menciptakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Meski didengungkan kurang lebih 100 tahun yang lalu, kaidah-kaidah ACM ini kini makin dirasakan kental kembali ketika dunia makin merasakan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali termasuk masalah pemanasan global, kebakaran hutan, *overfishing* (sebagai ganti *overgrazing*) dan masalah lingkungan lainnya.

Satu hal yang juga tidak bisa dilewatkan adalah bahwa periode ini satu ideologi yang bersebrangan dengan ideologi neo-klasik adalah pemikiran Karl Mark yang pengaruhnya cukup fenomenal. Karl Mark menawarkan pandangan yang diametrikal terhadap Ricardo dan Malthus. Mark melihat bahwa kesemrawutan (*reskcleness*), bersamaan dengan menurunnya keuntungan dan daya beli masyarakat kebanyakan yang akan merontokkan kapitalisme, sementara Ricardo dan Malthus melihat bahwa hukum *diminishing return* akan membuat sistim menjadi stagnan. Karya Mark mengenai Das Kapital tentu saja berimplikasi banyak terhadap sumberdaya alam dan lingkungan

dimana isu SDAL dalam pandangan sosialis dilihat sebagai pergulatan kelas. Volume III dalam Das Kapital sedikit banyak membicarakan aspek sumberdaya alam dan lingkungan, namun lebih rinci mengenai aspek ini termuat dalam karya Mark mengenai *Theories of Surpluss value* yang dipublikasikan setelah kematiannya. Dalam karya ini Mark membicarakan aspek ekonomi dari sumberdaya tidak pulih (tambang, penggalian) serta sumberdaya pulih yakni peikanan. Disini Mark tidak membedakan karakteristik dari keduanya karena koncern mark adalah pada aspek tenaga kerja. Menurut Mark ekonomi sumberdaya alam yang ekstraktif seperti disebutkan diatas bersifat labor intensif sehingga sektor ekstratif ini memiliki surplus nilai yang tinggi karena tingginya penggunaan tenaga kerja. Mark tidak melihat kelangkaan sumberdaya sebagai faktor yang harus ditakuti karena Mark menganggap sumberdaya alam tidak memiliki kecenderungan yang mengarah ke *decreasing return to scale*. Mak juga memandang bahwa kapitais merupakan berita buruk bagi lingkungan. Ironisnya, meski Mark bukan seorang environmentalis, eksperimen idiologi Mark pada selama tujuh puluh tahun di Rusia dan empat puluh tahun di Eropa Timur justru membuktikan buruknya penanganan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah-wilayah tersebut. Penyalahgunaan (*abuse*) terhadap lingkungan terkuak banyak ketika terjadi disintegrasi komunisme di eks Soviet. Bahkan bukti katastrophik lingkungan kini bisa terlihat di laut Aral akibat sistim pertanian yang salah dan terdiversinya sumber air dari sungai Sirri Derya dan Amu Deryan untuk perkebunan kapas di negara-negara STAN (Uzbekistant, Tazikistan, dll). Laut Aral kehilangan lebih dari setengah sumber airnya akibat diversifikasi ini dan bencana lingkungan dianggap sebagai skala yang kolosal di abad ini.

Pemikiran dari era ekonomi klasik dan pemikiran sosialis, pemikiran ekonomi sumber daya memang bergerak ke era neo-klasik. Pada masa neo-klasik pemikiran mengenai ekonomi sumber daya dan lingkungan relatif kurang banyak bergema. Penekanan pemikiran neoklasik lebih pada pasar bebas dan marginalisme, dan nilai barang termasuk sumberdaya alam yang diperlakukan sebagai faktor input dalam produksi. Namun demikian perlu dicatat sumbangan ekonom Austria

Eugen von Bohm-Bawerk serta ekonom lainnya yakni Sorley dan Marshall. Meski ketiganya tidak mengulas langsung mengenai sumberdaya alam, namun konsep mereka mengenai *rent* (rente ekonomi) dari lahan dan tambang cukup memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ekonomi sumberdaya, terutama yang menyangkut rente dari sumberdaya (*resource rent*). Konsep Bohm-Bawerk yang kemudian menjadi dasar bagi model sumberdaya tidak pulih yang dikembangkan oleh Gray menitik beratkan akan terdepresiasi rente dari sumberdaya tidak pulih karena berkurangnya nilai dari sumberdaya semakin tinggi tingkat ekstraksi dilakukan.

Sorely sering dikenal sebagai pengembang teori yang pertama yang dalam semangat konsep marginalis neo-klasikal yang mengaplikasikannya untuk sektor ekstraksi sumberdaya, khususnya pertambangan. Sorely mengembangkan ide yang telah dikembangkan oleh Mill melalui pengembangan teori mengenai *interplay* antara masa kini dan masa mendatang dalam hal ekstraksi sumberdaya tidak pulih. Sementara itu Marshall yang dikenal sebagai penggagas ekonomi modern dengan menyempurnakan konsep neo-klasikal mengenai nilai, dimana nilai dalam perspektif Marshall bukan hanya ditentukan oleh permintaan (*utility demand determined*) namun juga oleh suplai. Marshall juga menyinggung mengenai teori ekonomi sumberdaya alam tidak pulih (*mining*) yang sedikit banyak sejalan dengan pemikiran klasik lainnya meski dalam konteks analisis statik. Kontribusi Marshall lainnya yang kemudian cukup signifikan adalah teori mengenai eksternalitas yang kemudian menjadi aspek penting dalam pemahaman mengenai aspek sumberdaya alam dan lingkungan.

Salah satu perkembangan terpenting pada era transisi dari neo-klasikal ke ekonomi modern yang dipelopori oleh Marshall dan kawan-kawan ini adalah perkembangan ekonomi sumberdaya tidak pulih, khususnya pertambangan yang kemudian diformulasikan lebih rinci oleh L.C Gray pada tahun 1913 dan tahun 1914. Gray meneruskan pemikiran Bohm-Bawerk yang membedakan ekonomi pertanian, manufaktur dan pertambangan dimana menurut Gray pada sektor pertanian lahan yang tidak digunakan pada periode yang lama akan kehilangan

produktifitasnya, sementara pada pertambangan *exhaustion* akan menyebabkan terdepresiasi nilai deposit. Meski L.C Gray merupakan dikenal sebagai *pioneer* ekonomi modern untuk sumberdaya tidak pulih, adalah Harold Hotelling, ekonom yang dikenal sebagai pendiri ekonomi mikro modern untuk sumberdaya alam tidak pulih. Adalah Hotelling yang mengetengahkan hukum Hotelling (*Hotelling's Rule*) yang berbunyi bahwa ekstraksi sumberdaya tidak pulih hanya akan optimal jika harga bersih dari sumberdaya alam (*net market price*) meningkat sejalan dengan meningkatnya biaya oportunitas kapital (suku bunga). Pemikiran Hotelling dan Gray ini kemudian dilanjutkan oleh para ekonom Amerika seperti F.W Taussig dengan *Principle of Economics* nya (1915) dan Gustav Cassel yang keduanya sama-sama berbicara mengenai deposit sumberdaya alam tidak pulih yang sedikit banyak mengembangkan ide-ide Gray dan Hotelling.

Perkembangan pemikiran ekonomi dan ekonomi sumberdaya alam yang menyertainya kemudian banyak mengalami perubahan pada 1920an dengan paradigma intervensionis atau *interventionist school* yang mengetengahkan pentingnya intervensi publik (pemerintah) dalam ruang ekonomi, tidak terkecuali dalam ekonomi sumberdaya alam.

Paradigma intervensionis juga berkembang di era periode 1950–1970an pada pada pemikiran J.K Gailbraith dan E.J Mishan. Gailbraith misalnya mengetengahkan bahwa penyelesaian masalah eksternalitas yang ditimbulkan oleh ekstraksi sumberdaya alam hanya bisa dilakukan melalui legislasi yang ketat terhadap aktifitas yang membahayakan lingkungan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa gangguan eksternalitas. Mishan di sisi lain dalam karyanya mengenai *The cost of Economic growth* (1976) mengetengahkan timbulnya masalah lingkungan akibat sikap komersial yang tidak terkendali. Mishan meyakini ongkos pembangunan terhadap sumberdaya alam sangat tinggi sehingga pengendalian dengan hak pemilikan saja tidak cukup, oleh karenanya memerlukan modernisasi kerangka kelembagaan secara menyeluruh. Mishan juga tidak meyakini bahwa *Pigovian taxation* akan efektif mencegah kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.

Era 1960s dan 1970s juga melahirkan ekonom-ekonom yang mulai berpaling dari pemikiran konvensional dan sangat konsern terhadap

sumberdaya alam dan lingkungan. Diantara mereka ini adalah Baumol dan Oates yang melihat bahwa kualitas kehidupan telah menurun akibat dua hal yakni bertambahnya eksternalitas lingkungan dan tidak efektifnya pelayanan publik. Berbeda dengan Gailbraith yang lebih memilih pengendalian langsung, Baumol dan Oates lebih memilih program *tax-subsidy* sebagai program intervensi untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan. Baumol dan Oates juga melihat sisi *equity* dari intervensi pemerintah dimana sering terjadi mereka yang kaya dapat menikmati manfaat lebih baik dari perlindungan sumberdaya alam dari pada masyarakat miskin. Hal ini berimplikasi berbeda jika dilihat dari aspek *non-convexity*.

Pertengahan tahun 1960an tepatnya tahun 1966 seorang ekonom sempat menyita perhatian dunia pula dengan konsepnya yang agak unik. Ia adalah Kenneth Boulding yang pada tahun 1966 mengetengahkan sebuah artikel berjudul "*The Economics of the Coming Spaceship Earth*" atau lebih dikenal sebagai *Bouldings; Econosphere*. Terinspirasi oleh gambar rupa bumi yang diambil dari ruang angkasa, Boulding meyakini bahwa jika pertambahan penduduk dan kegiatan ekonomi terus meningkat, maka masalah kelangkaan akan semakin memburuk sama halnya dengan masalah limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi. Boulding menyarankan adanya pergerakan pemikiran dari "*cowboy economy*" ke "*spaceship economy*" dimana pergerakan ekonomi semestinya diasumsikan berada dalam pesawat ruang angkasa dengan segala keterbatasannya. Dalam konteks ini Boulding menyadari betul sifat *non-convexity* dari sumberdaya alam dengan melihat *threshold* atau ambang batas yang dimiliki bumi sehingga ketika ambang batas ini dilewati, maka ekonomi tidak akan bisa *sustain*. Titik krusial dalam pandangan Boulding adalah bukan pada peningkatan konsumsi dan produksi, namun lebih pada pemeliharaan modal alam (*natural capital*). Boulding melihat GDP bukanlah ukuran keberhasilan pembangunan jika modal alam yang menjadi sumber GDP justru tergerus oleh pembangunan yang tidak bertanggung jawab (*cowboy economy*). Pandangan Boulding ini memang bersebrangan dengan pandangan ekonomi konvensional yang memandang sebaliknya.

Perlu dicatat selain para pemikir-pemikir diatas, periode 1950an-1970an merupakan periode yang sangat produktif dari para pemikir-pemikir ekonomi sumberdaya yang lain. Di bidang perikanan misalnya, Gordon Scott merupakan ekonom yang mempelopori lahirnya teori ekonomi perikanan yang mencoba menjawab permasalahan inefisiensi pada rezim pengelolaan perikanan dengan akses terbuka. Masalah ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1200an di Inggris dan ketika itu penyelesaian konflik akses terbuka ini diselesaikan dengan perjanjian Magna Charta. Fondasi ekonominya sendiri diselesaikan oleh Gordon pada tahun 1954 dengan mengembangkan model yang disebut sebagai model bioekonomi akses terbuka untuk perikanan. Kompleksitas sumberdaya perikanan membawa ekonomi lainnya untuk turut mengembangkan teori ekonomi sumberdaya tersebut secara lebih kompleks. Diantara mereka ini adalah Parzival Copes, ekonom dari Simon Fraser University Canada yang mengembangkan teori Copes mengenai kurva suplai sumberdaya perikanan yang merupakan pengembangan lebih rinci dari model yang dikembangkan oleh Scott Gordon. Pada periode ini pula (tepatnya 1975-1976) seorang matematikawan Collin W. Clark dan seorang ekonom Gordon Munro yang keduanya dari *University of British Columbia Canada* mengembangkan teori kapital untuk sumberdaya perikanan. Teori ekonomi sumberdaya yang mereka kembangkan ini merupakan puncak kuliminasi dari pemikiran ekonomi sumberdaya perikanan yang telah dikembangkan sejak periode neo-klasik sampai abad ke-20. Karya Clark dan Munro dianggap sebagai *milestone* dalam ekonomi sumberdaya perikanan, sehingga tidak seorang ekonompun yang menggeluti bidang ekonomi sumberdaya ini yang luput membaca karya kedua orang tersebut. Teori *capital* Clark dan Munro dalam beberapa aspek sejalan dengan pemikiran Mill, Gray Hotelling dan lain-lain yang menekankan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam terbarukan yang harus memperhitungkan *trade off* antara masa kini dan masa mendatang sehingga dihasilkan apa yang disebut sebagai *Modified Golden Rule* (MGR) atau hukum emas yang termodifikasi yang intinya adalah ekstraksi sumberdaya ikan akan optimal manakala laju pertumbuhan

manfaat marjinal dari stok dan dari pemanenan setara dengan biaya korbanan untuk menunggu (*discount rate*).

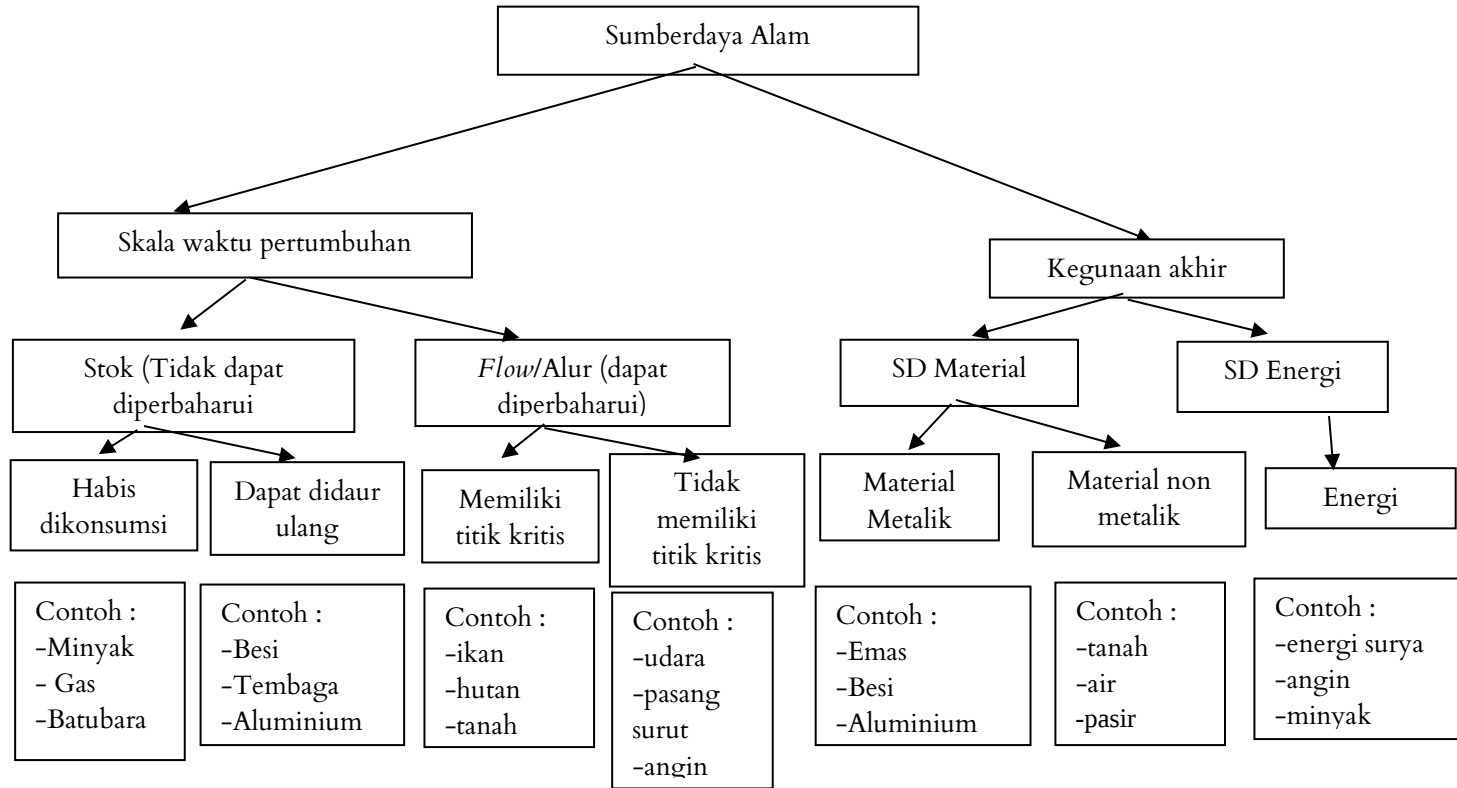
Beberapa tahun setelah publikasi Boulding dan bersamaan dengan mekarnya pemikiran-pemikiran mengenai pengelolaan ekonomi sumberdaya, beberapa perkembangan yang patut dicatat adalah terobosan yang menghebohkan dunia oleh *Club of Rome* mengenai *The Limit to Growth* (TLG) yang mengetengahkan tesis bahwa oleh karena dunia memiliki keterbatasan sumberdaya alam antara lain lahan, energi, mineral dan daya dukung lingkungan, maka akan ada *limit* (batasan) terhadap peningkatan aktifitas ekonomi, penduduk dan pencemaran yang berujung pada mengendurnya *progress* ekonomi. Meski memiliki beberapa kelemahan, hasil *Club of Rome* merupakan sintesis yang mengetengahkan adanya *non convexity* dalam sumberdaya alam. Gelombang *Limit to Growth* juga memberikan efek positif akan kesadaran perlakuan yang bijak terhadap sumberdaya alam dan lingkungan sehingga sejak awal tahun 1980an melahirkan paradigma pembangunan berkelanjutan. Konsep *sustainable development* sendiri bukanlah hal yang baru. Akar ide pemikiran ini sudah dicetuskan oleh Arthur Young pada tahun 1804 ketika ia mengamati fenomena yang menarik di pertanian Inggris dimana keberlanjutan pertanian berinteraksi positif terhadap hak pemilikan. Pembangunan berkelanjutan kini menjadi mantra bagi arah pembangunan ekonomi di hampir seluruh belahan dunia. Ini menunjukkan bahwa kesadaran paradigma lama yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata sudah semestinya berubah haluan ke arah *new direction*.

Sumber daya alam yang semula diperlakukan sebagai *fixed asset* telah berubah menjadi *dynamic assets* dengan segala karakteristiknya. Kesalahan dalam memahami karakteristik ini akan berakibat fatal bagi pembangunan ekonomi itu sendiri. Salah satu karakter itu adalah *non-convexity* dari sumber daya alam, termasuk aspek *intertemporal*, *increasing return*, *feedback*, *non-linearity*, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh pendekatan ekonomi konvensional. Perjalanan panjang ratusan tahun itulah yang pada akhirnya melahirkan ilmu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan.

B. Klasifikasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Klasifikasi sumber daya alam menurut Fauzi (2004) terbagi menjadi dua kategori utama yaitu (1) berdasarkan skala waktu pertumbuhan dan (2) berdasarkan kegunaan akhir. Berdasarkan skala waktu pertumbuhan, sumberdaya alam berupa stok dan *flow* (alir). Sumberdaya alam stok adalah sumberdaya yang tidak dapat di perbaharui (*non renewable resources*) atau terhabiskan (*exhaustible*), sumberdaya yang masuk kelompok ini antara lain sumberdaya mineral, logam, minyak dan gas bumi. Sumberdaya alam berupa *flow* (aliran), merupakan sumberdaya yang dapat di perbarui (*renewable resource*), sumberdaya alam jenis ini terdiri dari dua kelompok utama yaitu memiliki titik kritis (*carrying capacity*) seperti sumberdaya ikan, hutan, dan sumberdaya alam yang tidak memiliki titik kritis seperti angin, pasang surut air laut, udara, dan lain-lain (Fauzi 2004).

Berdasarkan kegunaan akhir, sumberdaya alam dapat digolongkan menjadi sumberdaya material dan sumberdaya energi. Sumberdaya material terbagi menjadi sumberdaya metalik dan non metalik. Sumberdaya metalik merupakan sumberdaya yang dimanfaatkan sebagai bagian dari suatu komoditas, seperti emas dan bijih besi, sedangkan sumberdaya non metalik seperti air dan pasir. Sumberdaya energi merupakan sumberdaya yang digunakan untuk kebutuhan menggerakkan energi melalui proses transformasi panas maupun transformasi energi lainnya. Sumberdaya energi berguna untuk memenuhi kebutuhan energi melalui sebuah proses tertentu, contohnya seperti energi surya, angin, minyak (Fauzi 2004). Berdasarkan klasifikasi tersebut sumberdaya ikan dan mangrove merupakan sumberdaya alam dengan kategori berdasarkan skala waktu pertumbuhan, karena masuk pada *flow* (aliran) dan memiliki titik kritis. Hal ini dapat terlihat pada kondisi mangrove di Indonesia yang sedang dalam kondisi kritis (masuk zona merah) (KLHK 2015). Klasifikasi sumberdaya alam menurut Fauzi (2004) dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 12.1 Klasifikasi Sumberdaya Alam (Fauzi 2004)

C. Peran Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam Pembangunan Ekonomi

Sumber daya alam merupakan salah satu modal pembangunan ekonomi selama lebih dari empat dasawarsa telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumber daya alam pada masa orde baru, seperti minyak, hutan, dan sumber daya mineral menjadi ujung tombak dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumber daya alam merupakan barang ekonomi khusus (*Special economic growth*) karena tidak dihasilkan oleh manusia, disebut sebagai *trully gift of nature* (anugerah alam). PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berasal dari sumber daya alam sebesar Rp 74,44 Triliun atau 61,04% (April 2022. Kemenkeu), pendapatan sumber daya alam Indonesia ini meningkat menjadi 130, 02 % atau Rp 195,98 Trilyun pada tahun 2023. Perkembangan pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam dari tahun 2019-2021 seperti pada Tabel 1.

Tabel 12.1 Realisasi Pendapatan Negara melalui Penerimaan Sumber Daya Alam Tahun 2019-2021

Tahun	Penerimaan Sumber Daya Alam (Milyar rupiah)
2019	154.895,30
2020	97.225,07
2021	130.936,80

Sumber: Reza et al., 2023

Realisasi PNPB yang berasal dari sumber daya alam mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2021, menurun di 2020 namun meningkat kembali di 2021.

Jika dimanfaatkan dengan baik sumber daya alam dan jasa lingkungan yang dihasilkan akan memberikan manfaat yang diistilahkan dengan “rente ekonomi” yang dapat ditransformasikan ke dalam bentuk kemakmuran lainnya. Namun disatu sisi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan juga akan menyebabkan degradasi lingkungan yang memicu terjadinya bencana alam yang cukup intens. Kerugian ekonomi akibat degradasi lingkungan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 12.2. Kerugian Ekonomi Akibat Degradasi Lingkungan di Indonesia

Tipe Degradasi Lingkungan	Ongkos Degradasi (2007 dalam US\$ Milyar)	% Terhadap PDB
Perubahan Iklim	Meningkat sampai akhir abad 21	2,5-7
Sanitasi air	7,7	2
Polusi Udara (<i>outdoor</i>)	3,9	0,9
Degradasi lahan	0,56	0,13

Sumber: Leitmann et al, 2009

Selain dari eksploitasi yang tidak berkelanjutan, deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan juga dipicu oleh pemahaman terhadap konsep Pembangunan yang cenderung menafikkan peran non ekstraktif dari sumber daya alam dan lingkungan dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi umat manusia, namun eksploitasi sumber daya alam berlebihan dapat memberikan bencana pada lingkungan yang pada akhirnya juga memberikan dampak buruk terhadap manusia. Salah satu masalah lingkungan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah perubahan iklim. Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan pertanian intensif, telah meningkatkan emisi gas rumah kaca, yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi. Dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan perubahan ekosistem telah menjadi bencana bagi umat manusia. Hilangnya keanekaragaman hayati juga merupakan masalah lingkungan yang serius. Spesies hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama karena hilangnya habitat alami mereka akibat pembangunan, perubahan iklim, dan aktivitas manusia lainnya. Pencemaran merupakan permasalahan lingkungan hidup yang melibatkan pelepasan zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan hidup yang dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran meliputi polusi udara, air dan tanah, yang di mana merupakan masalah

serius di seluruh dunia. Degradasi lahan melibatkan perusakan lahan pertanian, hutan dan padang rumput, yang dapat mengurangi produktivitasnya. Kegiatan seperti penggundulan hutan, intensifikasi pertanian dan urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan produktivitas lahan. Hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan global dan keberlanjutan ekosistem. Krisis sampah global merupakan permasalahan serius yang dihadapi banyak negara di berbagai belahan dunia. Dengan meningkatnya konsumsi dan urbanisasi, volume sampah yang dihasilkan ikut meningkat dan pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

D. Penutup

Ekonomi dan lingkungan merupakan ilmu yang tidak hanya mengkaji pengambilan manfaat dari sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi, namun juga harus dapat menjaga lingkungan dan sumber daya agar tetap keberlanjutan untuk masa depan anak cucu kita. Meskipun krisis lingkungan hidup saat ini memberikan tantangan yang serius, masih banyak peluang yang dapat kita manfaatkan. Inovasi teknologi, perubahan perilaku dan kerja sama global dapat membantu memecahkan permasalahan lingkungan ini. Krisis lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi seluruh umat manusia saat ini. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi dan degradasi lahan semuanya mengancam keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Namun, dengan tindakan segera dan kerja sama global, kita dapat mengatasi krisis ini.

Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan dapat diraih dengan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi polusi, mengelola lahan dengan bijak dan mengurangi pembuangan limbah sebagai langkah penting untuk melindungi bumi tempat tinggal kita. Melalui tindakan kolektif, kita dapat melindungi lingkungan alam yang berharga ini untuk generasi mendatang. Sehingga kelak, anak cucu kita tetap dapat memanfaatkan dan melihat keindahan lingkungan alam yang ada.

Referensi

- Carey, Henry Charles. (1873). *Principles of Political Economy*. Creative Media Partners, LLC, 376 pp. ISBN 1341577252, 9781341577253.
- Clapp J. (1994). *The Influence of Economic Variables on Local House Price Dynamics*. *Journal of Urban Economics*, vol. 36, issue 2, 161-183
- Fauzi A. (2004). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Jakarta. PT Gramedia Pusaka Utama.
- Faustmann, M. (1968). *Calculation of the value which forest land and immature stands possess for forestry*. In: Gane M (ed) *Martin Faustmann and the evolution of discounted cash flow: two articles from the original German of 1849*. Commonwealth Forestry Institute, Oxford, pp 27-55 (Reprinted in: *J For Econ*, 1(1) (1995): 7-44)
- Kemenkeu(Kementerian Keuangan). 2002. <https://www.djpb.kemenkeu.id/kppn/investasi>
- Kula, E. (2001). *Economics of Natural Resources and the Environment*. Chapman & Hall. London.
- Leitmann, J et.al. 2009. *Investing in a More Sustainable Indonesia: Country Environmental Analysis*. CEA Series, East Asia and Pacific region. Wangshiton DC. World Bank.
- Mishan, E. J. (1976). *The Cost of Economic Growth*. London: G. Allen & Unwin
- Reza, Devi, Ramadhani D.K, Nisa K, Mahfuzdhoh N , Fitri V. 2023. Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal of Economic Education*, Vol. 2, No. 1, pp 1-15. e-ISSN: 2964 -559X
- Tainter, Joseph A. (1988). *A review of The Collapse of Complex Societies*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 250 pp. ISBN 052138673.

Profil Penulis



Dr. Peggy Ratna Marlianingrum, S.Pi, M.Si, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 1976. Penulis meraih gelar doktor dari Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika, IPB University Bogor (2020), Program Magister Ekonomi Sumberdaya dan Kelautan Tropika, IPB University (2007), Program Sarjana Sosial

Ekonomi Perikanan, IPB University (1999). Riwayat pekerjaan, pernah bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB University (1999–2008). Sejak 2009 penulis bekerja sebagai dosen di STIE Muhammadiyah Jakarta, sekarang sudah berubah bentuk menjadi UTM Jakarta. Penulis bekerja sebagai Dosen pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta, juga sebagai peneliti dan tenaga ahli Sosial Ekonomi, Kebijakan Ekonomi Kelautan, Ekonomi Sumber Daya BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Beberapa tulisan yang sudah ditulis dan dipublikasikan pada publikasi nasional dan internasional yang bereputasi, diantaranya (1) PR Marlianingrum, T Kusumastanto, L Adrianto, A Fahrudin. 2019. *Economic analysis of management option for sustainable mangrove ecosystem in Tangerang District*, Banten Province, Indonesia; (2) PR Marlianingrum, T Kusumastanto, L Adrianto, A Fahrudin. 2021. *Valuing habitat quality for managing mangrove ecosystem services in coastal Tangerang District, Indonesia*; (3) H Hutajulu, PR Marlianingrum, AN Lobo, K Haryati. 2021. Analisis Tekno Ekonomi Pemanfaatan Limbah Tuna Berbasis Ekonomi Biru Di Kota Jaya Pura; (4) PR Marlianingrum, L Adrianto, T Kusumastanto, A Fahrudin. 2021. Sistem Sosial-Ekologi Mangrove di Kabupaten Tangerang., menulis buku “Ekspor Ikan Hias di Era Pandemi Covid 19 Tantangan dan Strategi”(2021). Mata kuliah yang diampu matematika ekonomi, statistik, metodologi penelitian, sosiologi perikanan, dan valuasi ekonomi sumber daya. Kontak Email: peggy@utmj.ac.id.

Ekonomi Syariah

Oleh: Suryani Yuli Astuti

Universitas Muhammadiyah Lamongan

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam, mengutamakan keseimbangan antara keuntungan, keadilan sosial, dan kelestarian alam. Sistem ini berfokus pada praktik bisnis yang adil, transparan, dan saling menguntungkan dengan menghindari unsur riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis melalui distribusi kekayaan yang lebih merata, di mana zakat, sedekah, dan wakaf memainkan peran penting untuk mendukung kesejahteraan bersama. Melalui pendekatan yang etis dan ramah lingkungan, ekonomi syariah berupaya membangun kesejahteraan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Prinsip utama ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Ekonomi ini menolak praktik yang merugikan atau mengandung ketidakpastian, seperti riba (bunga), maysir (perjudian atau spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Selain itu, ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat dan wakaf, bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama serta

menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip ini bertujuan agar ekonomi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, sesuai ajaran Islam.

Ekonomi Syariah muncul sebagai sistem ekonomi alternatif yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan etika berdasarkan prinsip syariah. Ekonomi syariah memprioritaskan distribusi pendapatan yang adil dan melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian berlebih). Ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang biasanya berfokus pada keuntungan. Mereka dibuat untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi. Ekonomi Syariah berkembang dengan cepat di banyak negara di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara dengan populasi Muslim tetapi juga di negara-negara Barat yang mulai menerapkan layanan keuangan syariah. Dengan aset lebih dari USD 2 triliun pada tahun 2020, perbankan syariah terus berkembang, menunjukkan minat yang meningkat terhadap keuangan yang beretika dan berkelanjutan. Namun, masyarakat dan pelaku bisnis masih kesulitan memahami ekonomi syariah.

Meskipun ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar, ada beberapa hambatan yang menghalangi pertumbuhannya diantaranya adalah:

1. Regulasi dan Standarisasi: Regulasi dan standar kepatuhan syariah yang berbeda di antara negara-negara menghambat pertumbuhan ekonomi Islam yang semakin terintegrasi di seluruh dunia.
2. Kurangnya Pengetahuan Ekonomi Syariah: Banyak masyarakat tidak memahami konsep dasar ekonomi syariah, yang mengakibatkan partisipasi yang rendah dalam layanan keuangan. Permasalahan tersebut di atas memperlambat perkembangan ekonomi syariah yang optimal dan memerlukan solusi sistematis untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah di pasar global.

Pembahasan ini bertujuan untuk menyoroti potensi besar ekonomi syariah sebagai solusi alternatif bagi stabilitas dan kesejahteraan ekonomi global. Namun, diperlukan upaya yang terintegrasi dalam hal regulasi, literasi, dan inovasi produk untuk mengatasi tantangan yang

ada, sehingga ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan baik di tingkat lokal maupun global.

A. Ekonomi Syariah sebagai Solusi Alternatif untuk Stabilitas Ekonomi

Pada permulaan disebutkan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif untuk sistem ekonomi global yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pemahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan keadilan, pemerataan kekayaan, dan pencegahan riba, maysir, dan gharar. Ekonomi syariah menawarkan cara yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mendorong model ekonomi yang bagus. Melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keuangan beretika, ekonomi Islam muncul sebagai solusi alternatif untuk stabilitas ekonomi. Keadilan sosial dan larangan riba adalah dasar transaksi ekonomi syariah, yang dianggap menyebabkan ketimpangan ekonomi yang signifikan. Larangan spekulasi dan praktik bisnis yang berisiko tinggi mengurangi volatilitas.

Pembatasan terhadap spekulasi dan praktik bisnis berisiko tinggi juga berperan dalam mencegah fluktuasi pasar yang tajam, seperti yang kerap terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Salah satu elemen inti dalam ekonomi syariah adalah sistem bagi hasil dalam kegiatan usaha, yang memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan di antara para pihak terkait, menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Selain itu, zakat atau kewajiban memberikan sedekah bagi umat Islam membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menyalurkan sebagian kekayaan kepada kelompok yang kurang mampu, sehingga turut meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ekonomi syariah dengan tegas menolak konsep bunga karena dianggap tidak adil bagi pihak peminjam dan berpotensi menyebabkan penumpukan kekayaan pada kalangan tertentu. Sebagai alternatif, ekonomi syariah menerapkan sistem bagi hasil dan investasi langsung yang mendorong pemanfaatan modal dalam proyek-proyek produktif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih

berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada utang serta mewujudkan lingkungan keuangan yang stabil. Negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem ekonominya menunjukkan stabilitas finansial yang lebih baik, terutama saat terjadi krisis ekonomi global. Misalnya, bank-bank syariah mengalami dampak yang lebih ringan selama krisis finansial dibandingkan bank-bank konvensional. Berikut ini adalah perbandingan stabilitas antara bank syariah dan bank konvensional di Indonesia selama periode krisis ekonomi 2008 hingga 2022, yang diukur dengan rasio Z-score sebagai indikator stabilitas perbankan.

Tabel 13.1 Stabilitas Bank Syariah vs. Bank Konvensional selama Krisis 2008–2022

Tahun	Z-score Bank Syariah	Z-score Bank Konvensional
2008	15.2	12.8
2009	16.0	13.5
2010	16.5	14.0
2011	17.0	14.5
2012	17.5	15.0
2013	18.0	15.5
2014	18.5	16.0
2015	19.0	16.5
2016	19.5	17.0
2017	20.0	17.5
2018	20.5	18.0
2019	21.0	18.5
2020	21.5	19.0
2021	22.0	19.5
2022	22.5	20.0

Sumber: Ahmad Fatoni dan Sahabudin Sidiq (2018)

Pada Tabel 13.1 menjelaskan bank-bank syariah mengalami dampak yang lebih rendah selama krisis finansial dibandingkan bank-bank konvensional dimana terlihat dari *Z-score* yang lebih tinggi menunjukkan tingkat stabilitas yang lebih baik.

Tabel 13.2 Stabilitas Bank Syariah vs. Bank Konvensional selama Krisis 2008–2022

No.	Jenis Bank	Rata-rata Kerugian (%)	Keterangan
1	Bank Syariah	2.5	Lebih stabil
2	Bank Konvensional	7.8	Lebih terpengaruh

Sumber: Iqbal & Mirakhor (2017)

Tabel 13.2 menampilkan rata-rata kerugian dari berbagai jenis bank. Analisis ini menunjukkan bahwa model ekonomi syariah memiliki mekanisme yang lebih tangguh terhadap gejolak ekonomi, terutama karena menghindari praktik spekulatif dan ketergantungan yang lebih rendah pada instrumen berbasis bunga. Bank syariah menunjukkan stabilitas yang lebih kuat dibandingkan dengan bank konvensional, terutama selama krisis ekonomi. Tabel perbandingan stabilitas pada periode 2008–2022 menegaskan bahwa bank syariah mengalami dampak yang lebih kecil dengan *Z-score* yang secara konsisten lebih tinggi daripada bank konvensional.

Pembatasan terhadap spekulasi dan praktik bisnis berisiko tinggi dalam ekonomi Islam juga membantu mengurangi volatilitas pasar, sehingga menjadikannya sistem yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui dukungan pada investasi yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Instrumen keuangan seperti zakat dan wakaf tidak hanya membantu mengurangi ketimpangan sosial, tetapi juga mendanai proyek-proyek publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi lingkungan. Fokus pada keberlanjutan sumber daya dan tanggung jawab lingkungan ekonomi syariah memperkuat peran ekonomi syariah

sebagai solusi holistik yang mendukung kesejahteraan sosial, tanpa mengorbankan alam dan masa depan generasi berikutnya.

B. Ekonomi Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Tujuan ekonomi dari perspektif Islam terutama terletak pada peningkatan kesejahteraan sosial berurusan dengan distribusi kekayaan yang adil dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Semua instrumen keuangan seperti zakat, sedekah, dan wakaf Islam dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan golongan ekonomi yang lemah. Zakat, misalnya, adalah salah satu kewajiban penting bagi mungkin muslim yang mampu untuk mengambil sebagian hartanya dan memberikannya kepada yang membutuhkannya, dengan memenuhi keseimbangan sosial dan jarak antara kemiskinan. Ekonomi Syariah berupaya menghindari pengisapan riba atau bunga yang biasanya merugikan peminjam dan pada saat yang sama memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pemilik modal. Sebagai gantinya, transaksi bisnis menggunakan sistem bagi hasil, di mana tidak hanya sebagian dari risiko tetapi seluruh risikonya diketahui dan dibagi rata. Hal ini menciptakan keadilan ekonomi dan mencegah penduduk eksploitasi. Dengan demikian, sistem ini mempercepat perputaran uang dalam kegiatan produktif, dan oleh karena itu, juga mempercepat pula pendapatan dan perekonomian yang lebih luas, daripada mengumpulkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

Terlepas dari itu, pendekatan ekonomi syariah juga mencakup prinsip-prinsip moral dan etika bisnis. Sistem ekonomi ini merangsang perilaku bisnis yang jujur dan transparan. Dalam Islam tidak mengizinkan spekulasi atau gharar. Prinsip moral ini akan menciptakan situasi di mana semua transaksi dilakukan dengan adil dan amanah. Dalam upaya ini, sistem ekonomi ini melibatkan bisnis dengan keamanan hukum dan kesepakatan, yang kemudian memberikan kontribusi rendah pada perekonomian yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan.

Pandangan kedua yang diangkat adalah bahwa ekonomi syariah memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui

distribusi kekayaan yang lebih merata. Sistem ekonomi syariah menekankan penggunaan instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf, yang bertujuan untuk mengalirkan sebagian kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok yang kurang mampu, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial. Penerapan zakat di berbagai negara dapat menurunkan angka kemiskinan secara berarti. Data empiris dari negara-negara yang telah menerapkan sistem zakat secara optimal, seperti Malaysia, menunjukkan penurunan kemiskinan yang cukup signifikan dibandingkan dengan negara-negara yang belum mengoptimalkan penerapan zakat.. Dampak penerapan sistem zakat terurai sebagai berikut:

Tabel 13.3 Dampak Sistem Zakat terhadap Penurunan Kemiskinan di Malaysia (2015–2020)

Tahun	Persentase Kemiskinan Tanpa Zakat (%)	Persentase Kemiskinan Setelah Zakat (%)
2015	8.2	6.5
2020	6.5	4.8

Sumber: Ahmed (2011)

Pada uraian tabel 2.3 menunjukkan penurunan persentase kemiskinan di Malaysia sebelum di terapkan dan setelah implementasi zakat. Analisis ini menggarisbawahi bagaimana ekonomi syariah tidak hanya berperan dalam stabilitas finansial, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial melalui instrumen redistribusi kekayaan.

C. Peran Ekonomi Syariah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pandangan mengenai kontribusi ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu mendorong investasi yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Melalui pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian alam, ekonomi syariah memiliki peran penting dalam pembangunan

berkelanjutan. Prinsip utama ekonomi syariah menekankan harmoni (mizan), yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan dasar ini, ekonomi syariah berupaya menghindari eksploitasi dan kerusakan lingkungan, sesuai dengan prinsip masalah yang mengutamakan kemaslahatan umum. Pendekatan ini diwujudkan dalam sistem keuangan berbasis etika, yang menghindari spekulasi dan praktik berisiko tinggi yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong investasi yang produktif dan memiliki dampak positif pada kehidupan masyarakat, misalnya dalam pengembangan infrastruktur serta sektor-sektor sosial yang bermanfaat jangka panjang. Hal ini sesuai dengan maqasid al-shariah, yang menitikberatkan perlindungan kehidupan, harta, dan kelestarian lingkungan. Instrumen keuangan syariah seperti zakat, sedekah, dan wakaf turut berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Contohnya, zakat tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang menunjang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan kemiskinan struktural. Wakaf juga memberikan kontribusi besar dalam penyediaan aset publik yang berkelanjutan, seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur umum.

Selain itu, ekonomi syariah menekankan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia atas alam. Prinsip khalifah dalam Islam mengajarkan bahwa manusia bertugas memelihara bumi, sehingga praktik bisnis yang merusak lingkungan dan mengancam kelestarian alam perlu dihindari. Ekonomi syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Ekonomi Syariah menghindari kegiatan bisnis yang membahayakan lingkungan dan kesehatan, sehingga mendorong investasi yang lebih baik. Investasi berbasis syariah cenderung fokus pada sektor yang ramah lingkungan, seperti infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan

pembangunan berkelanjutan. .Berikut adalah gambaran penempatan investasi dana syariah

Tabel 13.4 Sektor Investasi Dana Syariah (Persentase Alokasi)

No.	Sektor	Persentase Alokasi (%)	Keterangan
1	Infrastruktur Hijau	30	Berfokus pada lingkungan
2	Energi Terbarukan	25	Mendukung energi bersih
3	Pembangunan Sosial	15	Fokus pada kesejahteraan

Sumber: El-Gamal (2006)

Tabel 13.4 menunjukkan alokasi dana syariah pada sektor-sektor yang berkelanjutan. Analisis ini menyoroti bahwa investasi berdasarkan prinsip ekonomi Islam mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

D. Kesimpulan

Dari keempat pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa

- a) Ekonomi Syariah sebagai alternatif untuk stabilitas ekonomi menekankan keadilan, pemerataan distribusi kekayaan, dan menghindari praktik-praktik merugikan seperti riba, maysir, dan gharar. Dengan melarang spekulasi dan bisnis berisiko tinggi, ekonomi syariah membantu mengurangi volatilitas pasar, menjadikannya lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Bank syariah menunjukkan perkembangan yang lebih stabil dibandingkan bank konvensional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi.
- b) Ekonomi Syariah berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan mendukung investasi yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Dengan fokus pada keberlanjutan sumber daya dan tanggung jawab terhadap lingkungan, ekonomi syariah menjadi solusi yang secara holistik mendorong kesejahteraan sosial

tanpa mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya

- c) Ekonomi Syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil dan memperhatikan kebutuhan masyarakat luas. Melalui instrumen zakat, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan kelompok ekonomi lemah, menciptakan keseimbangan sosial serta menurunkan angka kemiskinan. Ekonomi syariah juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika dalam bisnis, menghindari riba yang dianggap memberatkan dan cenderung menciptakan ketimpangan, serta menggantinya dengan sistem bagi hasil yang menekankan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan.
- d) Ekonomi Syariah mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Melalui prinsip mizan (keseimbangan) dan maslahah (kepentingan umum), ekonomi Islam menghindari praktik-praktik eksploitatif dan mendorong investasi etis serta ramah lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur hijau dan energi terbarukan. Instrumen keuangan seperti zakat, sedekah, dan wakaf turut mendukung pembiayaan proyek sosial dan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang.

Referensi

- Ahmed, H. (2002). Incentive-Compatible Profit Sharing Contracts: A Theoretical Treatment. Islamic Development Bank.
- Ahmed, H. (2011). "Product Development in Islamic Banks." *Islamic Economic Studies*, 18(2), 1-33.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Cizakca, M. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: Islamic World From the Seventh Century to the Present*. Brill.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fatoni, A., & Sidiq, S. (2018). *Analisis Perbandingan Stabilitas Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 135-150.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Kahf, M. (1989). Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh. *Islamic Economic Studies*.
- Kahf, M. (2004). *Islamic Economics: What Went Wrong?* Islamic Development Bank.
- Khan, M. A. (2010). *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. Routledge.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasr, S. H. (1996). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. Kazi Publications.

Siddiqi, M. N. (2004). Riba, Bank Interest, and the Rationale of Its Prohibition. Islamic Development Bank.

Profil Penulis



Suryani Yuli Astuti, SE, MM

Terlahir 47 tahun yang lalu sebagai anak kedua seorang guru agama yang bernama Abd. Rosjad SW dan Shohifah bertempat tinggal di Lamongan Jawa Timur. Penulis menjalani profesi sebagai seorang dosen pada Universitas Muhammadiyah Lamongan mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan bagi dosen yang berkarya tulis, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa kali menerima hibah penelitian dan pengabdian masyarakat menjadikan tantangan untuk selalu berkarya dan bermanfaat untuk orang lain.

Buku Auditing yang terbit tahun 2023 disusul beberapa judul pada tahun 2024 diantaranya Desain Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Manajemen Keuangan Terapan, Dasar-Dasar Auditing, Human Capital Management in the Society 5.0 Era, Teori Ekonomi Modern Mikro dan Makro merupakan sebagian karya tulisnya . Bertekad untuk terus melahirkan karya tulis sehingga dapat memotivasi pembaca untuk menulis. Besar harapan semoga bertambah kesempatan belajar dan berbagi ilmu bermanfaat untuk masyarakat.

Pengantar Ilmu Ekonomi

Buku chapter berjudul "**Pengantar Ilmu Ekonomi**" ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk memahami konsep dasar, prinsip, serta teori-teori kunci dalam ilmu ekonomi. Buku ini memberikan landasan yang solid bagi para mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi, baik dari perspektif mikroekonomi maupun makroekonomi.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, pemahaman tentang ilmu ekonomi menjadi semakin relevan. Buku ini tidak hanya mengupas teori ekonomi secara mendalam, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika ekonomi kontemporer, seperti isu-isu global, kebijakan ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta peran teknologi dalam mendorong perubahan ekonomi. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca diajak untuk memahami bagaimana prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat individu, perusahaan, maupun pemerintahan.

Dengan kolaborasi dari berbagai penulis yang berpengalaman di bidangnya, buku ini menawarkan perspektif yang kaya dan mendalam, menjadikannya sebagai referensi penting bagi siapa pun yang ingin memahami ilmu ekonomi secara lebih mendalam. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan literasi ekonomi di Indonesia.



Penerbit Minhaj Pustaka
www.minhajpustaka.id
IG: @minhajpustaka



9

ISBN 978-634-7065-93-3

